



Masyarakat dan Konservasi

50 Kisah yang Menginspirasi
dari WWF untuk Indonesia

Tim Editor : Cristina Eghenter, M. Hermayani Putera, Israr Ardiansyah

Tim Editor :

Cristina Eghenter, M. Hermayani Putera, Israr Ardiansyah

Foto Sampul :

Jimmy Syahirsyah/WWF-Indonesia

Desain Sampul:

Try Harta Wibawanto

Desain & Tata Letak :

Bernard (dipostudio)

Try Harta Wibawanto

Diterbitkan :

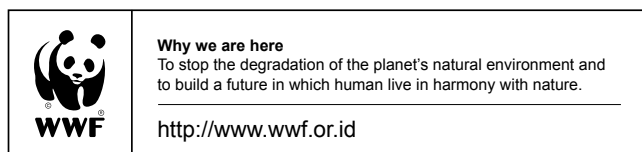
Oktober 2012 oleh WWF-Indonesia. Setiap reproduksi secara penuh atau sebagian harus menyebutkan judul dan kredit penerbit yang disebutkan di atas sebagai pemilik hak cipta.

Dicetak di atas kertas :

ISBN : 978-979-1461-30-6

© Text 2012 WWF-Indonesia

WWF-Indonesia adalah organisasi independen yang menjadi bagian dari jaringan WWF dan afliasinya serta merupakan organisasi konservasi global yang beroperasi di lebih dari 100 negara di dunia. Visi WWF-Indonesia adalah keberlanjutan keragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Misi WWF-Indonesia termasuk: mempromosikan etika konservasi yang kuat; kesadaran serta aksi nyata masyarakat Indonesia; memfasilitasi para pihak untuk melindungi keragaman hayati dan proses ekologi dalam skala eko-regional; untuk mengadvokasi kebijakan, peraturan dan penerapan hukum yang mendukung upaya konservasi; serta mendorong upaya konservasi yang mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui sumberdaya alam yang lestari.



This publication should be referred to as: Eghenter, C. Putera, M.H. Ardiansyah I (eds) (2012) Masyarakat dan Konservasi 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia. WWF-Indonesia

Masyarakat dan Konservasi

50 Kisah yang Menginspirasi
dari WWF untuk Indonesia



Ucapan Terimakasih :

Terima kasih sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada para ‘*story-tellers*’ di dalam buku ini. Tanpa upaya dan semangat penulis yang mewakili semua proyek dan lokasi kerja kita, tidak mungkin kami merangkum ‘sebuah kesaksian’ sejarah konservasi WWF di Indonesia. Yang paling penting, mereka berhasil melalui tulisan-tulisan menularkan kepada pembaca komitmen yang tulus bekerja konservasi di lapangan bersama masyarakat.

Tanpa pendampingan dan visi *Community Empowerment Working Group* (CEWG) yang selalu mengingatkan kita betapa penting menghargai dan menghormati masyarakat dalam konservasi, tidak mungkin buku ini jadi.

Ucapan terimakasih kepada semua teman-teman dalam lingkaran CEWG, yang sungguh-sungguh kepada *Senior Management Team* (SMT) WWF-Indonesia, terutama kepada CEO WWF-Indonesia Bapak Dr. Efransjah dan *Marketing and Communication Director* WWF-Indonesia, Ibu Devy Suradji, atas perhatian dan dukungan sehingga karya ini dapat diselesaikan dan diluncurkan pada kesempatan emas ini, perayaan 50 tahun konservasi WWF-Indonesia.

Di akhir kata kami ingin juga mengucapkan banyak terimakasih kepada sumber inspirasi kita, yaitu masyarakat di lokasi WWF-Indonesia bekerja. Secara lebih khusus, buku ini juga kami persembahkan kepada rekan kami almarhumah Ibu Hanna Tobing (1956-2010) yang terus mengingatkan kami pentingnya mendokumentasikan dan mempublikasikan kerja-kerja WWF bersama masyarakat.

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	IV
Daftar Isi	V
Pengantar CEO WWF-Indonesia	VII
1. Masyarakat di Garis Depan Konservasi	1
Pada Mulanya hanya Perlindungan Spesies	5
2. Pada Mulanya hanya Perlindungan Spesies	6
Paradigma Konservasi Mulai Berkembang ke Arah Lebih Terpadu	8
3. Merajut Konservasi dan Pembangunan di TN Kerinci Seblat	10
4. Ekonomi Rakyat versus Konservasi Sumber Daya Alam	12
5. Ternak dan Madu untuk Lestarian Kawasan Gunung Mutis	14
Penelitian untuk Konservasi yang Lebih Baik dan Bermanfaat	16
6. Penelitian: Alat Advokasi di Kawasan Konservasi Kayan Mentarang	18
7. Ekspedisi Lintas Batas Betung Kerihun-Batang Ai/Lanjak Entimau	21
8. Menjaga Lorentz, Surga Tersisa di Planet Ini	23
Mempromosikan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional	27
9. Pengakuan atas Hak Akses dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersama Masyarakat Adat	28
10. Membangun Kolaborasi Pengelolaan TN Sebangau	30
11. Forum Kolaborasi Pengelolaan TN Wasur, Semangat Kebersamaan di Ujung Timur	32
12. Terobosan Masyarakat Wakatobi yang Mendunia	34
Mengubah Perilaku: Dari Seteru Menjadi Sekutu	36
13. Kisah Kerjasama Menghentikan Pembalakan Liar di Riau	38
Pemetaan Partisipatif	40
14. Penguatan Sistem Pengelolaan di TN Kayan Mentarang dengan Pemetaan Desa Partisipatif	42
15. Menata Ruang Kabupaten Merauke dengan Partisipasi Masyarakat	44
Bencana Alam, Mitigasi dan Konservasi	46
16. Bangkit Setelah Tsunami	48
17. Restorasi Koridor: Bersama Masyarakat Menjawab Perubahan Iklim	50
Membangun Kehidupan yang Lebih Baik	52
18. Lidah Buaya di Lahan Gambut Sebangau	54
19. Mengembangkan Ekowisata di Jantung Borneo	56
20. Produk <i>Green & Fair</i> : Pilihan Bijak untuk Masyarakat dan Alam	58
21. Menjaga Sumber Penghidupan yang Berkelanjutan di Sekitar TN Bukit Barisan Selatan	60
22. Minyak Kayu Putih dan Harapan di TN Wasur	63
23. Madu Manis Para Penjaga Hutan Tesso Nilo	65

Jasa Keuangan	68
24. Upaya Pemberdayaan yang Kreatif dan Akuntabel di Kapuas Hulu	70
25. Modal Usaha Ramah Lingkungan di Solor-Alor	72
Energi Terbarukan	74
26. Hutan, Air, Listrik dan Penghidupan Masyarakat	76
27. Kisah Mikrohidro di Long Pahangai, Kutai Barat	78
Jasa Ekosistem	80
28. Program Jasa Lingkungan di Pulau Lombok:	
Membangun Tanggung Jawab Bersama	82
29. Tekad Warga Tumbang Runen Lindungi Danau Hai	84
30. Restorasi Ekosistem Bersama Masyarakat di TN Sebangau	86
31. Pengelolaan DAS Terpadu dan Berkelanjutan di Aceh	88
Belajar dari Kearifan Lokal dan Adat	90
32. Kemenangan Kearifan Lokal di Danau Lindung Empangau	92
33. Tana Ulen: Tradisi Dayak Kenyah untuk Kelestarian Hutan	94
34. Melindungi Lumbung Ikan di Perairan Koon	96
35. Lumbung Benih Garansi Penghidupan Orang Kei	98
Kebijakan Hukum Formal yang Memperhatikan	
Kepentingan Masyarakat Marjinal	100
36. Pembelajaran dari Penyusunan Peraturan Daerah Partisipatif di Merauke	102
37. Advokasi Kebijakan: Upaya Membangun Gerakan Sosial	104
Organisasi dan Kepemimpinan Masyarakat dalam Konservasi	106
38. Pengelolaan Kolaboratif DAS Benenain Noelmina di Timor Barat	108
39. FORMADAT: Konservasi dan Pembangunan	
Berkelanjutan Lintas Batas Negara	110
40. KOMPAKH: Jembatan antara Konservasi dan Ekonomi	112
Konservasi dan Dunia Usaha	114
41. Nelayan Tuna Balauring: Menuju Perikanan Internasional	116
42. Mo Make Unaf : Kearifan Lokal dan Mimpi Mulia	118
43. Mendampingi Pengelolaan Hutan Lestari oleh Masyarakat Adat di Papua	120
44. Lubuk Kakap, Kehidupan Sebuah Desa dalam Hutan Produksi	122
Masyarakat dan Perlindungan Spesies	125
45. Ketika Masyarakat Abun Berdampingan dengan “Penjelajah Samudera”	126
46. “Flying Squad” dan Mitigasi Konflik Manusia-Gajah	128
Pesan Konservasi dari Masyarakat	131
47. Photo Stories: Saksi Mata Kekayaan Bumi Papua	132
48. Panda CLICK!: Suara Konservasi dari Akar Rumput	134
49. Pemasaran Sosial: Membangun Kepedulian Publik untuk Konservasi	136
50. Konservasi Bernilai Tinggi dan Bermanfaat	138
Daftar Singkatan	140
Daftar Kontributor	143
Daftar Fotografer	145

Pengantar

CEO WWF-Indonesia

Banyak cara memperingati momen spesial. Bagi WWF-Indonesia yang tahun ini mensyukuri 50 tahun keberadaan kami bekerja di Indonesia, salah satu hal yang menarik adalah menuliskan pengalaman empirik ini di lapangan. Bisa kita bayangkan bagaimana dinamika yang dihadapi dengan keragaman karakter dan tipologi masyarakat serta tantangan berupa kondisi geografis di wilayah kerja WWF-Indonesia yang membentang dari Sumatera hingga Papua.

Menyimak 50 kisah yang ditampilkan dalam buku ini, kita seolah diajak untuk melakukan semacam “ziarah sejarah” perjalanan WWF-Indonesia dalam kurun waktu yang monumental ini. Saya menangkap ada satu pesan sangat kuat muncul di sini: salah satu faktor pendukung utama sehingga WWF-Indonesia tetap bisa eksis dan relevan hingga saat ini justru karena WWF-Indonesia secara sadar memilih bekerja di lapangan bersama masyarakat di lokasi kerjanya.

Semua kisah di buku ini semakin menegaskan bahwa polarisasi antara masyarakat dan konservasi dalam dua posisi yang diametral semakin tidak relevan. Sebaliknya, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam justru akan membangun dua hal sekaligus yang saat ini semakin langka dalam praktik pembangunan: adanya kepemilikan masyarakat terhadap program serta kepemimpinan efektif di tingkat masyarakat.

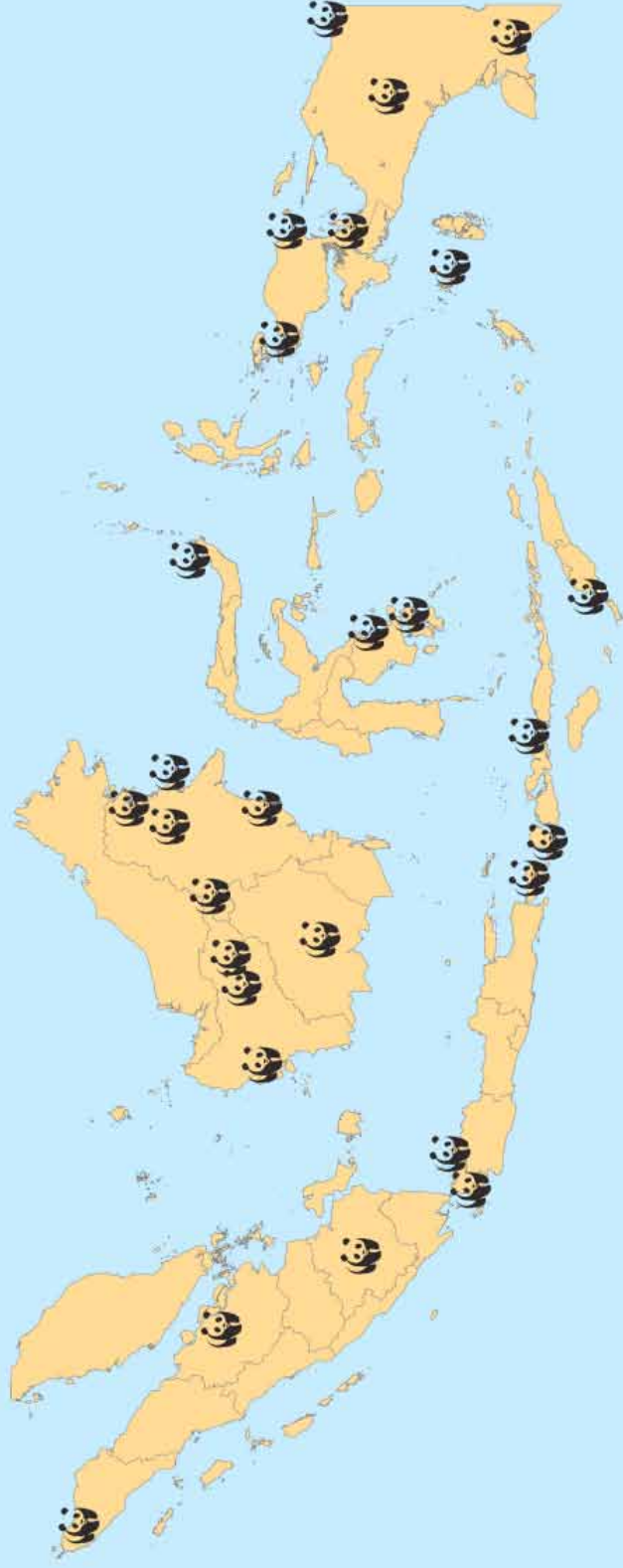
Sebagaimana pesan yang coba disampaikan di judul buku ini, saya juga berharap semoga kisah-kisah yang disajikan buku ini bisa menambah wawasan para pembaca sekaligus sebagai sebuah mekanisme pembelajaran bersama. Saya juga akan ikut berbangga jika beberapa ide dan pengalaman di buku ini bisa menginspirasi kerja-kerja masyarakat di bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang diprakarsai sendiri oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan bersama WWF-Indonesia dan lembaga lain.

Atas nama manajemen dan seluruh staf WWF-Indonesia yang tahun ini sedang berbahagia di ulang tahun emas ke-50, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kado spesial ini kepada Tim Editor, seluruh kontributor tulisan, dan rekan-rekan lain yang ikut menyumbang foto. Kontribusi ini sungguh membuat perayaan 50 Tahun WWF-Indonesia ini sarat makna dan kaya warna.

Selamat membaca!

Dr. Efransjah

Lokasi Kerja WWF di Indonesia



1. Masyarakat di Garis Depan Konservasi

Oleh M. Hermayani Putera

“...masyarakat selalu berakar dan tergantung hidupnya dari sumber daya alam yang lestari.”



Tahun 2012 ini genap setengah abad kiprah WWF di Indonesia. Selama itu, istilah “masyarakat dalam konservasi” selalu menjadi pembahasan menarik. Kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) sering dihadapkan kutub “pro-manusia” dan “pro-lingkungan”.

WWF-Indonesia mencoba mempertemukan kedua kutub itu. Laporan internal WWF dalam 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa WWF mengalokasikan lebih dari 50 persen sumberdaya manusia dan finansialnya untuk bekerja bersama masyarakat. Ini menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan pengelolaan SDA. Sementara, sebagian pelaku pembangunan masih mengabaikan filosofi dasar kearifan lokal: masyarakat selalu berakar dan tergantung hidupnya dari sumber daya alam yang lestari.

Buku berisi 50 tulisan memperingati 50 tahun WWF-Indonesia ini mengumpulkan pengalaman staf WWF bekerja bersama masyarakat. Temanya beragam, kaya pendekatan dan strategi dalam mengatasi dinamika. Diawali kisah konservasi badak di Ujung Kulon pada 1962, buku ini mencoba memaparkan perjalanan WWF mengembangkan paradigma konservasi terpadu, berbasis riset dan penelitian guna merumuskan strategi konservasi yang lebih komprehensif. WWF juga memberi masukan pola pengelolaan kolaboratif taman nasional dengan menegaskan posisi dan peran masyarakat, satu aktor kunci efektivitas pengelolaan kawasan. Lebih lanjut lagi, dilakukan pemetaan partisipatif atas lokasi yang bernilai ekologi, sosial, kultural dan spiritual penting bagi masyarakat. Pesannya jelas: kearifan lokal dan adat adalah komponen penting pengelolaan SDA dan kawasan konservasi. Inilah dasar kuat bagi WWF mengembangkan sumber penghidupan masyarakat yang lebih baik dan pengembangan jasa ekosistem.



Dengan kesadaran bahwa WWF tidak seterusnya bekerja di satu wilayah tertentu, buku ini juga menceritakan upaya WWF mengembangkan strategi pengakhiran program. Strategi itu mencakup advokasi kebijakan hukum formal guna menguatkan masyarakat marjinal, mengembangkan organisasi dan kepemimpinan di tingkat lokal, mendorong dunia usaha dan pelaku bisnis di tingkat masyarakat mengadopsi prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa hal, proses ini berjalan baik. Masyarakat mampu terlibat menginisiasi dan mengelola program konservasi serta mengembangkan bisnis yang lebih adil dan lestari. Di beberapa tempat, mereka mampu mengidentifikasi dan mengkomunikasikan isu strategis konservasi dan aspek terkait dalam kehidupan sehari-hari melalui media yang sangat efektif seperti fotografi.

Mengingat hampir 70 persen wilayah kerja WWF-Indonesia bertumpang tindih dengan peta potensi bencana, strategi pencegahan dan pemulihan bencana berbasis ekosistem juga menjadi kepedulian WWF. Masyarakat menjadi pelaku utama, sejajar dengan pemangku kepentingan lain dalam strategi mitigasi bencana. Seluruh inisiatif dan kerja di atas seluruhnya dilakukan dengan semangat kolaboratif, bekerjasama dengan pemerintah, swasta, dan tentu saja masyarakat tempat WWF bekerja.

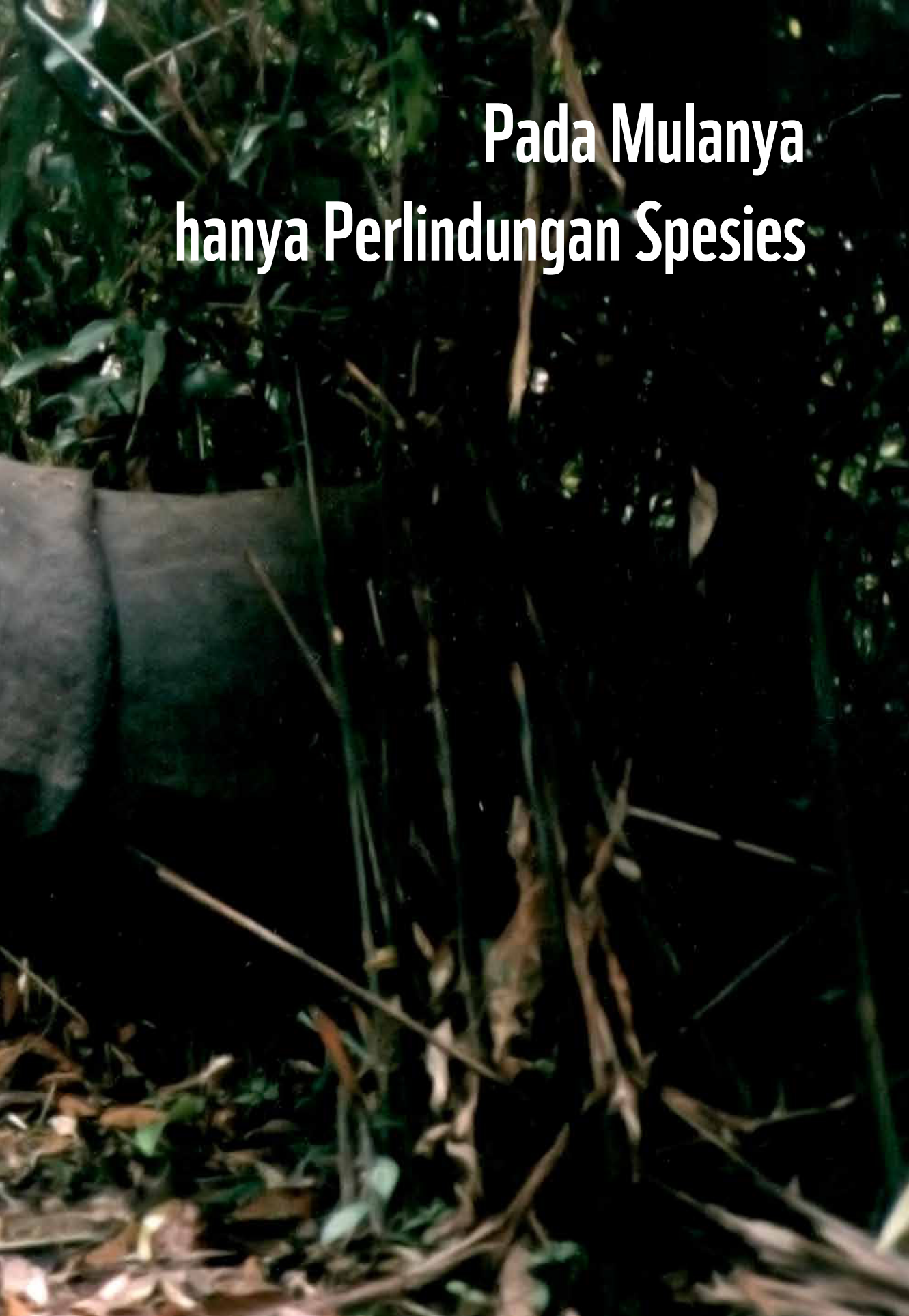
Buku ini mencoba membangun benang merah: strategi konservasi harus terintegrasi dengan strategi kebudayaan, perlu bersepakat dengan strategi sosial, wajib bersinergi dengan strategi pembangunan ekonomi, dan membutuhkan komitmen politik yang memadai. Jika ini terwujud, masyarakat tidak akan ragu mencurahkan seluruh potensi energi sosial dan menjadi penjamin utama bagi inisiatif konservasi di wilayah mereka.







**Pada Mulanya
hanya Perlindungan Spesies**



2. Pada Mulanya hanya Perlindungan Spesies

Oleh Adhi Rachmat Hariyadi



1967-1968

*“...upaya pelestarian badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang diawali dengan penelitian Profesor Rudolph Schenkel beserta istrinya Lotte Schenkel...”*

WWF yang didirikan pada 29 April 1961 bertujuan untuk melestarikan spesies satwa langka di seluruh dunia. Organisasi ini memulai kiprahnya di Indonesia dengan upaya pelestarian badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang diawali dengan penelitian Profesor Rudolph Schenkel beserta istrinya Lotte Schenkel di Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 1967-1968.

Penelitian oleh Profesor Schenkel menghasilkan informasi awal mengenai keberadaan, sebaran, dan perilaku badak Jawa yang ada di Ujung Kulon pada saat itu. Metoda yang digunakan pada penelitian ini kemudian dikembangkan menjadi sistem pemantauan badak Jawa yang dikenal sebagai ‘sensus jejak badak’. Sensus jejak badak ini kemudian menjadi protokol baku yang diadopsi oleh pengelola Taman Nasional Ujung Kulon dalam memantau jumlah badak Jawa. Kontribusi WWF terhadap pelestarian badak Jawa di Ujung Kulon terus meningkat dengan adanya dukungan bagi kegiatan patroli pengamanan sekaligus juga penguatan kapasitas pengelolaan di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

Seiring perkembangan teknologi, pada awal tahun 1990-an WWF memperkenalkan metoda pemantauan badak menggunakan kamera jebak (kamera otomatis) yang memungkinkan pengambilan foto badak tanpa harus ada operator yang berdiam di habitat badak dalam waktu terlalu lama. Hasil foto kamera otomatis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu dan menduga jumlah populasi badak Jawa tersebut. Metoda ini juga diadopsi oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon sebagai protokol pemantauan populasi badak Jawa.

WWF pun menyadari bahwa upaya pelestarian badak tidak terbatas pada penelitian, pemantauan, dan penguatan kapasitas pengelolaan saja. Tanpa dukungan masyarakat yang tinggal disekitar Taman Nasional, upaya pelestarian badak tidak akan berjalan optimal. Pada pertengahan 1990-an, WWF mulai mengadakan pendekatan dengan masyarakat di sekitar Ujung Kulon. Pendekatan dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan dan diskusi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat desa untuk menjajagi persepsi masyarakat mengenai konservasi badak Jawa. Upaya ini dilanjutkan dengan pengenalan opsi-opsi untuk menghasilkan pendapatan alternatif.



Pendekatan melalui aspek sosial ekonomi merupakan langkah yang strategis mengingat sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon terdiri dari petani dan nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka mengandalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pendampingan masyarakat di sekitar Ujung Kulon mengacu pada tiga kegiatan besar yaitu: pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan, pendapatan alternatif (antara lain melalui skema kerajinan rumah tangga dan ekowisata), dan peningkatan kesadartahuan.

Pendekatan multidisiplin seperti ini diharapkan mendorong upaya pelestarian badak Jawa secara optimal melalui kegiatan pengamanan kawasan, pemantauan populasi badak, dan pendampingan masyarakat di sekitar Ujung Kulon. Berbagai pengalaman dan pertemuan di Ujung Kulon telah membuahkan dokumen panduan bagi WWF-Indonesia dalam pendampingan masyarakat serta penyelenggaraan dan pengelolaan Ekowisata berbasis masyarakat.



Paradigma Konservasi Mulai Berkembang ke Arah Lebih Terpadu



3. Merajut Konservasi dan Pembangunan di TN Kerinci Seblat

Oleh Dudi Rufendi

“Aspek penting implementasi ICDP adalah adanya insentif untuk tidak merusak alam berupa bantuan kepada masyarakat.”



Taman Nasional Kerinci-Seblat (TNKS) adalah taman nasional (TN) terluas di Sumatera (1.368.000 Ha) yang dideklarasikan tahun 1982. Lebih dari tiga juta jiwa dan tujuh juta hektar lahan pertanian di Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan tergantung pasokan air dari TNKS. Beberapa daerah aliran sungai (DAS) penting yang berhulu di sini adalah Batanghari, Musi, Ketahun, Manjunt, dan Lunang-Silaut.

Tahun 1990 Ditjen PHPA dan WWF-Indonesia Programme mulai melaksanakan proyek pengembangan pengelolaan TNKS. Tiga tahun pertama, kegiatan dipusatkan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (luas 146.000 Ha, 360.000 jiwa) yang 54% wilayahnya berada dalam TNKS. Kegiatan saat itu difokuskan pada pengembangan pengelolaan taman nasional dan pemberdayaan masyarakat terkait konservasi. Kegiatannya mencakup pengembangan infrastruktur pengelolaan, pelatihan staf lapangan, patrol pengamanan, dan pengembangan rencana pengelolaan TN. Titik penting keterlibatan WWF adalah pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendekatannya adalah dengan memadukan aspek konservasi dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (*Integrated Conservation and Development Project or ICDP*), yang mulai diterapkan pada pengelolaan kawasan konservasi di dunia pada akhir tahun 1980-an.

Tatanan adat di Kerinci masih sangat kuat. Itu memudahkan interaksi WWF dengan masyarakat. Bersama tokoh adat, WWF menerapkan pendekatan ICDP ini pada penguatan pengelolaan hutan adat, penataan batas TN secara partisipatif, dan pengembangan ekonomi produktif. Seluruh hutan adat yang difasilitasi WWF mendapat SK Bupati. Hutan Adat (HA) itu adalah HA Lekuk 50 Tumbi Hulu Air Lempur (meraih penghargaan lingkungan se-Provinsi Jambi, 1993), HA Temedak Desa Keluru (memperoleh Kalpataru, 1992), dan HA Nenek Limo Hiang Tinggi – Nenek Empat Betung Kuning – Muara Air Dua (penghargaan lingkungan se-Provinsi Jambi 1994).

Keberhasilan ini menarik perhatian Bank Dunia. WWF diminta mereplikasi program itu di 10 desa di empat provinsi sebagai model pengelolaan proyek ICDP TNKS di 76 desa.



Aspek penting implementasi ICDP adalah adanya insentif untuk tidak merusak alam. Aspek insentif berupa bantuan kepada masyarakat “Hibah Konservasi Desa (HKD)” yang dirancang dan diimplementasikan secara partisipatif. Dana HKD itu disalurkan Bank Dunia melalui pemerintah setelah ada jaminan “Kesepakatan Konservasi Desa (KKD)”, yaitu dokumen kesepakatan masyarakat untuk konservasi yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pengelola TNKS.

KKD berfungsi untuk mengatur pemanfaatan ruang di desa secara terencana, mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang relevan dengan pelestarian TNKS serta potensi sumber daya alam desa, juga mengatur strategi dan mekanisme kontrol secara partisipatif pemanfaatan sumber daya alam desa. Hasil KKD adalah perencanaan tata guna lahan yang rasional dan layak terap di desa, kejelasan batas lahan budidaya dan kawasan TNKS yang disepakati bersama, pemanfaatan SDA di daerah penyangga yang terencana dan berkelanjutan, serta TNKS menjadi bagian dari keseharian masyarakat untuk dilestarikan.

4. Ekonomi Rakyat versus Konservasi Sumber Daya Alam

Oleh Dudi Rufendi



*“...Lampu Nyalo
Rimbo Tajago,
Lampu Nyo Terang
Rimbo Jangan
Ditebang...”*

Pembangunan ekonomi sering dipertentangkan dengan konservasi sumber daya alam. Bahkan ada yang mengatakan konservasi sumber daya alam dapat menghambat pembangunan ekonomi atau memiskinkan masyarakat.

Tahun 1990 WWF-Indonesia Programme menjajaki kemungkinan memadukan konservasi dengan pengembangan ekonomi rakyat di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Awalnya, WWF membantu pengembangan pengelolaan *home stay* bagi wisatawan asing/lokal pada beberapa rumah masyarakat di Desa Kersik Tuo Kab. Kerinci, berhadapan dengan pintu gerbang pendakian ke Gunung Kerinci serta lokasi transit menuju Danau Gunung Tujuh. Dilakukan pula pelatihan pemandu wisata untuk bisnis ekowisata. Hingga kini, ekowisata berbasis masyarakat masih berlangsung. Desa itu bahkan menjadi simpul ekowisata TNKS di Kabupaten Kerinci. Masyarakat mendapat manfaat langsung. Selain itu, WWF juga mengembangkan sejumlah inisiatif ketika melaksanakan ICDP-TNKS, antara lain lewat:

Program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) *Sakti Alam Serampas* di Desa Rantau Kermas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi memiliki slogan *Lampu Nyalo Rimbo Tajago, Lampu Nyo Terang Rimbo Jangan Ditebang* (lampu menyala hutan terjaga, supaya menyala hutan jangan ditebang). Sampai sekarang PLTMH ini masih berfungsi dan menjadi penopang pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Di *Jurong* Koto Lamo Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tatanan *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) *Lakitan* sangat ampuh memerangi pembalakan haram di TNKS. Masyarakat secara konsisten melaksanakan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang disepakati, apalagi ada pengalaman banjir bandang Sungai Lakitan yang membelah desa mereka, sehingga menyebabkan kerusakan sarana desa, perumahan, dan persawahan.

Di *Jurong* Sungai Aro Kabupaten Solok saat itu, satu usulan Hibah Konservasi Desa (HKD) adalah penggemukan sapi. Warga perambah hutan disepakati memperoleh bantuan sapi pada perguliran pertama. Saat itu 54 keluarga mendapat giliran pertama. Mereka satu persatu meninggalkan ladangnya di TNKS, memulai penggemukan sapi di pekarangan. Mereka juga menanam lahan yang dulu terlantar dengan rumput gajah untuk pakan sapi.

Di Desa Katenong Kabupeten Rejang Lebong, Bengkulu yang berbatasan dengan TNKS, mayoritas penduduk berkebun kopi. Tak heran, hampir semua rumah di desa ini menawarkan kopi hangat apabila kita bertandang. Dalam ICDP, desa ini mendapatkan HKD untuk koperasi desa bagi pengadaan sarana produksi pertanian dan simpan pinjam. Syarat utama anggota koperasi ini adalah tidak merambah/memiliki kebun di dalam TNKS. Banyak yang lalu meninggalkan kebun mereka di TNKS untuk menjadi anggota koperasi. Kopi adalah penggerak utama ekonomi rakyat disana. Masyarakat memerlukan air untuk memutar kincir yang menggerakkan penggiling kopi, Mereka sadar, untuk kelangsungan sumber air tersebut diperlukan hutan yang lestari untuk terus memutar roda penggiling kopi.



5. Ternak dan Madu untuk Lestarikan Kawasan Gunung Mutis

Oleh M. Ridha Hakim dan Yeni Nomeni



“Pada usaha madu,
harga jual madu
meningkat dari

Rp 5.000/botol
menjadi

Rp 50.000...”

Masyarakat di kawasan hutan lindung dan Cagar Alam Gunung Mutis telah lama memanfaatkan kawasan hutan untuk kebutuhan hidupnya. Mereka menggembala sapi, mengumpulkan kayu bahan bakar dan bangunan serta memanen madu alam (madu hutan). Tentu, bila caranya salah, ini bisa mengancam fungsi ekologis kawasan hutan ini sebagai kawasan perlindungan sistem keanekaragaman hayati, fungsi tata air dan penyangga kehidupan.

Penggembalaan sapi dilakukan di Gunung Mutis karena peternakan tidak menghasilkan keuntungan. Tingginya angka kematian ternak, penurunan kualitas ternak karena *inbreeding* dan kurangnya pakan yang memadai, membuat masyarakat terus menggembalakan sapi. Sapi, dengan kuku lebarnya, ternyata memadatkan permukaan tanah sehingga diduga menghambat regenerasi alami vegetasi di kawasan hutan. Tanah yang padat memperburuk sistem tata air dan mempercepat aliran permukaan (*run off*) karena air yang meresap ke tanah menjadi sedikit. Ketika hujan lebat bisa terjadi banjir.

Sementara, di kawasan itu dilakukan pula pemanenan madu yang dihasilkan lebah *Apis dorsata*, yang umumnya membangun sarang pada pohon Ampupu (*Eucalyptus urophylla*), kayu putih (*Eucalyptus alba*) dan jenis lain seperti *Albizia sinensis*, *Teframeles nudiflora*, *Acacia leucophloea* yang tumbuh merata dalam kawasan hutan Mutis. Secara turun-temurun telah dibagi-bagi “Suf”, wilayah pengelolaan secara adat dengan batas alam berdasarkan aturan adat yang ketat oleh masing-masing marga/klan.

Dari realitas yang ada, WWF-Indonesia bersama berbagai pihak meluncurkan inisiatif untuk menjaga fungsi ekologis hutan. Intensifikasi peternakan dilakukan untuk mencegah perambahan hutan sekaligus meningkatkan nilai jual sapi. Digiatkan pula paronisasi, inseminasi dan pemagaran.

Pengembangan hijauan makanan ternak digiatkan bersama masyarakat untuk meningkatkan berat badan sapi. Sementara, pelatihan tenaga peternakan dan perluasan jaringan pemasaran dilakukan bersama pemerintah. Terkait usaha madu, WWF-Indonesia menggelar pelatihan bersama kelompok masyarakat tentang pemanenan lestari dan pengolahan higienis pasca panen serta pemasaran. Sebanyak 14 kelompok masyarakat di 10 desa dengan anggota mencapai 300 keluarga ikut terlibat.



Upaya itu membawa hasil. Pada tahun 2000, seekor sapi maksimal dijual Rp 3.000.000,00 /ekor. Sekarang, harganya hingga melebihi dua kali harga sebelumnya. Jumlah sapi di kawasan hutan juga menurun. Data sensus WWF dan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan (1996) mencatat sapi di Cagar Alam Mutis mencapai 24.000 ekor. Setelah program ini berjalan, jumlah sapi di sana berkurang terus sampai 9000 ekor (2005). Ini berarti berkurangnya tekanan terhadap kawasan hutan. Pada usaha madu, harga jual madu meningkat dari Rp 5.000/botol (600 ml) menjadi Rp 50.000/botol. Dari penjualan setiap anggota yang dapat mencapai 10 liter tiap bulan, maka penghasilan anggota kelompok dapat mencapai Rp 800.000/bulan.

Ternak dan madu di kawasan cagar alam Gunung Mutis juga membuktikan bahwa upaya-upaya konservasi dapat dicapai dengan kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai setempat: keserasian manusia dengan alamnya.





**Penelitian untuk Konservasi
yang Lebih Baik dan Bermanfaat**



6. Penelitian: Alat Advokasi di Kawasan Konservasi Kayan Mentarang

Oleh Cristina Eghenter

Tahun
2002

*TNKM sebagai
taman nasional
pertama di Indonesia
yang dikelola secara
kolaboratif berbasis
masyarakat*



Salah satu faktor penentu pendorong perubahan status kawasan konservasi Kayan Mentarang dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional pada tahun 1996 adalah hasil penelitian Program “Kebudayaan dan Pelestarian Alam.”

Penelitian tersebut adalah buah kerjasama Ford Foundation dan WWF-Indonesia untuk: “...mendokumentasikan dan mendukung hak atas akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam dan pola pengelolannya dan melengkapi sebuah kajian budaya, sejarah, dan ekologi sumber daya alam untuk daerah pedalaman Kalimantan Timur...”

Saat itu, 30 peneliti termasuk peneliti dan siswa-siswi lokal, dari Kalimantan, nasional dan internasional menggabungkan keahlian, pengalaman, dan bidang studi masing-masing untuk menghasilkan banyak kajian budaya dan tradisi komunitas di kawasan Kayan Mentarang, hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam (terutama dalam soal pemanfaatan lahan dan tumbuhan), serta kajian bahasa, sastra, kesenian, dan sejarah (termasuk peninggalan arkeologi dan kearifan lokal). Dengan demikian, program penelitian ini menggali filsafat ‘konservasi’ yang merupakan dasar penghidupan masyarakat Dayak yang sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam.

Selain metodologi standar ilmu sosial yakni kuesioner, *participant observation*, wawancara, dan beberapa metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA), durasi program ini menjadi peluang emas mengembangkan metode dan pendekatan baru seperti pemetaan desa partisipatif yang kemudian digunakan oleh masyarakat adat sebagai senjata utama untuk memperjuangkan haknya agar dihargai dalam pengelolaan kawasan Kayan Mentarang.



Program penelitian “Kebudayaan dan Pelestarian Alam” membuktikan bahwa hanya keterlibatan masyarakat lokal bisa menjamin keberlanjutan Taman Nasional Kayan Mentarang dan justru lembaga tradisional, jika didukung dan dikuatkan, akan membantu mengurangi risiko perambahan oleh orang luar serta sekaligus menjaga keamanan kawasan.



Ditambah dengan hasil pemetaan partisipatif, penelitian ini menjadi acuan pemerintah menetapkan TNKM sebagai taman nasional pertama di Indonesia yang dikelola secara kolaboratif berbasis masyarakat pada tahun 2002. Hal ini menjadi pengakuan kuat bahwa masyarakat, khususnya praktik dan kearifan tradisional adalah ‘teman’ bukan ‘musuh’ konservasi, dan pola konservasi terbaik adalah pola yang melibatkan masyarakat terutama yang secara historis dan adat memiliki wilayah dan kehidupan masih tergantung pada sumber daya alam.

Penelitian “Kebudayaan dan Pelestarian Alam” bisa dikatakan membawa hasil positif dan bermanfaat membantu masyarakat dan TN Kayan Mentarang menemukan pola pengelolaan dan inovasi yang tepat dan adil bagi alam dan masyarakat.

7. Ekspedisi Lintas Batas Betung Kerihun-Batang Ai/Lanjak Entimau

Oleh Albertus Tjiu, M. Hermayani Putera, dan Syahirsyah

Program pertama WWF-Indonesia di Kalimantan Barat dirintis pada tahun 1995 melalui kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan LIPI, yakni penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) 1999-2024. Program itu adalah model program lintas batas yang pertama dicanangkan di Asia Tenggara.

Pada fase pertama (1996-1999), WWF-Indonesia bersama LIPI memfokuskan pada pengumpulan data dasar keragaman jenis flora-fauna, budaya, dan sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional. Pengumpulan data itu salah satunya dilakukan melalui “Ekspedisi lintas batas Indonesia-Malaysia” pada September 1997, melibatkan peneliti kedua negara. Pelaksanaan ekspedisi selama satu bulan penuh ini difokuskan di DAS Embaloh. Tim melanjutkan ekspedisi lintas negara ini ke Sarawak pada bulan November 1997, tepatnya di Miri, Nanga Bloh.



*Peneliti Indonesia
dan Malaysia
mengumpulkan data
dasar keragaman
jenis flora-fauna,
budaya, dan sosial
ekonomi masyarakat*



Tantangan terberat adalah kondisi cuaca pada tahun 1997. Saat itu kabut asap tebal menyelimuti seluruh Kalimantan. Ekspedisi hampir batal karena tim ekspedisi kesulitan menyediakan logistik dan transportasi. Logistik yang seharusnya diturunkan di *helipad* di puncak Bukit Condong (997 m dpl) gagal didistribusikan karena pendeknya jarak pandang, sekitar 3 meter. Berkat tekad yang kuat dan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan ekspedisi, semua logistik akhirnya dipikul oleh tenaga *porter* ke puncak Bukit Condong. Hasil ekspedisi ini kemudian dirangkum dalam berbagai laporan, seperti laporan ilmiah dan populer IBBE (*International Borneo Biodiversity Expedition*) ITTO. Sementara, data dasar yang terkumpul lalu dianalisis sebagai dasar penyusunan RPTN 25 tahun TNBK.



Fase II (1999-2002) adalah fase implementasi selama 3 tahun, berdasarkan perencanaan pada fase I. Fase ini cukup berat karena WWF bersama TNBK melakukan sosialisasi keberadaan TNBK dan program yang akan dilaksanakan. Dalam waktu terbatas, Balai TNBK dibantu WWF berjuang keras menyelesaikan misi fase II ini.

Semenjak 2005, WWF tetap bekerjasama dengan TNBK melaksanakan program konservasi di kawasan taman nasional. Dampaknya sangat terasa. Isu konservasi menjadi bagian penting sejarah Kabupaten Kapuas Hulu. Penetapan Kabupaten Konservasi (2003) oleh Bupati, deklarasi kawasan jantung Borneo/HOB (2007), diakomodirnya Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TNBK-TNDS dan Pariwisata (TNDS) dalam RTRWK Kapuas Hulu 2011-2031 adalah bukti pengakuan kinerja WWF memperjuangkan misi lingkungan hidup. Sebagai lanjutan fase sebelumnya, fase III ITTO yang dimulai tahun 2012 diharapkan memberikan energi tambahan untuk implementasi program lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.

8. Menjaga Lorentz, Surga Tersisa di Planet Ini

Oleh Benja V. Mambai

Taman Nasional Lorentz, seluas 2.505.600 hektar, adalah salah satu kawasan konservasi terluas di Asia Pasifik berisikan tipe ekosistem utama di Papua. Di sana, terdapat ekosistem pantai hingga ekosistem alpin (puncak Jaya dan Carstenz) yang senantiasa diselimuti salju abadi di wilayah tropis sepanjang tahun. Inilah keunikan yang tidak ada duanya di Indonesia.

Pada tahun 1623, Jan Carstenz berlayar di tenggara New Guinea menuju Australia. Ia terpana mengagumi puncak gunung tinggi berselimut salju di pedalaman New Guinea (kini Papua) itu. Pada tahun 1909, dilakukan ekspedisi dipimpin Dr H.A Lorentz, ilmuwan Belanda yang menjelajahi pedalaman hingga ke pegunungan Mandala. Inilah asal nama ‘Lorentz’. Ekspedisi kedua oleh Organisasi Ornitologi dari Inggris mengunjungi bagian barat Lorentz pada tahun 1910—1911. Ekspedisi berikutnya, oleh *Indische Comite voor Wetenschappelijk Onderzoek der Nederlandsche Kolonie*, mengunjungi bagian selatan Papua dan puncak Mandala. Pada saat yang sama Dr Wollaston mengunjungi kawasan Otakwa bersamaan dengan Ekpedisi Inggris kedua. Pada tahun 1938, ekspedisi zoologi Belanda/Amerika yang dipimpin R. Archbold mengunjungi bukit utara puncak Wilhelmina. Lalu, pada 1939, perhimpunan geografer Belanda menjelajahi pegunungan bagian tengah, dipimpin Le Roux. Seorang anggota tim, Dr J.J Dozy, menemukan sumber tembaga dan emas yang berlimpah di kawasan yang kini dikelola PT Freeport Indonesia.

Upaya perlindungan kawasan Lorentz telah lama dilakukan. Pada tahun 1919, kawasan ini ditetapkan pemerintah Belanda sebagai “Monumen Alam”. Luasnya hanya sebagian kecil dari luas sekarang. Tahun 1956, status ini dibatalkan, akibat konflik dengan masyarakat serta sengketa kepemilikan tanah. Pada tahun 1970, pakar Ditjen Kehutanan RI, IUCN, FAO dan WWF merekomendasikan kawasan ini sebagai kawasan konservasi. Kemudian pada 1978, wilayah ini dijadikan Cagar Alam Lorentz seluas 2.150.000 ha dengan SK Mentan No 44/kpts/UM/1978.

Desember
1999

*World
Heritage Site
Committee
menetapkan
TN Lorentz
sebagai situs
warisan
dunia di
bidang
perlindungan
alam...*



Melalui penelitian sosial-antropologi dan sejumlah pertemuan antara 1990-1995, tim yang beranggotakan wakil Pemerintah Provinsi Papua dan 4 kabupaten (Merauke, Fakfak, Jayawijaya dan Paniai) dan WWF serta didukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua (sebelumnya Sub Balai BKSDA-Papua II) mengusulkan agar CA Lorentz dijadikan taman nasional. Tim WWF, dipimpin Frank Momberg dengan anggota Benja V Mambai dan Ricard Kalilago, menyiapkan dokumen perubahan status itu. Pada September 1996, dokumen itu diantarkan langsung ke Direktur Konservasi Kawasan Ditjen PHPA. Pada 7 Maret 1997, melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK. 154/Kpts-II/1997 resmilah status TN Lorentz dengan luas 2.505.600 ha. Bahkan, karena keunikan budaya, alam, panorama dan geologi TN Lorentz, *World Heritage Site*

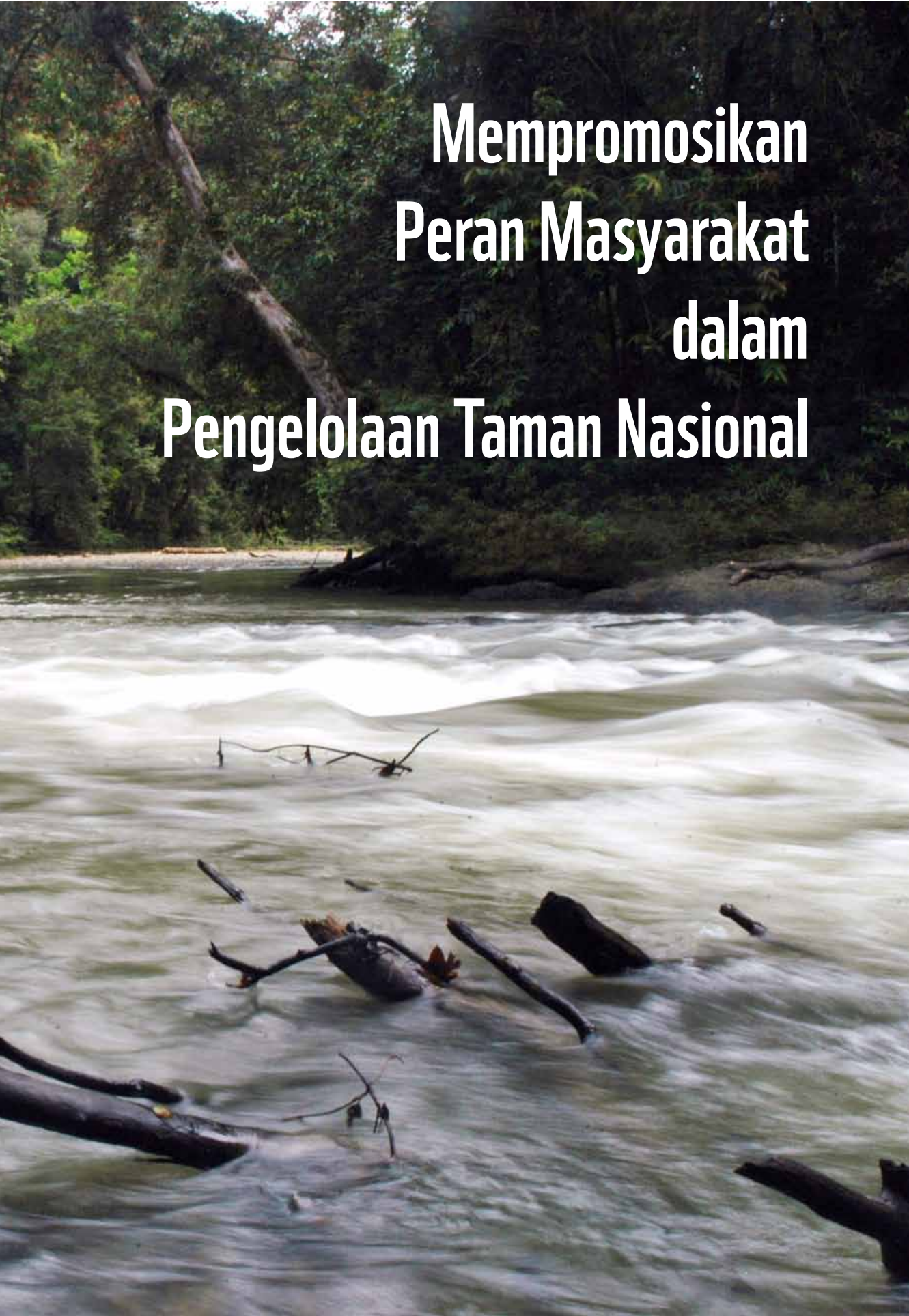


Committee pada Desember 1999 menentukannya sebagai situs warisan dunia di bidang perlindungan alam ketiga di Indonesia.

WWF serius mendukung pemerintah 10 kabupaten (sebelumnya empat) dan pemangku kepentingan lain melestarikan kawasan ini. Terbukti dengan selesainya dokumen rencana pengelolaan dan program pengembangan masyarakat di sekitar TN Lorentz seperti kopi organik, madu dan peta bunga. Meski masih awal, diharapkan tumbuh kesadaran bersama melestarikan TN Lorentz, surga tersisa di planet ini.



Mempromosikan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional



9. Pengakuan atas Hak Akses dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersama Masyarakat Adat

Oleh Cristina Eghenter

Dengan diubahnya status cagar alam menjadi taman nasional, masyarakat adat diakui keberadaannya.



Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) didiami masyarakat adat Dayak Kenyah, Lundayeh, Sa'aban, Punan, Kayan yang terbagi dalam 10 wilayah adat besar. Secara hukum adat, kawasan tersebut adalah kawasan milik masyarakat adat yang dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sejak turun temurun. Pada tahun 1980, kawasan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam. Setelah melalui proses penelitian bersama, pemetaan wilayah adat secara partisipatif, dan kegiatan lain didukung oleh WWF, kawasan ini terbukti sebagai sumber penting identitas dan kehidupan bagi masyarakat adat Dayak. Masyarakat di dalam TNKM semakin sadar akan haknya dan bagaimana proses negosiasi agar hak akses terhadap SDA tetap diakui dan dijamin.

Pada tahun 1996, status cagar alam diubah menjadi taman nasional. Artinya, masyarakat adat diakui keberadaannya. Meskipun begitu, status TN belum tentu menjamin penuh hak dan peran masyarakat adat dalam pengelolaannya. Untuk memastikan itu, para kepala adat besar dari sepuluh wilayah adat memutuskan bergabung dalam satu organisasi, Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) TNKM, agar suara masyarakat adat bersatu dan lebih kuat dalam perundingan dengan pemerintah. FoMMA, didampingi WWF-Indonesia, mendorong agar pola manajemen kolaboratif berbasis masyarakat adat disepakati sebagai pola yang inovatif dan tepat dalam kawasan konservasi TNKM. Hal itu karena pola tersebut lahir dari aspirasi dan hak masyarakat adat, dan sesuai kondisi alam dan masyarakat di TNKM.

Pengelolaan kolaboratif adalah pengelolaan secara bersama oleh pemangku hak dan kepentingan di suatu wilayah yaitu unsur pemerintah daerah, pusat dan masyarakat adat. Pola pengelolaan kolaboratif TNKM disahkan dengan tiga SK yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2002 oleh Menteri Kehutanan. Sebuah lembaga baru yaitu DP3K yang terdiri dari perwakilan semua pemangku hak dan kepentingan di kawasan TNKM menjadi penjamin dan pengendali agar semangat dan praktik kolaborasi benar-benar diterapkan dan dijalankan dalam pengelolaan TNKM.

Secara lebih lanjut, hak dan kepentingan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan dan sumber daya alam telah diakui dalam sistem zonasi dan dokumen petunjuk “Kriteria dan Indikator Zonasi TNKM” (2010). Dalam dokumen tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pengelolaan TNKM mengadopsi prinsip pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan mengakomodir ‘areal adat’ di mana hukum dan praktik adat setempat yang berwawasan konservasi tetap diperlakukan.

Pola manajemen kolaboratif yang pertama kalinya di Indonesia disahkan di TNKM akhirnya dikuatkan lagi sebagai kebijakan kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional di tingkat nasional. Inilah tonggak pengakuan atas hak akses dan pengelolaan bersama kawasan konservasi bagi masyarakat adat.



10. Membangun Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Sebangau

Oleh Rosenda C. Kasih

Upaya membangun kolaborasi pengelolaan Taman Nasional Sebangau dimulai ketika WWF-Indonesia memfasilitasi pembentukan Forum Masyarakat (FORMAS) di enam kecamatan di sekitar kawasan taman nasional pada tahun 2006. FORMAS dibentuk dengan tujuan sebagai simpul komunikasi dan koordinasi antara pengelola TN Sebangau dengan masyarakat di sekitarnya.



*“FORMAS
dibentuk
dengan tujuan
sebagai simpul
komunikasi dan
koordinasi...”*

Saat itu, setiap desa dan kelurahan mengirim wakilnya untuk menjadi anggota FORMAS. Lalu, di antara mereka, dipilih formasi pengurus di tingkat kecamatan. FORMAS disepakati untuk diperbarui setiap lima tahun. Pada tahun 2011 sudah tiga FORMAS yang difasilitasi untuk melaksanakan pergantian anggota dan pengurus, sekaligus menyusun Anggaran Dasar dan Program Kerja. FORMAS juga membuka kesempatan kepada perempuan dan kaum muda untuk menyumbangkan ide dan usulannya untuk berbagai aktivitas terkait pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan di sekitar TN Sebangau.

Belum semua FORMAS menjalankan perannya secara efektif. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pertemuan tahunan dan studi banding (diantaranya belajar pengorganisasian pada FoMMA di TN Kayan Mentarang). FORMAS yang aktif mulai menjalankan fungsi koordinasi kegiatan pengelolaan, antara lain memfasilitasi kegiatan-kegiatan konservasi seperti *regreening*, pengembangan ekowisata, radio komunitas, dan pembentukan Regu Pengendali Kebakaran, pelaksanaan penutupan kanal (*canal blocking*), pengembangan keramba ikan dan ikut dalam kegiatan patroli bersama aparat TN Sebangau.

Regu Pengendali Kebakaran (RPK) difasilitasi pembentukannya dalam rangka kerjasama dalam *Central Kalimantan Peatland Project (CKPP)* di tahun 2008. Bekerjasama dengan CARE, BOSF, dan Universitas Palangka Raya, WWF memfasilitasi pembentukan RPK di 16 desa. Masing-masing RPK terdiri dari 10-15 orang anggota. Mereka diberi pelatihan tentang cara pengendalian kebakaran, dan dilengkapi dengan sarana seperti pompa air, selang, dan sepatu karet. Pada tahun 2011 pembinaan RPK dijadikan program kerja Balai TN Sebangau, dan namanya diganti menjadi Masyarakat Peduli Api (MPA)—menyesuaikan nomenklatur resmi pada Kementerian Kehutanan.

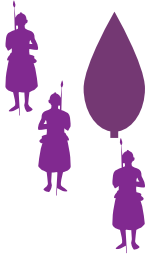
Kerjasama Balai TN Sebangau, pemerintah beberapa kabupaten, dan WWF-Indonesia juga dilakukan dalam pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan bagi desa-desa di sekitar kawasan, meliputi pertanian organik, budidaya ikan, dan usaha menjahit bagi kelompok perempuan pada tahun 2011.



11. Forum Kolaborasi Pengelolaan TN Wasur, Semangat Kebersamaan di Ujung Timur

Oleh Paschalina Rahawarin

*“Masyarakat
Sejahtera,
Cerdas, Lestari
Alam, Adat
Istiadat Bagi
Anak Cucu”*



Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur (FKPTNW) dibentuk pada 2 Juli 2005. Forum ini adalah wadah koordinasi, komunikasi dan negosiasi termasuk mengkritisi kebijakan pengelolaan Taman Nasional (TN) Wasur maupun kegiatan lain oleh pemerintah daerah.

FKPTNW adalah bagian tak terpisahkan dari strategi rencana aksi visi Transfly Indonesia – PNG karena dari delapan suku yang ada di Kabupaten Merauke, empat suku ada di dalam TN Wasur, yaitu sebagian subsuku Yeinan, keseluruhan subsuku Kanume, subsuku Marori Mengey dan subsuku Malind Kondo. Difasilitasi WWF-Indonesia Program Papua dan BTN Wasur, forum ini melibatkan wakil pemerintah, swasta, LSM, lembaga keagamaan, perempuan dan wakil empat suku yang bertanah adat di TN Wasur, yaitu Suku Kanume, Yeinan, Marori Mengey dan Marind.

Dalam kesehariannya, FKPTNW secara independen menyelaraskan program dan rencana kerja berbagai lembaga serta memfasilitasi kepentingan pengelolaan SDA dan pembangunan daerah. Kehadirannya adalah jawaban terhadap kebutuhan sinkronisasi pengelolaan TN Wasur dan sekitarnya yang selama ini sering terjadi tumpang tindih kepentingan baik dalam konteks ruang adat, kawasan ruang budidaya maupun upaya pelestarian di ruang perlindungan. Masukan dan rekomendasi disampaikan FKPTNW, juga pengawasan kegiatan yang berdampak kepada Taman Nasional Wasur. Dengan demikian, setiap kegiatan (baik perencanaan maupun pelaksanaan) di dalam Taman Nasional Wasur selalu dikoordinasikan kepada FKPTNW.

Sebagai pengakuan pentingnya FKPTNW dalam pengelolaan TN Wasur, pengurus forum yang kedua telah dikukuhkan secara adat bersamaan dengan pengukuhan Dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Wasur dan Dokumen Zonasi Taman Nasional Wasur. Pengukuhan itu dihadiri 56 orang staf BTNW, dua orang staf WWF dan Presidium Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur pada Selasa, 2 Februari 2011.



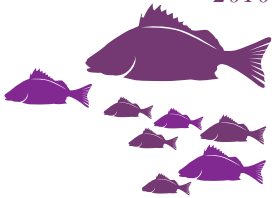
Kajian FKPTNW pada tanggal 19-20 Januari 2011 menetapkan visi FKPTNW yakni “Masyarakat Sejahtera, Cerdas, Lestari Alam, Adat Istiadat Bagi Anak Cucu”. Ditetapkan pula misi forum itu, yakni: meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alamnya; meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kehidupan yang layak dan bermartabat; meningkatkan peran institusi adat dalam penegakan hukum adat; meningkatkan kerjasama antar para pihak dan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan budaya dan kawasan Taman Nasional Wasur; serta meningkatkan kawasan Taman Nasional Wasur sebagai obyek daya tarik wisata alam dan wisata budaya.

Semangat kebersamaan memang terasa di TN Wasur yang terletak di ujung timur negeri ini. Meskipun begitu, ada sejumlah agenda mendesak di depan mata, yakni: pengesahan perda yang mengatur protokol pengelolaan SDA sesuai nilai kearifan adat dalam kawasan TN Wasur, mendorong pengesahan FKPTNW oleh Bupati Merauke, menginisiasi penyusunan *Grand Design* program pemberdayaan masyarakat, mendorong penerapan pembayaran jasa lingkungan (PES) jasa Air Rawa Biru untuk perbaikan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong peningkatan bantuan pendidikan formal bagi masyarakat dalam kawasan TN Wasur.

12. Terobosan Masyarakat Wakatobi yang Mendunia

Oleh Veda Santiadji

*KOMUNTO
menjadi salah
satu pemenang
Equator Prize
2010*



Pernah mendengar bank ikan Wakatobi? Semuanya berawal dari upaya penguatan kelompok masyarakat pemanfaat sumberdaya pesisir dan laut di Taman Nasional Wakatobi (TNW).

Sejak tahun 2005, TNC dan WWF melaksanakan berbagai program pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat di gugusan pulau yang terletak di tenggara Sulawesi tersebut. Dari pelatihan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), pengorganisasian masyarakat, perancangan Kawasan Konservasi Laut (*Marine Protected Areas/MPA*) hingga pengelolaan keuangan keluarga dan kelompok masyarakat. Maka, di masing-masing wilayah akhirnya terbentuk sejumlah kelompok nelayan yang rutin berkumpul untuk belajar pelestarian sumber daya alam.





Sebagai tindak lanjut, terbentuklah Komunitas Nelayan Wangi-Wangi (KOMANANGI), Forum Kahedupa Toudani (FORKANI), Komunitas Nelayan Tomia (KOMUNTO) dan Forum Nelayan Binongko (FONEB) yang merupakan organisasi payung di empat pulau besar di kepulauan Wakatobi tersebut (Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko). Mereka terlibat aktif merancang zonasi Taman Nasional Wakatobi.

Serangkaian pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat dilakukan untuk menggali aspirasi dan gagasan mengenai target konservasi untuk perlindungan Wakatobi dan desain zonasi yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. Masukan forum tersebut diakomodasi lewat konsultasi publik yang melalui proses panjang sejak 2005. Akhirnya desain zonasi tersebut ditetapkan pada 23 Juli 2007 oleh Dirjen PHKA dan Bupati Wakatobi.

Beberapa forum selanjutnya mampu mengembangkan kapasitasnya lebih jauh seperti halnya KOMUNTO. Terobosan Komunto sendiri justru dilahirkan sejak mereka memelopori penetapan bank ikan pada tahun 2005. Bank ikan adalah konsep yang mereka tetapkan pada suatu daerah laut dengan melarang aktivitas penangkapan ikan dengan metode apa pun. Hasilnya adalah keseimbangan ekosistem yang berimplikasi positif pada ketersediaan hasil tangkapan ikan. Harapannya bank ikan terus bertambah sehingga pekerjaan nelayan terus dapat dipertahankan. Kegigihan dan kerja keras akhirnya membawa KOMUNTO menjadi salah satu pemenang *Equator Prize* 2010, sebuah ajang penghargaan oleh UNDP. Penghargaan bergengsi ini disampaikan kepada mereka di New York sebagai penghargaan atas upaya nyata membawa komunitasnya menuju cita-cita pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*). Inilah sebuah terobosan masyarakat yang diakui dunia!



WWF



Save Our Home! Save Sumatra!

**Mengubah Perilaku:
Dari Seteru Menjadi Sekutu**



13. Kisah Kerjasama Menghentikan Pembalakan Liar di Riau

Oleh Afdhal Mahyuddin dan Israr Ardiansyah



Koalisi Eyes on the Forest (EoF) menjadi saksi perjuangan...



Ketika memperjuangkan penyelamatan kawasan Tesso Nilo, salah satu hutan terkaya di dunia, tim WWF-Indonesia menemukan bahwa salah satu ancaman bagi kelestarian hutan di sana adalah pembalakan liar. Berdirinya dua pabrik bubur kertas raksasa provinsi Riau tentu ‘menggoda’ sebagian warga untuk “bekerja kayu”, menebang hutan untuk dijual kepada para penampung kayu ilegal. Hutan ditebang karena ada pembelinya. Sementara, tekanan ekonomi bisa membuat warga menjadi penebang kayu ilegal.

Tahun 2004-2006 menjadi saksi perjuangan itu. Dibentuklah koalisi *Eyes on the Forest (EoF)* bersama LSM setempat yang tergabung dalam dua jaringan besar: Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) dan WALHI Riau. Saat itu, EoF meminta kepada manajemen dua pabrik raksasa bubur kertas milik grup APP dan APRIL agar tidak menerima kayu dari aksi pembalakan liar di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Keduanya setuju.

Sementara itu, *Forest Crime Unit* WWF tetap memantau deforestasi di TNTN, yang di beberapa tempat tetap terjadi dengan pola baru yang terorganisir. Upaya meredam perambahan ini terus berlangsung, meski TNI dan Kemenhut sudah menjalin kerjasama dalam menjaga TNTN. Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan adalah salah satu cara efektif memerangi perambahan di TNTN.

Pada tahun 2007-2008, terjadi pencapaian penting. Saat itu, penebangan hutan alam, pembalakan liar dan perambahan berhenti hampir satu tahun. Bahkan pembakaran hutan dan lahan jauh berkurang. Saat itu, konsesi hutan tanaman industri (HTI) diberi garis

polisi (*police line*) dan tumpukan kayu alam tak ada yang mengangkut. Koalisi EoF menyebut kondisi ini sebagai “Moratorium de facto”. Peran Kapolda Riau Brigjen Sutjiptadi saat itu cukup penting. Dalam operasi anti pembalakan liar, 21 perusahaan diindikasikan terlibat. Lalu angka itu mengerucut menjadi 14. Jikalahari dan Walhi Riau dengan semangat mendukung temuan Koalisi EoF ini. Bahkan Presiden SBY membuat tim antar-departemen untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, pada Desember 2008



Polda Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau menghentikan kasus 14 perusahaan itu lewat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada 13 perusahaan. Satu lainnya diteruskan kasusnya ke pengadilan, namun 6 bulan berikutnya juga dihentikan kasusnya. WWF menyadari bahwa menggali potensi masyarakat lokal sangat penting untuk memerangi pembalakan liar. Pada kasus perambahan yang sebenarnya muara dari pembalakan liar, bekerjasama dengan berbagai tingkat pemerintahan dan berbagai pihak adalah keniscayaan. WWF mengajak masyarakat ikut dalam upaya pemantauan illegal logging dan menjaga kelestarian hutan. Sementara, pembentukan tim riset harimau maupun patroli gajah adalah upaya terpadu membangun kepedulian bersama. Lebih jauh lagi, upaya mengembangkan ekonomi masyarakat, seperti pendampingan Asosiasi Petani Madu Hutan Tesso Nilo, adalah langkah penting penguatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sejahtera tentu tidak akan terpaksa ikut pembalakan liar. Konflik horizontal antara masyarakat juga berusaha dicegah dan dihindari. Inilah perjuangan menegakkan konservasi dan pembangunan yang lestari.

Persoalan penebangan liar dan deforestasi cukup luas dimensinya dan membutuhkan waktu lama untuk mengatasinya. Tetapi, kebersamaan antar para pihak semoga menjadi awal yang baik.



Pemetaan Partisipatif



14. Penguatan Sistem Pengelolaan di TN Kayan Mentarang dengan Pemetaan Desa Partisipatif

Oleh Cristina Eghenter

Peta adalah sebuah alat advokasi sangat ampuh. Ia adalah alat yang sanggup memaparkan relasi kekuasaan dan hubungan sosial terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Peta adalah bukti bagaimana sumber daya alam dikelola dan apa yang menjadi ancaman utama terhadap pola tradisional pengelolaan SDA. Lebih jauh lagi, peta mampu menyampaikan informasi kepada pihak luar dengan lebih mudah sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perundingan antara masyarakat bersama pemerintah dan pihak swasta, dan di antara masyarakat sendiri.

Pemetaan desa partisipatif (PDP) memegang peranan sangat besar di TN Kayan Mentarang (TNKM). Ia membantu lancarnya proses penyusunan rencana pengelolaan TNKM yang kolaboratif. Bahkan sebelumnya, PDP adalah rujukan penting pada perubahan status kawasan konservasi dari cagar alam menjadi Taman Nasional. Hingga kini, PDP adalah program kegiatan yang favorit, yang paling mengesankan bagi masyarakat, sejak WWF mulai beraktifitas di KM pada tahun 1991 (berdasarkan hasil survey 2005).

Program PDP dimulai dengan uji coba, pengembangan metodologi serta pendekatannya pada tahun 1992 dan secara lebih sistematis pada tahun 1994-1996. Proses PDP yang terpenting mencakup: pemetaan pola pemanfaatan lahan dan transek; pemetaan sumber daya alam dan peraturan adat tentang pemanfaatannya, mempelajari alur sejarah setempat; pemetaan sosial di desa; serta pemetaan batas desa dan wilayah adat.



Peta adalah alat yang sanggup memaparkan relasi kekuasaan dan hubungan sosial terkait pemanfaatan sumber daya alam



Seperti kita ketahui, TNKM terletak di tengah kawasan yang dikuasai secara adat oleh sepuluh wilayah adat besar masyarakat Dayak Kenyah, Kayan, Lundayeh, Sa'ban, Punan, Tahol, dan lain-lain. Oleh karena dimensi sosial itu, maka wilayah adat dan desa di dalamnya menjadi unit sosial utama dalam proses pemetaan. Boleh dikatakan, pemetaan di dalam dan di sekitar TNKM adalah sebenarnya pemetaan 'wilayah adat' partisipatif. Pada tahun 1996 sampai dengan 1998, sepuluh wilayah adat itu dipetakan oleh masyarakat adat sendiri. WWF saat itu berperan menjadi fasilitator, pelatih dan pendamping, namun masyarakatlah yang menjadi pelaku dan penerima manfaat utama dari kegiatan pemetaan tersebut.

Hasil pemetaan menjadi dasar untuk membantu masyarakat dalam membangun dan menjamin proses lebih partisipatif dan sesuai prinsip FPIC (*free and prior informed consent*) atau 'persetujuan dini tanpa paksaan' dengan pihak taman nasional. Itu juga menjadi dasar memperjuangkan hak adat dalam pengelolaan TNKM, khususnya: kesepakatan tentang letaknya batas luar kawasan konservasi; usulan agar dikeluarkannya desa dan lahan pertanian dari taman nasional; usulan zonasi termasuk konsep '*domain*' adat dalam TNKM dan pengakuan terhadap hukum dan peraturan adat.

Namun hasil PDP bukanlah bersifat sesaat atau 'satu kali pakai.' Peta itu bisa dipakai masyarakat adat untuk memantau perubahan yang terjadi di lapangan, membantu perencanaan dan pengelolaan SDA dan potensi lainnya di wilayah adat berdasarkan daya dukung fisik, sosial, ekonomi dan budaya agar prioritas pembangunan sesuai. Selain itu, hasil PDP dapat dipakai mempersiapkan rencana pembangunan ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan, pengalaman dan aspirasi masyarakat.



15. Menata Ruang Kabupaten Merauke dengan Partisipasi Masyarakat

Oleh Paschalina Rahawarin

“...kegiatan Pemetaan Partisipatif serupa telah dilakukan pula pada wilayah adat”

Masyarakat adat di Papua, termasuk masyarakat Malind Anim di kabupaten Merauke, khususnya yang tinggal di kampung-kampung, masih menggantungkan hidupnya dari hutan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kebun, supermarket dan apotik mereka masih berada di dalam hutan, rawa dan sungai di sekitar mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka mengambil sagu, kumbili dan umbi-umbian, ikan maupun berburu satwa liar dari hutan di sekitar mereka. Membuat perahu maupun maupun sebagian obat-obatan masih diambil dari alam sekitar mereka.





Keterikatan mereka dengan alam sekitarnya juga merupakan bagian budaya mereka. Masyarakat Malind Anim memberikan penghormatan terhadap para leluhur yang disebut “dema” dengan melindungi tempat-tempat persinggahan *dema* sebagai tempat yang dikeramatkan.

Dengan pesatnya pembangunan, dikhawatirkan tempat-tempat penting bagi masyarakat adat Malind Anim ini akan rusak atau hilang, sehingga beberapa pihak merasa perlu dilakukan segera Pemetaan Partisipatif terhadap tempat-tempat penting tersebut. Tempat yang dimaksud adalah yang penting secara budaya atau memiliki nilai sejarah mitologi dan juga penting sebagai sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat adat.

Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Lembaga Masyarakat Adat Malind dan perwakilan masyarakat adat Malind dari empat wilayah penjurur mata angin yaitu : Sosom, Esam, Imo dan Mayo, WWF lalu memfasilitasi proses pemetaan tempat-tempat penting tersebut. Hasil pemetaan ini kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Merauke sebagai kawasan Cagar Budaya (untuk tempat-tempat keramat) dan kawasan budidaya tradisional (khusus untuk masyarakat adat).

Dengan dimasukkannya tempat-tempat penting masyarakat adat Malind Anim ini di dalam Dokumen RTRW Kabupaten Merauke, maka diharapkan tempat-tempat penting ini memiliki kekuatan hukum yang jelas. Diharapkan pula, masyarakat adat dapat terus hidup selaras dengan alam dan akan terus dilibatkan dalam pengembangan dan penataan ruang kabupaten.

Keberhasilan ini ternyata juga mulai diterapkan di tempat lain. Saat ini, kegiatan Pemetaan Partisipatif serupa telah dilakukan pula pada wilayah adat 12 FAR (Forum Adat Rumpun) di Kabupaten Asmat dan 6 suku di Kabupaten Mappi di selatan Papua.



Bencana Alam, Mitigasi dan Konservasi



16. Bangkit Setelah Tsunami

Oleh Tri Agung Rooswiadji

Tidak lama setelah gempa besar pada 26 Desember 2004 dengan skala 8,9 richter disusul tsunami yang menghantam Aceh-Nias, pesisir Srilanka, Thailand serta daerah sekitarnya, WWF-Indonesia dan *American Red Cross (ARC)* bergerak untuk bermitra membantu para korban.



Ratusan ribu jiwa (bahkan ada yang memperkirakan lebih dari 200.000 jiwa melayang) di ketiga negara ini yang terkena dampak bencana tersebut. Melihat itu, maka kemitraan itu lalu diwujudkan dengan tujuan agar para korban dapat mengurangi resiko dampak bencana melalui rehabilitasi mata pencaharian, tempat tinggal, kebutuhan air bersih dan restorasi lingkungan. Berjalan antara 2005-2010, kemitraan ini melibatkan lembaga pengabdian lain seperti *Child Fund, Plan International, Triangle*, dan *Mercy Corps*. Bahkan, lembaga yang bernaung di bawah PBB,

tak kurang

70%

kawasan kerja WWF-Indonesia bertumpang tindih dengan peta potensi bencana di Indonesia.

Food and Agriculture Organisation (FAO) juga ikut memberikan dukungan. Di Aceh, dipilih kota Banda Aceh dan Calang-Kabupaten Aceh Jaya sebagai lokasi kemitraan ini. Peranan WWF dalam kemitraan ini adalah mengembangkan kegiatan restorasi daerah aliran sungai di Krueng Sabee-Aceh Jaya sebagai sumber air bersih bagi instalasi baru air minum yang dibangun oleh ARC. Selain itu, WWF juga memberikan dukungan teknis dalam perlidungan lingkungan kepada para lembaga pengabdian lain yang terlibat.

Pengalaman kemitraan ini telah dituangkan sebagai konsep dalam 10 modul *Green Recovery and Reconstruction Toolkit (GRRT)* seperti modul desain dan pemantauan proyek, pengurangan risiko bencana, pembangunan ramah lingkungan, air bersih, dan pengembangan mata pencaharian. Pengembangan GRRT ini melibatkan banyak lembaga di luar kemitraan yang ada. Bahkan, modul tersebut juga telah diterapkan ulang dalam mengatasi dampak pasca gempa besar di Haiti pada tahun 2010. Pengalaman kemitraan ini telah memberikan pembelajaran berharga bagi WWF-Indonesia dalam konservasi dan penanggulangan bencana. Pengalaman dan pelajaran ini penting mengingat tidak kurang 70% kawasan kerja WWF-Indonesia *overlap* (memiliki tumpang tindih) dengan peta potensi bencana di Indonesia.

Selain kerusakan akibat gempa, tsunami yang ditimbulkan juga telah merusak kawasan pesisir Aceh dan pulau Nias. Oleh karena itu, WWF-Indonesia telah bekerjasama dengan *Wetlands International Indonesia (WII)*, *Both Ends* dan *IUCN* untuk merestorasi kawasan pesisir tersebut melalui proyek *Green Coast (GC)*. Fokus kegiatan GC adalah perbaikan ekosistem pesisir, pemberdayaan ekonomi masyarakat, fasilitasi desa/mukim dalam menyusun regulasi desa yg berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penggiatan program pendidikan lingkungan. Program GC didukung oleh OXFAM Novib (Belanda).



Proyek ini dilakukan melalui dua tahap, yakni GC 1 (Juli 2005-Maret 2007) dan dilanjutkan dengan GC 2 (April 2007-Maret 2009). Di proyek ini, diterapkan pendekatan *bio-rights*, di mana masyarakat pesisir ikut terlibat aktif dalam rehabilitasi ekosistem pesisir dan mereka mendapat dana pinjaman kelompok untuk memperbaiki mata pencaharian mereka yang berbasis rehabilitasi ekosistem pesisir. Dari GC1 dan GC 2, tidak kurang 1000 hektar kawasan pesisir telah berhasil direhabilitasi dan 2 juta bakau dan tanaman pantai ditanam di kawasan tersebut. Kegiatan ini melibatkan 31 LSM setempat dan 29 Kelompok Swadaya Masyarakat. Secara keseluruhan proyek ini telah melakukan rehabilitasi kawasan pesisir di 70 lokasi di Aceh dan Pulau Nias. Program multipihak ini menjadi catatan bahwa meskipun ada bencana, semangat kemitraan mempercepat bangkitnya semangat berbenah kembali.

17. Restorasi Koridor: Bersama Masyarakat Menjawab Perubahan Iklim

Oleh Lorens, Hendri Ziasmono dan Agus Efensius

menanam
57.930
batang pohon
pada lahan seluas
300,985
Hektar

Dunia sepakat bahwa kerusakan hutan adalah faktor yang mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global. Maka, tidak ada jalan lain selain mencegah kerusakan hutan dan memperbaikinya. Di kawasan jantung Borneo, restorasi hutan pun dilakukan. Satu yang bisa menjadi contoh adalah restorasi koridor antara TN Betung Kerihun dan TN Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.



Restorasi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 bersama 42 kepala keluarga di tiga dusun yakni Sungai Sedik, Tekalong dan Sepan. Mereka menyelamatkan kawasan perlindungan dengan menanam kembali pohon hutan seperti. Jenis yang ditanam beragam, antara lain Petai (*Parkia speciosa*), Langsung (*Lansium domesticum*), Tengkawang (*Shorea stenoptera*), Durian (*Durio zibethinus*), Gaharu (*Aquilaria malaccensis*), Belian (*Eusideroxylon zwageri*), Meranti (*Shorea parvifolia*), Sibau (*Nephelium maingayii*), Lengkek (*Dimocarpus longan*), Ujung (*Baccaurea bracteata*), Rambai (*Baccaurea motleyana*), Tekam (*Shorea sp*), Tembesu (*Fragrea fragrans*) dan tanaman sumber pencaharian Karet (*Hevea brasiliensis*).

Pada restorasi itu, masyarakat menanam 57.930 batang pohon pada lahan seluas 300,985 hektar dengan metode *agroforestry* (wanatani) berbasis karet. Penanaman pengayaan dilakukan pula di kebun masyarakat dan lahan adat di hutan lindung Bukit Lanjak. Kebetulan, area restorasi ini adalah daerah jelajah mayas (*Pongo pygmaeus pygmaeus*), yang berinteraksi juga dengan masyarakat yang secara turun-temurun memanfaatkan bahan alam sebagai sumber penghidupan.

Penanaman bersama masyarakat menegaskan pilihan bahwa pengelolaan hutan harus didukung oleh kearifan lokal. Dimulai sejak tahun 2009 lewat analisis spasial dan studi sosial ekonomi masyarakat, kegiatan ini dilanjutkan dengan perencanaan bersama masyarakat pada tahun 2010. Masyarakat dilibatkan sejak perumusan tujuan program, identifikasi potensi, dan membangun mimpi dengan potensi pengetahuan dan sumberdaya lokal. Karena itu, yang ditanam adalah pohon endemik dan telah dikenal oleh masyarakat, dengan benih/ bibit dari kawasan sekitarnya. Sementara, kegiatan teknis mencakup pembangunan pusat pembibitan sebagai sarana produksi bibit sekaligus media belajar, pengukuran lahan, penanaman, perawatan tanaman dan melakukan monitoring perkembangan tanaman. WWF di sini mendorong penguatan masyarakat melalui sekolah lapang yang terbuka, setara dan adanya mekanisme berbagi pengetahuan untuk memecahkan masalah bersama.



Penguatan kelembagaan masyarakat penting demi keberlanjutan program restorasi. Peran lembaga adat dan pemerintah desa serta organisasi yang rapi adalah kunci. Pendampingan oleh WWF mencakup diskusi tematis, pelatihan organisasi serta membangun akses masyarakat dengan pihak luar terutama Pemda Kapuas Hulu. Di aspek ekonomi, diberikan kesempatan terutama kepada perempuan untuk membangun kelompok agribisnis dan pelatihan kewirausahaan. Hari ini, kelompok perempuan di dusun Sungai Sedik dan Tekalong telah mengembangkan bisnis sayuran. Hasil bisnis pembibitan restorasi dijadikan modal pengembangan bisnis yang potensial dan produktif. Restorasi berbasis masyarakat sebagai jawaban perubahan iklim ini menjadi bukti bahwa menanam hari ini adalah komitmen membuat bumi makin hijau dan kehidupan lebih baik.



**Membangun Kehidupan
yang Lebih Baik**



18. Lidah Buaya di Lahan Gambut Sebangau

Oleh Didiek Surjanto dan Rosenda C. Kasih



“Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat seiring upaya pelestarian TN Sebangau”

Dengan ditetapkannya kawasan Sebangau menjadi taman nasional pada tahun 2004, maka tentu saja diperlukan upaya serius berbagai pihak untuk memikirkan sumber penghidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat dengan upaya pelestarian TN Sebangau.

WWF, sebagai salah satu pihak yang mendukung ditetapkannya kawasan Sebangau sebagai taman nasional, tentu saja memikirkan berbagai upaya pengembangan mata pencaharian berkelanjutan di sekitar kawasan TN Sebangau. Upaya itu diarahkan untuk mengembangkan perekonomian setempat, berbasis sumber-sumber daya yang bisa dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan bisa mengurangi kasus-kasus perambahan kawasan.

Berbagai bentuk aktivitas dilakukan. Di bidang budidaya pertanian, WWF juga melakukan studi potensi dan jenis tanaman yang bisa dikembangkan di kawasan TN Sebangau berdasarkan karakteristik lahan, pengetahuan yang ada di petani, dan peluang pemasaran produk.

Salah satu bentuk keterlibatan WWF yang pertama adalah budidaya tanaman lidah buaya (*Aloe vera*) di kecamatan Paduran di kawasan Sebangau pada tahun 2005. Ternyata, lidah buaya cocok ditanam di lahan gambut tipis seperti di Paduran. Beberapa ahli pertanian menyatakan bahwa *Aloe vera* menyerap banyak air. Namun, karena sistem perakarannya dangkal, rupanya dampak akar lidah buaya terhadap pengeringan lahan gambut tidak signifikan. Upaya budidaya tanaman ini berkembang dengan sangat dinamis. Segala aspek terkait dipelajari bersama, dimulai dengan pelatihan penanganan bibit, pendampingan kelompok tani, pelatihan pembuatan pupuk organik, pengolahan pasca panen sampai dengan pemasarannya. Tentu saja, masyarakat juga belajar membuat produk yang diolah dari lidah buaya, antara lain teh, cendol, dan dodol.

Ketika tanaman lidah buaya semakin banyak, maka pengembangan produk olahannya lebih dikembangkan lagi. Pada tahun 2007 WWF-Indonesia menghibahkan peralatan pengolahan, sehingga produk cendol lidah buaya bisa dikemas dan dijual dengan label '*nata de aloe*'. Untuk menembus pasar yang lebih luas, produk-produk teh, *nata de aloe* dan dodol lidah buaya diuji dan didaftarkan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai produk makanan layak konsumsi.

Ketika banjir melanda daerah Paduran selama enam bulan di tahun 2010, semua tanaman lidah buaya rusak. Beberapa kelompok pengolah lidah buaya bahkan menjual peralatannya. Tahun 2011 Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau memberikan bantuan bibit *Aloe vera*. Mereka yang bersemangat juang mulai menanam lagi, dan mulai membuat produk yang paling sederhana: teh *Aloe vera*. Pada acara yang digelar WWF dan P.T. Ultra Jaya pada tahun 2011, PT Ultra Jaya memberikan dana hibah untuk pengembangan teh lidah buaya. Modal itu untuk membangun ruang kerja dan perangkat pengering dengan menggunakan sinar matahari (*solar dryer*).



19. Mengembangkan Ekowisata di Jantung Borneo

Oleh Hermas Rintik Maring dan Cristina Eghenter



“...ekowisata adalah alternatif ekonomi ramah lingkungan dan ramah adat...”

Bagi kabupaten di Jantung Borneo (*Heart of Borneo/HoB*) seperti Kapuas Hulu, Malinau dan Nunukan, isu konservasi dan ekonomi sering mengemuka. Sebagian besar wilayah mereka adalah kawasan lindung. Konservasi terkadang dianggap memperlambat pembangunan. Di Kapuas Hulu, misalnya, tak jarang ada keluhan tentang penurunan pendapatan setelah pembalakan liar ditertibkan.

Berbekal pengamatan fenomena itu, WWF mendukung pengembangan ekowisata di Jantung Borneo. Dengan masyarakat sebagai pelaku utama, ekowisata adalah alternatif ekonomi ramah lingkungan dan ramah adat. Modal ekowisata adalah keindahan dan keaslian bentang alam, keanekaragaman hayati maupun keragaman budaya serta kehidupan masyarakat. Jika perencanaannya berdasarkan keterlibatan, kreativitas dan kemampuan masyarakat setempat, ekowisata bisa jadi sumber ekonomi menjanjikan. Selain itu, arus wisatawan bisa dikelola agar tidak merusak alam dan kehidupan sosial-budaya.

WWF telah lama mendukung program percontohan ekowisata di Kapuas Hulu, Malinau, dan Nunukan. Awalnya, masyarakat dilibatkan diskusi dan dikirim studi banding ke Sabah/Sarawak. Ini adalah awal pengembangan destinasi ekowisata ketiga kabupaten di wilayah Jantung Borneo ini.



Ada empat lokasi utama pengembangan ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), yakni Tanjung Lokang, Na Bungan, Na Potan dan Baligundi. Tanjung Lokang dan Na Bungan telah dikenal untuk pariwisata perjalanan melintasi belantara dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur (*Cross Borneo*) sejak 1980-an. Sementara, Na Potan dan Baligundi adalah daerah potensial di wilayah penyangga TNBK. WWF mendampingi perumusan struktur kepengurusan ekowisata, perumusan aturan main dan beberapa pelatihan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kapuas Hulu, WWF serta Balai TNBK juga membantu berdirinya Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (KOMPAKH) yang saat ini telah menjadi penggerak teknis ekowisata di Kapuas Hulu. Selain menyiapkan pelatihan serta sarana pendukung ekowisata, pemerintah juga memberi bantuan operasional berkala kepada kelompok masyarakat pengelola ekowisata. Sejumlah warga diikuti pelatihan pemandu ekowisata muda (*Eco-Guide*) yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Lisensi *guide* muda telah diberikan kepada enam peserta yang dinyatakan lulus.

Untuk kabupaten Malinau dan Nunukan, destinasi yang telah dikembangkan adalah Hulu Pujungan, Hulu Bahau dan Dataran Tinggi Krayan. Masyarakat, didukung Dinas Pariwisata, mengelola *homestay* untuk akomodasi, belajar ilmu pemandu wisata dan bahasa asing, serta mengembangkan obyek dan jalur ekowisata. Dari sebelumnya tak ada wisatawan asing (2001), saat ini telah banyak yang datang ke wilayah terpencil di sekitar kawasan TN Kayan Mentarang, terutama setelah diluncurkan *website* sebagai media promosi. Khusus untuk Nunukan dan sejumlah titik di Kapuas Hulu, ada nilai tambah yang potensial yaitu ekowisata lintas batas Malaysia-Indonesia. Saat ini, sudah dua operator wisata yang bersedia menjadi mitra masyarakat memasarkan ekowisata di HoB.

Kerjasama para pemangku kepentingan serta semangat kreatif dan upaya rintisan masyarakat untuk ekowisata di sepanjang perbatasan kawasan HoB adalah bukti nyata ‘ekonomi hijau’ yang bermanfaat bagi alam dan komunitas adat.

20. Produk *Green & Fair*: Pilihan Bijak untuk Masyarakat dan Alam

Oleh Cristina Eghenter dan Rizkiasari Joedawinata

Sejak sekitar tahun 2004, WWF-Indonesia mengembangkan inisiatif “*Green and Fair Products*” (G&F). Bekerjasama dengan kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak di beberapa desa di seluruh tanah air, G&F membantu mempromosikan dan memasarkan produk asli dari kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat. Produk tersebut diambil atau dibudidayakan secara berkelanjutan, organik dan terbuat dari bahan alami setempat.

Keterkaitan antara lingkungan, ekonomi, dan tradisi budaya menjadi misi inisiatif “Green & Fair Products”

Inisiatif ini merupakan upaya menuju sinergi dimensi ekologi, ekonomi dan sosial, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dari aspek kepemilikan, produk tersebut diolah oleh usaha-usaha kecil





milik masyarakat. Dalam segi penjualan, produk G&F dijual dengan harga pasar yang adil dengan sistem penentuan harga yang transparan. Hasil penjualan produk tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, G&F diproduksi sesuai kondisi dan budaya setempat dan tidak memberatkan pihak produsen khususnya kaum perempuan.

WWF percaya bahwa produk yang telah memenuhi kriteria tersebut adalah produk “terjamin”. Artinya, produk itu secara ekologi, ekonomi dan sosial bisa mendorong kelestarian, kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Sudah ada beberapa produk hasil petani dan pengrajin lokal yang mulai dikenal di wilayah masing-masing dan di kota-kota besar, antara lain:

- * Kopi robusta “Kuyungarang” dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung
- * Madu hutan “Tesso Nilo” dari Taman Nasional Tesso Nilo, Riau
- * Minyak kayu putih “Walabi” dari Taman Nasional Wasur, Merauke
- * Beras Adan Krayan dari dataran tinggi Borneo
- * Madu hutan “Gunung Mutis”, Nusa Tenggara Timur
- * Kerajinan patung badak dari Taman Nasional Ujung Kulon
- * Teh Aloe Vera dari Taman Nasional Sebangau
- * Kerajinan “Manik Banuaka” dari Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat

Kedelapan produk tersebut menerapkan prinsip berkelanjutan secara keseluruhan. Yang tidak kalah penting, setiap produk menceritakan sebuah kehidupan komunitas di hutan atau di pantai, mengekspresikan nilai budaya dan kearifan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Keterkaitan antara lingkungan, ekonomi, dan tradisi budaya tersebut menjadi misi inisiatif “*Green & Fair Products*”. Ini adalah sebuah langkah bijak untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan melindungi tradisi demi membangun alternatif ekonomi masyarakat lokal yang baik sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau/biru di lapangan.

21. Menjaga Sumber Penghidupan yang Berkelanjutan di sekitar TN Bukit Barisan Selatan

Oleh Job Charles dan Sutarno

Dulu, banyak kopi yang beredar di Indonesia maupun dunia berasal dari kebun-kebun yang berada di taman nasional atau kawasan konservasi lainnya. Tapi, seiring perkembangan, mulai banyak masyarakat yang peduli budidaya kopi berkelanjutan. Di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), terlihat kemajuan berarti sejak kampanye “Kopi dan Konservasi” dilakukan pada awal 2007. Perusahaan kopi mulai mengadopsi dan mendukung upaya pertanian berkelanjutan. Mereka mulai membeli komoditas kopi dari kawasan yang legal.



Sekolah Lapang (SL) memberikan pemahaman, keterampilan, dan mendorong petani menerapkan pertanian yang berkelanjutan



Secara langsung, WWF aktif membantu petani di 12 desa di kawasan penyangga TNBBS untuk pertanian berkelanjutan sejak pertengahan 2008. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Yayasan Dana Mitra Lingkungan (DML) dan Yayasan Pertanian Alternatif Sumatera Utara (PANSU). Koperasi Konservasi Mitra Tani (KOMIT) dibentuk pada Agustus 2010, melibatkan 30 kelompok tani di kawasan penyangga TNBBS, dengan anggota aktif sekitar 650 petani. Lebih jauh lagi, pada April 2011, para petani yang didampingi ini mendapatkan sertifikasi dari *Rainforest Alliance* untuk komoditas kopi dan coklat.

Apa kunci sukses upaya pendampingan masyarakat ini? Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mendirikan Sekolah Lapang (SL) pada setiap desa yang didampingi. SL ini memberikan pemahaman, keterampilan, dan mendorong petani menerapkan pertanian yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Hingga tahun 2012, WWF telah mendampingi lebih kurang 1.500 petani di kawasan penyangga TNBBS yang tersebar di 12 desa. Sebagian produksi kopi dari petani KOMIT ditampung oleh rumah produksi Kopi Kuyungarang yang merupakan kelompok usaha perempuan yang beranggotakan 10 orang, dan difasilitasi WWF pada tahun 2008. Sekarang, kelompok pengolah Kopi Kuyungarang ini mampu memproduksi kopi 1,5 hingga 2 ton per tahun, dengan pendapatan bersih 10-15 juta rupiah per bulan.

Pada tahun 2011, KOMIT bekerjasama dengan WWF dan Dinas Pertanian Lampung mengembangkan beras organik di empat desa sekitar penyangga TNBBS. Terobosan ini disambut konsumen. Koperasi KOMIT dapat menjual beras Rp. 12.000-13.000/kg, dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sebanyak 50 petani telah mengajukan aplikasi sertifikasi beras organik pada lembaga sertifikasi, dan pada Juni 2012 auditor lembaga sertifikasi organik telah ke lapangan untuk melakukan diagnosa audit. Kesimpulannya, petani sangat disiplin menjalankan standar pengelolaan lingkungan dan standar budaya ramah lingkungan. Diharapkan pada pertengahan 2012 Koperasi KOMIT dan petani sudah mendapatkan sertifikasi beras organik sehingga dapat meningkatkan nilai jual.

Pendampingan SL berdampak tiga aspek, yaitu teknis, sosial, dan politik. Secara teknis budidaya tanaman, timbul pemahaman di kalangan petani akan pentingnya ekologi tanaman. Mereka juga memiliki keterampilan melakukan uji





coba dan inovasi mengelola lahan menjadi lebih baik. Sementara penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan obat pun bisa diturunkan, produksi lebih stabil dan dengan meningkatnya keuntungan. Selain memperkuat alternatif sumber penghidupan petani, pendampingan ini melatih petani mengambil risiko dan kesempatan. Sementara, inovasi mereka meningkatkan keanekaragaman hayati di sekitar kebun, menurunkan laju kontaminasi air, keracunan, dan risiko kesehatan lainnya.

Dari aspek sosial, telah terlihat terbangunnya kerjasama antar petani dan antar kelompok tani. Kemampuan petani berkomunikasi pun meningkat. Mereka memiliki kemampuan memecahkan masalah, dan mendorong munculnya kelompok studi di tingkat petani dan penyuluhan dari petani ke petani.

Dari aspek politik, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan petani dalam negosiasi, begitu pula posisi tawar petani dengan pedagang. Mereka juga diharapkan meningkatkan kampanye kesadaran dan aktif dalam perbaikan kebijakan. Saat ini, sudah terbentuk asosiasi petani yang siap membuat agenda bersama sebagai sebuah jaringan, sehingga petani yang aktif dalam Sekolah Lapang dan Koperasi KOMIT secara suka rela turun meninggalkan lahan di dalam kawasan TN Bukit Barisan Selatan.

22. Minyak Kayu Putih dan Harapan di TN Wasur

Oleh Paschalina Rahawarin

Di TN Wasur di ujung selatan Papua, telah bertahun-tahun masyarakat Kanume Suku Marind hidup damai dengan alamnya. Terdiri dari tiga sub suku di empat kampung dalam kawasan TN Wasur di Merauke, Papua, mereka mengusahakan penyulingan kayu putih secara turun temurun.

Menjaga dan memelihara pohon kayu putih jenis *Asteromyrthus simpocarpa* dan *Melaleuca spp.*, delapan kelompok penyuling didampingi Yayasan Wasur Lestari (YWL) yang melanjutkan kegiatan WWF-Indonesia. Bersama-sama, mereka berusaha meningkatkan ketrampilan serta belajar pengelolaan usaha minyak kayu putih.

Masyarakat memetik langsung daun atau ranting kayu putih. Berbeda dengan cara terdahulu, kini masyarakat sepakat bahwa pohon tidak boleh ditebang, daun tidak boleh dipetik habis, serta lokasi pengambilan digilir secara berkala. Kearifan ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa di mana daun bisa tumbuh kembali dan layak petik. Lebih jauh lagi, pemerintah dusun dan penduduk juga membuat sanksi adat untuk pemetik yang melakukan penebangan: mereka tidak diperkenankan lagi mengambil daun atau memasuki dusun/hutan tersebut.

Semua anggota keluarga termasuk kaum perempuan terlibat dalam penyulingan yang menggunakan alat khusus. Sambil menyuling, mereka juga menyiapkan kemasan botol kayu putih berupa anyaman keranjang kecil dari rumput rawa yang sudah dikeringkan, serat pelepah pisang, dan serat daun nenas. Unikny, terkadang kegiatan ini dilakukan sambil menjaga dan menyusui anak-anak mereka yang masih balita.



“...salah seorang penyuling, telah dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai SMP dan berharap bisa lebih tinggi lagi...”



Minyak kayu putih lalu dikumpulkan di rumah salah satu anggota kelompok penyuling atau fasilitator. Setelah mencapai volume tertentu, minyak tersebut dikirim ke kantor Yayasan Wasur Lestari (YWL) di Merauke untuk pengemasan. Dikemas dalam botol gelas dan berlabel TN Wasur, minyak kayu putih tersebut dipasarkan melalui apotik, toko, dan hotel di Merauke. Selain itu YWL juga membantu pemasaran ke produsen minyak atsiri di Jawa sesuai pesanan.



Usaha penyulingan ini mampu menghasilkan 30 liter/minggu dengan nilai jual Rp 70.000,00/liter. Dengan hasil itu, masyarakat bisa mengumpulkan Rp 800-900 ribu rupiah per minggu. Sebagai contoh, Mikael Ndimar, salah seorang penyuling, telah dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai SMP dan berharap bisa lebih tinggi lagi. Ia juga telah memiliki alat transportasi minimum, misalnya sepeda, dan menabung secara rutin di kota Merauke yang berjarak 60,56 km dari Kampung Yanggandur. Selain itu, kaum perempuan di sana juga mempunyai penghasilan dan mengatur sendiri penggunaannya.

Usaha penyulingan minyak kayu putih memang membawa harapan bagi masyarakat. Sebagian dari mereka juga menanam anakan kayu putih di sekitar pekarangan rumah. Hal ini rupanya juga berdampak positif: tingkat perburuan satwa dan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan TN Wasur berkurang!

23. Madu Manis

Para Penjaga Hutan Tesso Nilo

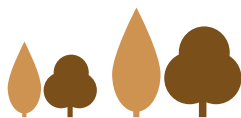
Oleh Syamsidar

Hutan Tesso Nilo merupakan hutan dataran rendah yang tersisa di Provinsi Riau. Terentang di kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi, sebagian kawasannya seluas 83 hektar (di kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu) ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sejak 2004.

Di Tesso Nilo, masyarakat hidup dan mengumpulkan madu hutan sebagai sumber pendapatan. Madu yang oleh masyarakat Melayu disebut “madu Sialang” ini berasal dari pohon yang dihinggapi lebah (*Apis dorsata*). Pohon tersebut dinamakan pohon Sialang yang terdiri dari berbagai jenis antara lain Kruing, Kempas, Ara, Kedundung, Jelutung, Meranti. Biasanya, pohon Sialang tinggi dan besar dan memiliki banyak cabang. Secara turun temurun masyarakat menjaga pohon Sialang dan hutan sekitarnya agar tidak ditebang. Pelanggaran terhadap aturan tidak tertulis ini akan dikenai sanksi adat.

WWF mendukung masyarakat agar madu Sialang menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Bersama masyarakat, WWF membantu merumuskan aturan perlindungan pohon Sialang dan hutan kepungannya (hutan sekitar pohon Sialang) tersebut menjadi peraturan desa hingga ke peraturan bupati. Hingga kini, telah dihasilkan satu peraturan bupati mengenai perlindungan pohon Sialang yakni Peraturan Bupati Kuantan Singingi. Hal serupa saat ini tengah dilakukan di kabupaten Pelalawan. Di tingkat desa di dalam kawasan Tesso Nilo, satu peraturan desa telah selesai dirumuskan. Sementara, peraturan yang sama di empat desa lainnya masih dalam proses.

Ada sekitar 493 pohon Sialang di TN Tesso Nilo dan kawasan sekitarnya. Sejak akhir 2010, WWF bersama Balai TN Tesso Nilo membina masyarakat pengumpul madu hutan dalam Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo (APMTN) untuk menerapkan pemanenan dan pemrosesan madu sesuai standar



*“Peningkatan
nilai jual
madu memacu
masyarakat
mempertahankan
habitat pohon
Sialang...”*



Aliansi Organik Indonesia. Ini agar hasil madu mereka berkualitas dan bersertifikasi. Saat ini, pemanenan dilakukan dengan lestari. Masyarakat meninggalkan cara lama melalui langkah bijak: tidak memotong semua sarang madu. Mereka kini menyisakan bagian anakan madu. Dengan mekanisme ini, lebah cepat kembali membangun sarang sehingga panen berikutnya tidak menunggu waktu lama. Untuk pohon yang sama, sekarang panen dapat setiap dua bulan, lebih cepat satu bulan dari sebelumnya.

Anggota APMTN mengolah madu tanpa peras tangan tapi melalui penirisan. Dengan demikian, hasilnya lebih higienis dan berkualitas. Ini meningkatkan nilai jual madu dibanding madu hutan petani lainnya. Madu Sialang Tesso Nilo dijual petani dengan harga Rp. 33.000,00/kilogram. Sementara, madu lain dijual dengan harga Rp. 20.000-25.000/kilogram. Peningkatan nilai jual ini meningkatkan penghasilan petani madu



anggota asosiasi. Terkait perekonomian berkelanjutan, pemasaran adalah hal terpenting. WWF memfasilitasi APMTN yang kini beranggotakan enam kelompok petani madu dari lima desa di sekitar Tesso Nilo. Anggota asosiasi terus ditingkatkan kapasitasnya. Sejak pertengahan 2010, APMTN sukses membuka pasar ke Malaysia. Mereka mengekspor 1 ton madu tiap bulan dengan harga jual Rp. 47.000,00/ kilogram. Manisnya!

Peningkatan nilai jual madu memacu masyarakat mempertahankan habitat pohon Sialang. Namun, ada pula kendala di lapangan. Beberapa pohon di dalam konsesi perusahaan mati atau tumbang. Secara adat masyarakat dapat mengklaim pohon Sialang tersebut milik mereka, namun mereka tidak dapat berbuat banyak ketika pohon yang disisakan di hamparan perkebunan tersebut akhirnya mati.



Jasa Keuangan



24. Upaya Pemberdayaan yang Kreatif dan Akuntabel di Kapuas Hulu

Oleh Hermas Rintik Maring

Skema dana bergulir diarahkan untuk menunjang bisnis di tingkat masyarakat.

Peningkatan sumber pendapatan keluarga selalu menjadi isu hangat. Krisis ekonomi berkepanjangan membuat pemerintah terus berupaya membangun ekonomi masyarakat. Namun, sistem subsidi atau pemberian bantuan langsung terbukti tidak cukup mendidik dan bahkan memperparah pola pikir masyarakat. Tantangan serupa terjadi pula di Kapuas Hulu.



Berangkat dari fenomena ini, WWF-Indonesia telah mencoba menerapkan pola bantuan dengan skema dana bergulir. Untuk mendapatkan bantuan dana, kelompok masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan antara lain: jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan, keterampilan, dan kesediaan pasar yang ada serta memastikan tidak bertentangan dengan semangat konservasi. Di samping itu, disepakati pula besaran dana tertentu untuk menjamin pengembalian dana tepat waktu serta sistem pengembalian dana untuk mempermudah proses pemantauan usaha dan memastikan dana dapat bergulir ke kelompok masyarakat lainnya.

Hingga tahun 2012, telah ada lima kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional Betung Kerihun yang telah mendapatkan kucuran dana bergulir dari WWF. Pada umumnya, dana ini digunakan menjadi modal usaha kreatif masyarakat seperti pengembangan usaha rumah inap (*homestay*) dalam bisnis ekowisata, pengembangan pertanian organik berupa beras merah dan pengembangan jagung untuk menjawab kebutuhan pakan ternak di pasar lokal Putussibau, budidaya madu organik, pengadaan sarana telekomunikasi sistem satelit dan bisnis kelompok lainnya. Secara garis besar, skema dana bergulir ini diarahkan untuk menunjang bisnis di tingkat masyarakat. Dalam praktiknya, ada yang sukses dalam perputaran bisnis dan pengembalian dananya, namun ada juga yang kurang berhasil. Meskipun begitu, upaya kreatif dan akuntabel ini terus membangkitkan semangat masyarakat.

Dalam pengembangan *homestay*, misalnya, skema dana bergulir ini boleh dikatakan cukup sukses. Usaha *homestay* berjalan baik. Dalam satu tahun, empat kepala keluarga penerima dana bergulir dapat mengembalikan seluruh dana bergulir yang dipinjamkan. Begitu pula dengan pada usaha pengembangan pertanian organik di Kelompok Petani Gogong di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu. Kelompok petani itu telah dapat mengembalikan modal usahanya. Sebuah semangat baru telah muncul dengan dukungan sederhana yang kreatif dan mengedepankan semangat kepercayaan (akuntabel).



25. Modal Usaha Ramah Lingkungan di Solor-Alor

Oleh Zakarias Atapada



modal usaha sebesar

Rp. 1.3 Milyar

melalui 20 forum

masyarakat

untuk usaha ekonomi

produktif yang ramah

lingkungan

Perairan Solor-Alor memiliki berbagai potensi, baik sumberdaya manusia maupun alamnya. Perairannya unik, tradisi dan budaya lokalnya kaya, serta merupakan rute migrasi *Cetacean* di samping sejumlah kekayaan sumber daya laut lainnya. Meski begitu, masih banyak masalah antara lain penangkapan ikan dengan bom dan potasium sianida, penangkapan ikan berlebih, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta pengambilan penyu dan telur penyu. Di sisi lain, masyarakat mengalami kekurangan modal usaha untuk membangun ekonomi berkelanjutan.

Melihat sejumlah permasalahan, WWF-Indonesia pada tahun 2007 membangun komitmen dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor, serta TNC dan Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Laut (Tim PP-KKL). Komitmen itu dibuat untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dalam menunjang pembentukan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Solor-Lembata-Alor.

Bersama pemerintah kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor, WWF memfasilitasi dan mendampingi usaha 79 kelompok masyarakat di 20 desa pesisir di Solor-Alor di antaranya; budidaya rumput laut, perikanan tangkap, penjualan ikan dan kerajinan tenunan. Maka pada tahun 2009-2010, WWF-Indonesia memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.300.485.000,00 melalui 20 forum masyarakat di 20 desa target sebagai lembaga pengelola dana untuk kepentingan masyarakat itu.



Sebagai lembaga pengelola dana bergulir, tiap forum masyarakat melakukan yang terbaik agar proses pendampingan, pemantauan, evaluasi dan penguatan kelembagaan kelompok dampingan berjalan lancar. Selain itu, mereka juga membuat laporan triwulan dan tahunan serta berkoordinasi dengan lembaga lainnya dalam menunjang usaha kelompok dan pengelolaan kawasan perairan Solor-Alor.

Rupanya, modal usaha itu cukup efektif. Sebanyak 75% kelompok masyarakat telah melakukan usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan, antara lain: rata-rata nelayan telah menangkap ikan dengan tali senar, mata pancing, pukat dengan ukuran mata jaring 2 inci ke atas. Sementara, pendapatan usaha kelompok meningkat dari semula Rp. 25.000,00 sampai Rp 30.000,00 menjadi Rp.50.000,00 hingga 75.000,00 tiap hari per anggota. Forum juga terlibat aktif dalam melepaskan satwa langka yang tertangkap nelayan (antara lain duyung dan penyu). Masyarakat Babokerong bahkan memproses dan menghukum pelaku pengeboman ikan dengan peraturan desa mereka. Lebih jauh lagi, masyarakat bisa menyekolahkan anaknya berkat keuntungan usaha dari dana bergulir ini di samping memenuhi kebutuhan lainnya.

Adanya dana bergulir ini ternyata berdampak pada terbentuknya forum masyarakat tingkat kabupaten Alor (2011), bangkitnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan upaya pengambilan hasil laut yang tidak ramah lingkungan, serta diadopsinya sejumlah program WWF oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Alor. Pancingan modal bergulir ini telah berhasil mendorong gairah masyarakat untuk berusaha dengan tetap menjaga alamnya.



Energi Terbarukan



26. Hutan, Air, Listrik dan Penghidupan Masyarakat

Oleh Rudi Zapariza dan Markus Lasah

“...proses menyeimbangkan antara tuntutan ekologi dan ekonomi dapat terpenuhi secara bersama...”

Pemanfaatan jasa lingkungan saat ini menjadi perbincangan yang menarik untuk menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat. Upaya menyatukan keseimbangan tiga prinsip ini akan mendorong program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam lebih berkelanjutan serta memberi nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pengembangan energi terbarukan listrik melalui potensi air (mikrohidro) adalah salah satu contohnya.

Beberapa aspek bagi keberlanjutan mikrohidro adalah kawasan tangkapan air (*catchment area*) berupa kawasan hutan di sekitarnya, spesies yang mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran biji untuk memperkaya kawasan hutan, dan air bersih itu sendiri. Adapun hasil dan manfaat jasa dari lingkungan tersebut berupa energi listrik yang turunannya akan berdampak kepada nilai ekonomi masyarakat, pendidikan, dan informasi. Melalui berbagai proses diskusi dan studi kelayakan dengan Asosiasi Hidro Bandung (AHB), WWF-Indonesia mencoba mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Dusun Sungai Lung, Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Daerah tangkapan air untuk PLTMH Sungai Lung ini terletak di koridor antara Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum dengan luas 100 ha, terdiri dari kawasan berhutan cukup lebat dan hutan sisa perladangan,

Hasil potensi energi hidrolik PLTMH Sungai Lung adalah sebesar 5 kW. Saat ini, dengan menggunakan 1 unit turbin jenis *Crossflow* D-225 dan 1 unit generator Sinkron 3 phasa. Listrik dari PLTMH Sungai Lung telah disalurkan menggunakan Jaringan Transmisi Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 300 meter.

Energi listrik yang dihasilkan telah bisa menunjang kegiatan

belajar di malam hari, ekonomi alternatif berupa kerajinan tenun, anyaman, las listrik, pembuatan alat-alat penunjang kerja masyarakat seperti cangkul, parang, dan pisau. Saat ini, masyarakat juga merencanakan pengumpulan dana swadaya untuk membeli motor listrik guna menjalankan penggilingan padi. Untuk menimbulkan rasa kepedulian terhadap kelangsungan penyediaan energi, maka setiap keluarga pengguna jasa listrik telah menyepakati tarif iuran pemakaian daya sebesar Rp. 20.000,00/bulan, dibayar antara tanggal 1-5 setiap bulannya. Masyarakat juga menyetujui sanksi berupa denda Rp. 5.000,00/bulan jika terlambat membayar, dan apabila tiga bulan berturut turut tidak membayar akan dilakukan pemutusan sambungan listrik. Hasil iuran ini telah digunakan untuk mendanai upah Kepala Operator (dengan nilai yang ditentukan masyarakat), penggantian komponen mikrohidro yang mengalami kerusakan (*vant belt*, *grease* dan *MCB*), biaya perawatan dan pemeliharaan sistem pembangkit, biaya peralatan (untuk perawatan dan operasional), ongkos transportasi (misalnya untuk membeli peralatan PLTMH ke kota), serta biaya yang diperlukan untuk menjamu tamu dusun.

Mikrohidro di Sungai Lung telah menunjukkan bahwa proses menyeimbangkan antara tuntutan ekologi dan ekonomi dapat terpenuhi secara bersama. Ini merupakan langkah penting dalam upaya-upaya meletakkan dasar bagi pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Upaya-upaya strategis, implementatif dan inovatif telah menjadi pembelajaran bagi perkembangan konservasi yang bermanfaat bagi semua.



27. Kisah Mikrohidro di Long Pahangai, Kutai Barat

Oleh Sri Jimmy Kustini dan Ery Panca Setyawan

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur memiliki banyak potensi pengembangan mikrohidro. Energi alternatif ini adalah salah satu solusi memecahkan kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik yang belum dirasakan secara langsung, khususnya mereka di pedesaan. Saat ini mikro hidro yang sudah terbangun di Kutai Barat dapat ditemui di Kampung Long Pahangai.

Pembangunan sumber energi alternatif di kampung di hulu Sungai Mahakam ini dilakukan pada kurun 2009-2010, oleh Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) melalui dana APBN. Tujuannya adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik untuk penerangan. Pelaksanaan pembangunan mencakup bendungan air, pipa, rumah turbin dan trafo utama listrik.

Pada tahun 2011, pemerintah Kutai Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi melanjutkan kegiatan pembangunan dengan melakukan pemasangan kabel dari trafo listrik ke setiap rumah yang ada di kampung Long Pahangai I dan Long Pahangai II. Listrik sempat dinikmati masyarakat hanya sekitar dua hari dan kemudian tidak beroperasi lagi. Itu disebabkan kerusakan pada bendungan air, rumah turbin dan panel kontrol.

Kerusakan itu karena tidak adanya petugas pemeliharaan fasilitas. Ternyata, masyarakat belum dilibatkan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Mikrohidro (PLTAMH) ini, maupun dalam pengelolaannya, sehingga mereka kurang berpartisipasi dan rasa memiliki. Melihat kondisi ini, WWF-Indonesia Program Kutai Barat melakukan pendampingan kepada masyarakat sebagai usaha untuk menghidupkan kembali mikrohidro ini.

Mikrohidro energi alternatif solusi memecahkan kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik dan pelestarian hutan





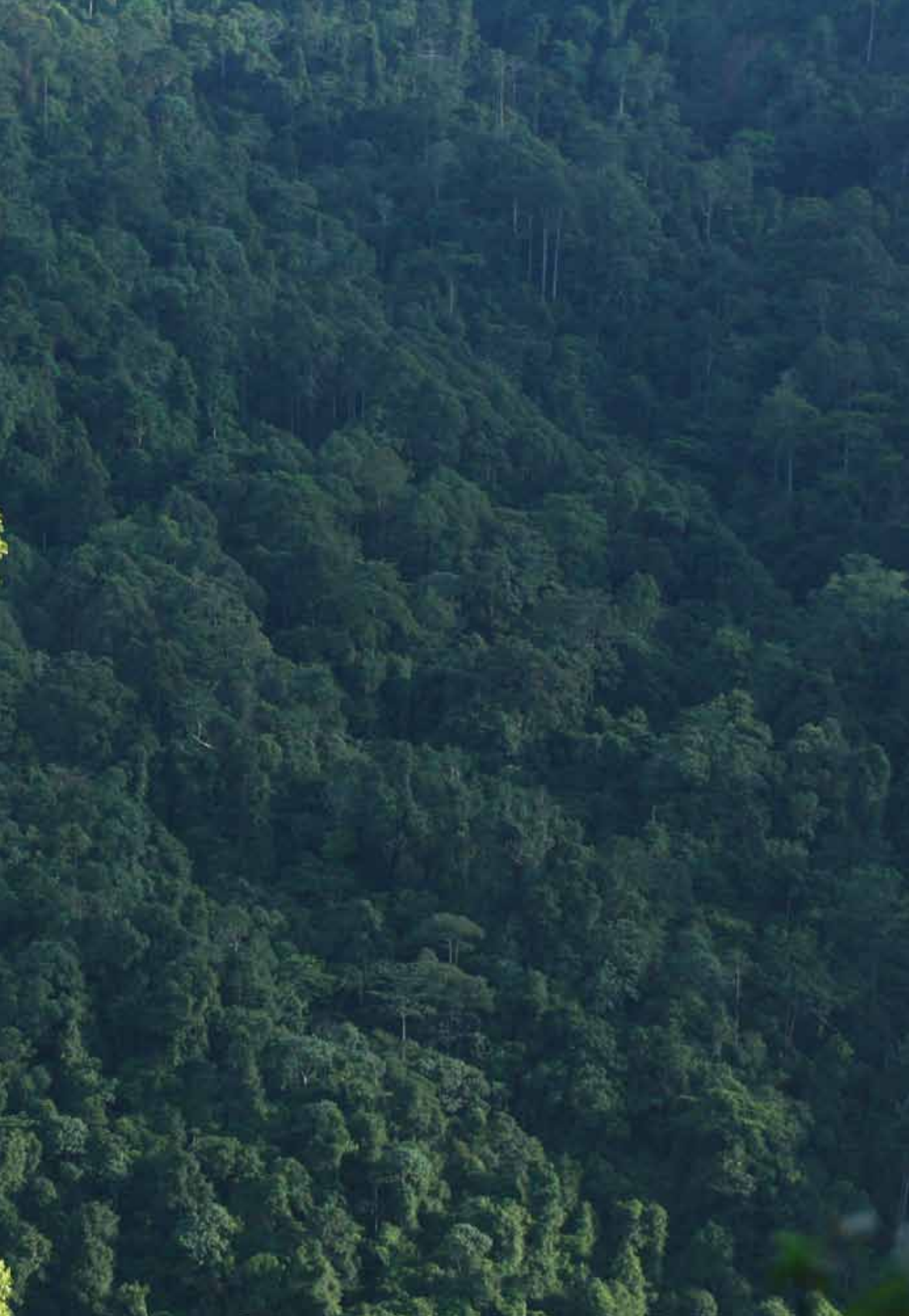
Kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya memfasilitasi pembuatan peraturan kampung (perkam) terkait rencana kegiatan pengelolaan serta pembentukan kembali kelompok pengelola PLTAMH. Kelompok yang terbentuk dinamakan “*Idang Suaan*”, yang dalam bahasa Bahau Busang artinya “cahaya dari sungai Suaan”. Kelompok ini beranggotakan masyarakat dari kampung Long Pahangai I dan Long Pahangai II.

Salah satu butir yang tercantum dalam perkam, yaitu adanya iuran pemakaian listrik yang digunakan untuk pengelolaan PLTAMH. Besarnya iuran yang disepakati masyarakat adalah sebesar Rp 50.000,00 per bulan per kepala keluarga. Dana yang terkumpul akan disimpan di rekening tabungan badan pengelola di *Credit Union*. WWF juga membantu koordinasi ke pemerintah kabupaten dan memfasilitasi masyarakat untuk pembuatan proposal usulan perbaikan PLTAMH.

Masyarakat kedua kampung melalui peraturan kampung tentang pengelolaan bersama PLTAMH telah bersepakat untuk mengelola dan memelihara hutan yang ada di daerah resapan air, yaitu untuk menjamin ketersediaan air yang menggerakkan kincir yang memutar turbin PLTAMH. Ke depannya, diharapkan masyarakat tetap hidup selaras dengan alam dan melindungi hutan mereka serta menerapkan pola pertanian yang ramah lingkungan. Kisah mikrohidro di Long Pahangai ini menjadi salah satu tantangan dalam menyeimbangkan antara konservasi alam, kebutuhan energi listrik, pengembangan ekonomi dan membangun kepemilikan bersama untuk perlindungan hutan di daerah resapan air sungai Suaan.



Jasa Ekosistem



28. Program Jasa Lingkungan di Pulau Lombok: Membangun Tanggung Jawab Bersama

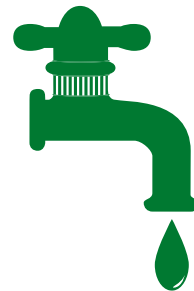
Oleh M. Ridha Hakim

Kawasan gunung Rinjani, sebagai daerah resapan air, menjadi sumber air utama bagi masyarakat di Pulau Lombok. Sedemikian pentingnya, maka sejak tahun 2003 telah dirintis program untuk membangun tanggung jawab bersama terhadap lingkungan bagi masyarakat hulu dan hilir (di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram). Mekanisme ini penting karena diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap upaya konservasi baik pada tingkat lokal maupun tingkat pulau, serta terwujudnya pendanaan mandiri (*trust fund*) untuk kegiatan konservasi. Inilah yang kemudian berkembang menjadi program jasa lingkungan.

Setelah melalui proses panjang, mekanisme pembayaran jasa lingkungan di Kabupaten Lombok Barat dikokohkan dengan payung hukum peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Perda ini untuk mendorong terwujudnya sumber pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan, mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, serta terwujudnya kelestarian sumberdaya alam.

Program ini diawali dari studi WWF mengenai valuasi ekonomi di kawasan Gunung Rinjani pada tahun 2003. Saat itu, terungkap adanya degradasi lingkungan karena pemanfaatan kawasan hutan dan penebangan liar. Degradasi ini memicu penurunan kualitas dan kuantitas air baku bagi masyarakat di kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya. Muncullah ide untuk penggunaan pembayaran jasa lingkungan untuk memperbaiki kawasan Gunung Rinjani.

*dana jasa
lingkungan
didistribusikan
untuk mendukung
kegiatan tujuh
kelompok
masyarakat di
lima desa sekitar
kaki Rinjani*





Awalnya, dilakukan studi kesanggupan membayar/*willingness to pay (WTP)* masyarakat terhadap nilai untuk mengkonservasi kawasan Gunung Rinjani. Hasil studi menunjukkan nilai WTP antara Rp. 500,00 hingga Rp. 5000,00 per bulannya. Setelah diajukan ke DPRD, disetujui pembebanan biaya Rp. 1000,00/bulan per kepala keluarga domestik dan Rp. 2000,00/bulan bagi pelanggan industri/hotel yang memanfaatkan air bersih PDAM. Lebih jauh lagi, dibentuklah Institusi Multi Pihak (IMP) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat no 1072/207/Dishut/2009. IMP bertanggung jawab kepada Bupati. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, unit pelaksana teknis (UPT) Kehutanan, Swasta, LSM, akademisi dan perwakilan masyarakat. IMP ini memiliki tugas berat karena harus mengelola dan menyalurkan uang masyarakat pengguna jasa PDAM dengan verifikasi yang ketat.

Sejak pengesahan itu, dana yang dipungut oleh PDAM dialirkan melalui Dinas Kehutanan untuk manajemen IMP (25%) dan mendukung kegiatan konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat (75%). Hingga pertengahan 2012, total dana jasa lingkungan telah mencapai Rp. 792.000.000,00 (di luar dana terkait kehutanan dan lingkungan dari APBD). Dana itu telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan tujuh kelompok masyarakat di lima desa sekitar kaki Rinjani: program restorasi lahan kritis sekitar mata air seluas 130 hektar, pembibitan serta aktivitas ekonomi alternatif seperti pengolahan kopi dan pengolahan hasil hutan non kayu lainnya.

Keberhasilan skema di Kabupaten Lombok Barat ini telah memicu minat dan dukungan Kota Mataram dan daerah lainnya. Saat ini, proses pengembangan jasa lingkungan juga berkembang secara bervariasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Skema ini pada awalnya dirancang untuk pengelolaan lingkungan serta mengentaskan kemiskinan

29. Tekad Warga Tumbang Runen

Lindungi Danau Hai

Oleh Didik Surjanto



Sekitar 80 persen penduduk Tumbang Runen, desa di sebelah barat Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan, terutama menangkap ikan dan budidaya ikan tauman. Tetapi, pada sebuah diskusi terkait rencana pengembangan mata pencaharian berkelanjutan beberapa tahun lalu, terungkap fakta bahwa hasil tangkapan ikan terus menurun. Bahkan, jenis ikan tertentu (antara lain ikan bakut, lais, kelabau dan ikan pipih), mulai sulit ditangkap di sana.

Maka, pada tahun 2010 itu, masyarakat bertekad melindungi sumber daya ikan di Danau Hai, sekitar 1,5 kilometer di belakang kampung, demi menjaga ketersediaan ikan di habitat alaminya. WWF-Indonesia memfasilitasi pertemuan masyarakat kampung, dan menyampaikan kepada pemerintah kabupaten Katingan dan Balai TN Sebangau tentang kekhawatiran masyarakat itu. Pemerintah bergerak cepat. Pada 27 Oktober 2010, Danau Hai ditunjuk sebagai Kawasan Konservasi Perikanan masyarakat Desa Tumbang Runen, atas dukungan Balai Taman Nasional Sebangau, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan, dan Camat Kamipang.

Para tokoh masyarakat merasa perlu untuk membuat aturan yang menjaga kelestarian sumber daya ikan di Danau Hai.

Sebagian Danau Hai memang bagian wilayah administratif Desa Jahanjang, desa tetangga Tumbang Runen, yang penduduknya juga terbiasa menangkap ikan. Para tokoh masyarakat lalu merasa perlu untuk membuat aturan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di Danau Hai. Maka digelarlah pertemuan antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat kedua desa untuk mencari cara terbaik pengelolaan Danau Hai. Sebenarnya aturan adat menjadi satu pilihan. Namun, aturan itu sudah mulai luntur di daerah tersebut sehingga tidak lagi dianggap efektif untuk diterapkan. Akhirnya, disepakatilah penyusunan Peraturan Desa, yang prosesnya diserahkan kepada Pemerintah Desa Tumbang Runen karena sebagian besar Danau Hai berada di wilayah Tumbang Runen.

Melalui tiga kali pertemuan di desa, akhirnya Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perikanan Masyarakat Danau Hai dapat selesai pada akhir tahun 2011. Perdes itu antara lain mengatur siapa saja yang bisa memanfaatkan ikan di Danau Hai, sempadan danau, batas minimal ukuran jaring, pelarangan penggunaan setrum dan racun, hingga sanksi atas pelanggaran serta pemanfaatan dana hasil sanksi tersebut. Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, lewat bagian hukumnya, ikut membantu melengkapi landasan hukum hingga mengesahkannya sebagai Perdes pertama di kabupaten yang bersangkutan.

WWF juga memfasilitasi upaya budidaya ikan dalam keramba, untuk mendukung upaya konservasi sumber daya alam. Bekerjasama dengan Balai TN Sebangau, WWF memberikan bantuan keramba dan memfasilitasi pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan. Sementara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan menyumbangkan mesin pengolah pakan ikan dan benih ikan untuk keramba. Inisiatif masyarakat di Tumbang Runen ini yang kemudian juga menjadi dasar perluasan skala kerjasama antar para pemangku kepentingan demi pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif di TN Sebangau.



30. Restorasi Ekosistem Bersama Masyarakat di TN Sebangau

Oleh: Rosenda C. Kasih

*setelah kanal-kanal
ditabat, di musim
kemarau masih tersedia
air untuk memadamkan
kebakaran dan ikan untuk
ditangkap*

Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, kawasan Sebangau dulunya merupakan hutan produksi. Hingga kini, bekas-bekas produksi kayu tampak dari banyaknya kanal yang dibangun untuk mengeluarkan kayu yang ditebang dari hutan, terutama pada masa *illegal logging* tahun 2000-an.

Kanal-kanal yang dibangun untuk mengeluarkan kayu tebangan tersebut terbukti menyebabkan rawa gambut cepat mengering di musim kemarau. Akibatnya, gambut menjadi mudah terbakar, tidak mampu menyerap air lagi, dan rawa gambut berkurang kemampuannya menjadi habitat flora dan fauna yang dilindungi, termasuk juga berkurangnya sumber daya perikanan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Percobaan restorasi ekosistem gambut dengan cara pembuatan dam (atau sering pula disebut ‘tabat’) untuk menutup kanal mulai dilakukan di *sub-catchment* Sungai Bangah





pada tahun 2004. Lalu, penutupan dilakukan secara masif di *sub-catchment* Sungai Bakung dan Sungai Rasau mulai tahun 2008. Pekerjaan membuat dam dimulai dengan mendekati pemilik kanal dan pengelola sungai sebagai penerapan prinsip *Free-Prior and Informed Consent (FPIC)* di mana informasi lengkap dan pendekatan kepada para pengelola dilakukan sebelum penutupan kanal. Hal ini penting dilakukan karena secara tradisional ketiga *sub-catchment* tersebut dikelola sumber daya ikannya oleh keluarga-keluarga besar yang tinggal di Kereng Bengkirai. Mereka bisa menerima bahwa kanal-kanal buatan itu perlu ditutup lagi untuk mempertahankan permukaan air dan memperbaiki ekosistemnya.

Sejumlah kesepakatan dibuat, termasuk dengan melibatkan pemilik kanal, pengelola sungai, dan nelayan-nelayan setempat dalam pekerjaan konstruksi dam. Hingga akhir tahun 2011 tercatat lebih dari 400 dam dibangun di tiga *sub-catchment* tersebut.

Pada evaluasi yang dilakukan pada bulan September 2011, hadir 76 nelayan yang memanfaatkan ketiga *sub-catchment* itu. Dari pertemuan itu terungkap bahwa populasi ikan meningkat setelah kanal-kanal ditabat. Menurut pengamatan mereka, danau-danau yang dulunya kering kini terisi air kembali dan menjadi tempat bertelurnya ikan. Selain itu, di musim kemarau masih tersedia air untuk memadamkan kebakaran, dan juga masih ada ikan yang bisa ditangkap di belakang dam-dam yang dibangun.

Selain penabatan, upaya restorasi juga dilaksanakan dalam bentuk penanaman tanaman hutan pada kawasan bekas kebakaran. Penanaman dikelola bersama Forum Masyarakat setempat, dan melibatkan lebih banyak orang (sekitar 30 persen kepala keluarga di lokasi penanaman). Hingga akhir tahun 2011 areal 860 hektar telah dihidupkan kembali bersama masyarakat. Masyarakat mendukung upaya restorasi ini karena mereka sadar sepenuhnya kelestarian kawasan TN Sebangau juga berarti kesejahteraan bagi mereka.

31. Pengelolaan DAS Terpadu dan Berkelanjutan di Aceh

Oleh Azhar



1,5 juta orang
*hidup di sekitar
DAS Krueng Sabee*

Di Aceh terdapat 15 kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang menyimpan keanekaragaman hayati penting. Sebagian besar kawasan lindung dan kawasan konservasi di Aceh berada di kawasan DAS. Namun, kondisi DAS di sana rata-rata memprihatinkan. Meningkatnya alih fungsi hutan untuk budidaya telah memperburuk kualitas ekosistemnya.

Sejak 2007, di bawah program *Fresh Water*, WWF-Indonesia Kantor Aceh mendorong perlindungan dan pengelolaan dua DAS yakni DAS Krueng Sabee dan DAS Peusangan. DAS Krueng Sabee terletak di Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan DAS Peusangan berada di lintasan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen dan Aceh Utara. Lebih dari 1,5 juta orang hidup di sekitar DAS ini. WWF mendukung pembentukan Forum DAS Krueng Sabee dan Forum DAS Krueng Peusangan. Pembentukan keduanya dilakukan dari dua tingkat berbeda, yakni yang dibangun dari inisiasi masyarakat dan yang dibangun dari diambil kebijakan.

Forum DAS Krueng Sabee dibangun dari keinginan masyarakat 10 desa di sepanjang Krueng (Sungai) Sabee. Inisiasinya dimulai sejak 2007. Bersama Yayasan Pemerhati Dunia Hijau Indonesia (PADHI), pemerintah kabupaten Aceh Jaya dan didukung *American Red Cross*, WWF membantu pembentukan forum ini hingga resmi berdiri pada pertengahan 2008. Masyarakat merancangannya melalui musyawarah partisipatif, beranggotakan unsur masyarakat desa, tokoh adat dan pemerintahan. Diketuai tokoh adat Abdullah Rajab dengan dukungan SK Bupati Aceh Jaya, Forum DAS Krueng Sabee telah berdampak positif mengurangi kerusakan lingkungan terutama di bagian hulu sungai. Selain aktif menyadarkan masyarakat, forum juga mengelola restorasi kawasan seluas 182 hektar di bagian hulu dengan tanaman kehutanan dan buah-buahan. Telah dibuat pula MoU dengan Badan Layanan Air Minum Daerah Aceh Jaya untuk mekanisme Imbal Jasa Lingkungan.

Sementara, inisiasi forum dari tingkat atas dilakukan di DAS Krueng Peusangan. Prosesnya sedikit rumit, karena sifatnya yang lintas kabupaten. Lobi dan diskusi berlangsung sejak 2008. Pada 2011 Forum DAS Krueng Peusangan terbentuk, beranggotakan para pihak dari lima kabupaten/kota serta diketuai oleh Dede Suhendra. Para Bupati/Walikota terkait juga menandatangani MoU untuk mengelola DAS secara bersama dan berkelanjutan. Gubernur Aceh juga menandatangani dokumen ini. Lebih jauh lagi, rencana strategis pengelolaan DAS Krueng Peusangan telah disusun bersama.

WWF mendorong dilaksanakannya mekanisme Imbal Jasa Lingkungan (PES) di kedua DAS tersebut. Sudah ada dua perusahaan swasta di DAS Peusangan yang telah menjalankan mekanisme itu. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Peduli DAS di Bireuen melakukan kegiatan penanaman di sekitar sungai Peusangan. Pada tahap pertama tahun 2011, mereka memberikan dana Rp 50 juta untuk pengadaan bibit dan penanaman, dan akan dilanjutkan pada tahap kedua. Sementara, PT. Arun juga bekerjasama dengan WWF-Indonesia melaksanakan program-program di DAS Peusangan seperti pelatihan kepada masyarakat, lokakarya nasional DAS Peusangan dan kegiatan kampanye publik yang dimulai di tahun 2012.



Belajar dari Kearifan Lokal dan Adat



32. Kemenangan Kearifan Lokal di Danau Lindung Empangau

Oleh Anas Nasrullah dan Hermayani Putera

“Masyarakat seluruh dunia bisa belajar bagaimana mengelola alam secara lestari di sini...”

Kita sering tahu istilah ‘hutan lindung’, tapi pernahkah kita dengar ‘danau lindung’? Danau Lindung Empangau ditetapkan melalui SK Bupati Kapuas Hulu No. 6 tahun 2001. Dari luas total 124 hektar, 30 hektar dijadikan kawasan lindung berbasiskan pengetahuan dan kearifan lokal.

Sebagai kawasan ekosistem rawa gambut air tawar (kerapa), air danau Empangau cenderung gelap (coklat merah kehitaman), penetrasi cahaya matahari ke dalam air sangat rendah, sebagai penanda bahwa kawasan ini merupakan habitat asli Siluk/Arwana (*Schlerofagus formosus*) dan lebih dari 70 jenis ikan bernilai ekonomis seperti Toman (*Channa micropeltes*), Jelawat (*Leptobarbus hoevani*), Ringau (*Datnoides microlepis*), Tapah (*Wallago leeri*), Belida (*Notopterus borneensis*).

Perjuangan menyelamatkan kawasan Empangau dimulai sebagai cita-cita beberapa tetua kampung sejak 1986. Saat itu, terjadi penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*). Tidak hanya kawasan dan keragaman spesiesnya yang terancam, sumber penghidupan masyarakat juga mulai menipis. Beberapa warga memulai kepedulian dengan melepasliarkan seekor induk Arwana di danau. Namun ini tak bisa langsung memenuhi harapan para tetua karena belum ada aturan yang mengikat semua warga desa. Tahun 1998, dengan meroketnya harga Arwana, digelarlah rapat rukun nelayan untuk menyusun aturan main nelayan dengan fokus melindungi Danau Empangau. Mulailah masyarakat menegakkan aturan nelayan dan hukum adat setempat. Tahun 2000, mereka membeli secara swadaya tiga ekor anak arwana untuk dilepasliarkan. Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu menanggapi secara positif dengan SK Bupati No. 6 Tahun 2001 yang mengukuhkan Empangau sebagai Danau Lindung.

Sejak itu, kesehatan ekosistem makin meningkat, seiring penguatan solidaritas sosial dan peningkatan sumber pendapatan masyarakat. Balai Riset Perikanan Perairan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 mencatat peningkatan kerapatan stok



ikan saat musim penghujan sebanyak 21.922 ekor/ha, jauh meningkat dari angka 12.000 ekor/ha pada tahun 2005. Masyarakat Empangau telah mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, jauh sebelum mengenal konsep ini dari lokakarya. Mereka tak pernah menyangka hebatnya dampak upaya mereka bertahan hidup dan melindungi sumber penghidupan dan cara mengelolanya melalui penguatan hukum adat.

Pemerintah desa mendapat tambahan pemasukan, misalnya alokasi dana solidaritas duka sebesar Rp. 200.000,00 per orang setiap tahunnya. Tata kelola pemerintah desa juga mendapat dukungan, berupa pembiayaan organisasi pemuda dan perempuan, musyawarah kampung, dan kegiatan olahraga. Beberapa fasilitas sosial seperti jalan penghubung antar rumah yang terbuat dari kayu, jembatan, bangunan sekolah, rumah ibadah, bahkan honor guru disokong sistem bagi hasil 10% dari pengelolaan Danau Lindung Empangau. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan keberhasilan masyarakat melalui dua hal: kelembagaan yang kuat serta aturan main yang jelas, tegas dan tidak diskriminatif.

Puncak penghargaan pun datang: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 16 November 2011 menobatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Danau Lindung Empangau sebagai sebagai Juara Pertama Tingkat Nasional tahun 2011. “Masyarakat seluruh dunia bisa belajar bagaimana mengelola alam secara lestari di sini,” tegas Bupati Kapuas Hulu AM Nasir. Kearifan lokal telah meraih kemenangan.

33. Tana Ulen: Tradisi Dayak Kenyah untuk Kelestarian Hutan

Oleh Andris Salu

semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya alam bisa menjadi contoh baik



Tana Ulen dalam bahasa Dayak Kenyah berarti kawasan yang dilarang atau telah dibebankan hak seseorang sehingga tidak bebas lagi untuk orang lain masuk. Secara fisik, *Tana Ulen* adalah kawasan hutan primer sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tertentu yang kaya akan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal, dan terletak tidak terlalu jauh dari kampung. Dalam konsep *Tana Ulen* pada awalnya sungai tersebut yang merupakan kawasan larangan bagi masyarakat untuk bebas mengambil ikan. Sehingga, pada saat ada tamu di kampung atau ada pesta maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan ikan dan hasil buruan lainnya di hutan sekitar.

Dalam tradisi lama, *tana ulen* adalah pemberian kepada seorang bangsawan sebagai hadiah keberhasilan dalam perang, misalnya, agar dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Sementara, sekarang pengelolaan *tana ulen* menjadi tanggung jawab bersama

pemilik adat (umumnya Kepala Adat) dengan lembaga adat, dan dikelola berdasarkan hukum adat. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di *tana ulen* harus lestari dan mempertimbangkan ketersediaan berkelanjutan SDA itu. Artinya, kawasan tersebut tidak boleh dibuka untuk membuat ladang atau untuk eksploitasi skala besar.

Di desa Long Alango, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, *Tana Ulen* sungai Nggeng masih dipelihara oleh masyarakat setempat setelah ditetapkan oleh ayah Kepala Adat Besar saat ini, Anye Apui. Pada tahun 1991, Kepala Adat bersama masyarakat mendirikan Badan Pengurus *Tana Ulen* (BPTU) untuk secara khusus mengelola kawasan *tana ulen*. Saat itu, *tana ulen* termasuk dalam Cagar Alam Kayan Mentarang. Dengan adanya kepercayaan dan kerjasama, Departemen Kehutanan dan WWF dapat membangun Stasiun Penelitian Hutan Tropis Lalut Birai di dalam *tana ulen*.



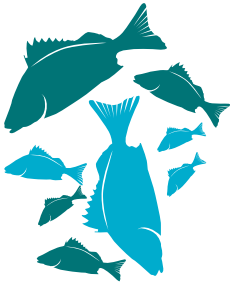
Dengan adanya perubahan status Cagar Alam Kayan Mentarang, kini *tana ulen* desa Long Alango berada dalam Taman Nasional Kayan Mentarang. Dengan adanya perubahan status ini, *tana ulen* semakin mendapatkan pengakuan dengan diakui statusnya sebagai zona pemanfaatan tradisional di Taman Nasional Kayan Mentarang. Di sana, masyarakat adat masih punya hak akses dan hak pemanfaatan.

Sedemikian baiknya pengakuan terhadap kawasan adat ini. Secara lebih khusus, pada tahun 2011 BPTU dan TNKM telah menandatangani sebuah nota kesepahaman untuk memastikan bahwa *Tana Ulen* tetap berada dibawah kekuasaan adat namun dikelola bersama sesuai semangat kolaboratif. Dengan diakuinya *tana ulen* ini, semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya alam bisa menjadi contoh baik yang bisa diterapkan di mana saja.

34. Melindungi Lumbung Ikan di Perairan Koon

Oleh Barnabas Wurlianty

Perjanjian dengan masyarakat tentang kompensasi bersifat transparan dan tertulis



Perairan sekitar Koon, Seram Timur, Maluku awalnya disinyalir sebagai salah satu daerah pemijahan kelompok ikan kerapu yang populasi bisa disimpulkan masih cukup besar. Pengamatan awal oleh pemilik kapal *dive liveaboard* (MV. Seven Seas) yang juga ahli biologi perikanan itu membuat WWF bertindak cepat

Telah lama, kawasan Koon menjadi lokasi penangkapan ikan bagi nelayan asal Grogus dan sekitarnya. Masyarakat adat desa Grogus memiliki hak ulayat atas perairan itu. Seperti halnya dengan masyarakat adat di Maluku umumnya, pengakuan atas hak ulayat laut, kepemimpinan adat (*Raja*), dan pola pengelolaan sumberdaya alam (*sasi*) sangat kuat keberadaannya. Saat ini seluruh daerah Seram Bagian Timur masih menjadi daerah ‘kekuasaan’ Raja *Kataloka*, Ansar Wattimena, keturunan raja-raja Gorom yang sangat luas pengaruhnya bagi masyarakat adat di Seram Timur termasuk Koon.

Kegiatan penangkapan ikan berlebih termasuk di habitat pemijahan sangat memprihatinkan bagi keberlangsungan sumberdaya ikan baik sebagai sumber ekonomi maupun sumber protein bagi masyarakat pesisir. Berbagai hasil penelitian kesehatan karang dan kelimpahan ikan termasuk di dalam kawasan konservasi laut (KKL) menunjukkan semakin jarang ditemukan habitat pemijahan ikan yang masih berfungsi akibat aktivitas tangkap lebih itu. Tindakan cepat diperlukan untuk melindungi kawasan yang menjadi incaran para pengumpul ikan hidup untuk tujuan ekspor itu. Maka dilakukanlah pengkajian potensi stok ikan dan peluang upaya perlindungannya bersama masyarakat pada pertengahan tahun 2010.

Melalui kegiatan sosialisasi pentingnya lumbung ikan perairan sekitar Pulau Koon kepada masyarakat *Grogus* dengan dukungan penuh Raja *Kataloka*, maka upaya perikanan berkelanjutan telah dimulai. Perjanjian Perlindungan Laut seluas 2.700 ha (*Marine Conservation Agreement-MCA*) untuk periode 1 tahun telah disepakati oleh masyarakat dan WWF yang disahkan oleh Raja di bulan Mei 2011.

Dalam perjanjian itu, kompensasi akibat hilangnya aktivitas penangkapan ikan oleh masyarakat juga disepakati secara transparan dan tertulis. Saat ini kegiatan sosialisasi MCA Koon kepada masyarakat sekitar dan pengguna kawasan serta pengawasan/patroli oleh kelompok masyarakat berlangsung di bawah supervisi Raja *Kataloka* dan Kepala Desa *Grogus*. Ini untuk memastikan kegiatan penangkapan tidak terjadi di dalam kawasan perlindungan sesuai kesepakatan. Perjanjian ini akan dievaluasi dan bila efektif akan diperpanjang.

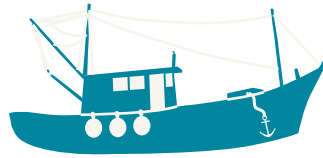


Pendekatan ini merupakan uji coba model bagi strategi perlindungan sumber daya laut dan pengelolaan perikanan serta hak pemanfaatan bagi masyarakat lewat keterlibatan dan komitmen masyarakat untuk mengembangkan zona-zona perlindungan jangka panjang. Ke depannya inisiatif ini diharapkan akan diadopsi oleh pengguna kawasan (sektor perikanan dan pariwisata) serta pemerintah sebagai salah satu strategi perlindungan sumber daya laut.

35. Lumbung Benih Garansi Penghidupan Orang Kei

Oleh Meentje Simatauw

Kita sadari bahwa para leluhur telah banyak melahirkan pengetahuan berdasarkan pengalaman interaksinya dengan alam sekitarnya. Sebagai pendahulu, kearifan mereka memanfaatkan sumber daya alam akhirnya menjadi kebiasaan untuk menyelamatkan ekosistem alam. Di Maluku, kearifan itu dikenal dengan istilah “sasi” atau lebih khusus lagi “Hu Wear” dalam komunitas Evav/orang Kei .



“Hu Wear dan sasi menunjukkan kekuatan perempuan dalam beberapa kasus sumber daya alam...”



Bagi komunitas Evav, perlindungan alam itu diturunkan dari pesan adat yang bermakna bahwa komunitas Evav adalah persekutuan hidup yang menyatu dengan alam (darat dan laut) satu rumpun dan memiliki bahasa-bahasa kiasan atau ilustrasi. Masyarakat adat bagaikan rumpun tanaman tebu, pisang,bagai kawanan ikan dan ayam dengan telurnya, dari satu induk. Mereka adalah satu darah yang terpecah kemana-mana dan menghasilkan keturunan. Maka, bagi generasi Evav, mereka memiliki hak makan bersama yakni satu lumbung bersama. Sebagai konsekuensi hubungan kekerabatan itu, mereka saling menghormati hak individu dan hak pemanfaatan sumber daya alamnya.

Hu Wear (daun kelapa muda/janur) adalah simbol penyatuan rumpun komunitas Evav. *Hu Wear* atau *sasi*, dalam fungsi perlindungan (pembatasan pengambilan), dimaknai sebagai kehadiran perempuan. *Sasi* akan dinilai semakin kuat, sakral, atau tegas ketika pada lambangnya dipasang sarung perempuan. Sementara, perempuan juga dimaknai sebagai *sasi* yang hidup. *Hu Wear* dan *sasi* menunjukkan kekuatan perempuan dalam beberapa kasus sengketa perebutan sumberdaya alam.

Pada sebuah konflik dua kampung/*Ohoi* di tahun 2007, perempuan Evav bisa menghentikan pertengkaran. Saat itu, gerakan penyerang telah memasuki batas kampung. Atas inisiatif tiga perempuan, pertumpahan darah bisa dielakkan. Ketiga perempuan itu tampil setengah telanjang badan dengan tiga ban mobil untuk meleraikan pihak yang berkonflik. Bagi komunitas Evav, terlarang melewati batas *sasi* hidup (perempuan yang berdiri), apalagi dengan setengah telanjang badan. Para laki-laki juga dilarang melewati bahkan menyentuhnya. Mereka harus mundur. Apabila terjadi pelanggaran, maka mereka akan terkena konsekuensi yang lebih besar karena munculnya solidaritas dari kampung-kampung lain yang ada hubungan kekerabatan langsung ataupun karena perkawinan (disebut kekerabatan *Tea Bel* dan kekerabatan *Yan Ur Mang Ohoi*).

Potensi perempuan dalam memelihara keutuhan penghidupan, penyelamatan generasi rumpun Kei terjadi turun temurun. Ini penting untuk meminimalkan resiko, mempertahankan kelanjutan reproduksi dan produktivitas alam, membentuk sistem nilai pada konstruksi sosial budaya di Kei. Kaum laki-laki Evav siap mati mempertahankan tanah dan saudara perempuannya. Ini bukti pentingnya perempuan dalam komunitas Evav, mengelola aset secara tertutup/internal, mempertahankan lumbung serta merawat pilar keluarga. Nilai ini berhubungan erat dengan interaksi mereka bersama Tabob atau penyus Belimbing (*Dermochelys coriacea*), yang mengikat hubungan kekerabatan *Tea Bel* mereka. Di sinilah masyarakat adat dan WWF di Kei akan terus belajar dan berjuang melestarikan ekosistem laut pulau mereka.

Kebijakan Hukum Formal yang Memperhatikan Kepentingan Masyarakat Marjinal





36. Pembelajaran dari Penyusunan Peraturan Daerah Partisipatif di Merauke

Oleh Retno Setyaningrum dan Tim WWF-Indonesia Program Papua

Masyarakat adat di sekitar hutan telah lama hidup selaras dengan alamnya. *Supermarket* dan apotik mereka ada di dalam hutan di sekitar mereka. Hampir semua kebutuhan bahan bangunan, makanan maupun obat-obatan diambil dari hutan. Bagi masyarakat adat, hutan adalah identitas budaya dan sumber ketahanan pangan lokal. Hutan juga tempat penting yang perlu dilindungi dari berbagai serbuan kepentingan atas nama pembangunan.

Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Merauke, Lembaga Masyarakat Adat Malind dan SKP KAM (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke), WWF-Indonesia telah memfasilitasi pemetaan tempat-tempat penting bersama masyarakat adat Malind. Pemetaan partisipatif ini berhasil mendokumentasikan tempat yang penting secara budaya, seperti tempat-tempat persinggahan dema, tempat sakral dan juga tempat yang penting untuk sumber kehidupan sehari-hari, seperti dusun sagu, tempat berburu, sumber air bersih dan lain-lain. Hasil pemetaan itu tersebut diusulkan masuk ke dalam peta pola ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Merauke. Usulan itu sudah diakomodasikan dalam Perda no. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke.

Untuk lebih menguatkan posisi perlindungan tempat-tempat penting tersebut dan juga untuk menguatkan posisi masyarakat adat dalam memanfaatkan dan melindungi sumber daya alamnya, maka WWF Kantor Merauke dengan dibantu Bidang *Legal Policy* WWF-Indonesia dan LSM Paham bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Merauke (melalui



“Supermarket dan apotik mereka ada di dalam hutan di sekitar mereka.”



Bagian Hukum) telah membuat RANPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Adat MalindAnim. Untuk mendapatkan masukan dari Masyarakat Adat Malind , maka telah dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan perwakilan Masyarakat Adat Malind dari 4 penjuru mata angin (Imo, Mayo, Sosom dan Esam) pada tanggal 15 dan 16 Juni 2011 di Merauke.



Rancangan PERDA ini pada akhir tahun 2011 telah diserahkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Merauke kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk dibahas dan disahkan. Untuk sementara perda ini masih menunggu persetujuan oleh DPRD Merauke. Saat ini, DPRD Merauke mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Merauke dapat melakukan konsultasi publik dengan masyarakat adat Malind dalam forum yang lebih besar sehingga mendapat cukup masukan sebelum perda tersebut disahkan.

37. Advokasi Kebijakan: Upaya Membangun Gerakan Sosial

Oleh Retno Setiyaningrum

Salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat yang didorong oleh WWF adalah “legalitas dan supremasi hukum”. WWF-Indonesia mempercayai bahwa pengakuan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya alam. Pengakuan ini seharusnya berbentuk kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif dan atau lembaga legislatif. Pada sisi ini WWF akan menjalankan advokasi bagi kebijakan yang berpihak pada masyarakat hukum adat dan konservasi.



“...pengakuan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu prasyarat mutlak...”



Advokasi kebijakan telah dijalankan di banyak kantor lapangan WWF di Indonesia. Di Riau misalnya, WWF mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kuantan No 14 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Pohon Sialang dan Hutan Kepungannya. Kepemilikan pohon Sialang atau lebih dikenal dengan pohon lebah hutan (pohon tempat lebah membuat sarang) selama ini diatur oleh aturan adat. Namun, dengan lahirnya konsesi-konsesi HTI/HPH, aturan adat ini tersisihkan karena pemerintah berpegang pada aturan legal formal dimana pemilik konsesi dianggap sebagai pihak yang “memiliki” wilayah konseni. Dengan lahirnya SK Bupati ini, di mana WWF ikut membantu diperjuangkannya pengakuan atas hak masyarakat adat, diharapkan memberikan perlindungan terhadap aturan adat yang masih berlaku dan mengikat. SK Bupati ini mengatur bahwa pohon Sialang, termasuk untuk pohon-pohon Sialang yang terdapat di dalam konsesi satu perusahaan, tidak boleh ditebang demikian juga hutan kepungannya (hutan di sekitarnya).

Di belahan Indonesia lainnya, WWF juga mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Kearifan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim. Proses penyusunan perda ini melibatkan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim secara aktif, baik melalui Lembaga Masyarakat Adat maupun melalui konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan suku-suku Masyarakat Malind Anim.

Sejumlah penyusunan peraturan daerah memang membuat staf WWF di berbagai wilayah bekerja tanpa peduli lelah untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan kepentingan konservasi sumber daya alam selalu terakomodasi. Tetapi, sejumlah pencapaian di berbagai penjuru di Indonesia telah menghapus rasa lelah itu.





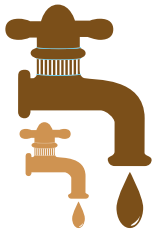
Organisasi dan Kepemimpinan Masyarakat dalam Konservasi



38. Pengelolaan kolaboratif DAS Benenain Noelmina di Timor Barat

Oleh Muhammad Ridha Hakim

*mereka percaya
kawasan hutan
Mutis Timau
adalah rumah
mereka*



Hutan Mutis Timau seluas 167.000 hektar di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sumber penghidupan utama bagi kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu. Kawasan itu adalah sumber utama air dua daerah aliran sungai (DAS) di Pulau Timor Barat, yakni DAS Benenain dan Noelmina, yang airnya penting bagi irigasi pertanian, kebutuhan rumah tangga serta industri.

Ketiga kabupaten tersebut wilayah administrasinya juga berada pada kedua DAS utama di Timor Barat itu. Bahkan, kedua DAS itu juga memasok 23 persen kebutuhan air bagi penduduk di negara Timor Leste. Wajar kalau kawasan itu disebut jantung kehidupan bagi hampir 2,3 juta jiwa. Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan, kedua DAS itu terancam perusakan serius.

Keprihatinan akan ancaman itu membuat berbagai pihak bergerak membenahinya bersama. Pengelolaan terpadu menjadi kata kunci pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Meskipun begitu, menyatukan berbagai pihak tidak mudah. Berbagai kajian tentang biodiversitas, sosial ekonomi dan budaya dilakukan pada tahun-tahun awal 2000-an. Lalu, diadakan serangkaian pertemuan bersama pemerintah, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi antara tahun 2000-2003 untuk menemukan kesamaan pandang mengenai pengelolaan bersama. Pada Agustus 2004 terbentuklah Forum DAS NTT melalui SK Gubernur NTT Nomor: 246/KEP/HK/2004. Ini menjadi sebuah wadah yang mempertemukan semangat dan visi bersama untuk kolaborasi berbagai pihak, utamanya antar kabupaten/kota dan provinsi.

Proses panjang menuju “visi bersama” itu mulai menggugah para pihak untuk menghasilkan penanggulangan masalah secara efektif. Pada tahun 2006-2007, Forum DAS NTT

menghasilkan satu dokumen perencanaan pengelolaan DAS Benenain Noelmina secara terpadu. Ini menjadi landasan bagi ketiga kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat serta menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dengan dokumen itu, masing-masing pemerintah telah mengalokasikan anggarannya, baik dari APBD, APBN maupun sumber lain. Beragam aktivitas konservasi oleh masyarakat ikut pula mengarah kepada pengelolaan yang lebih partisipatif. Forum DAS juga berhasil mendorong lahirnya payung hukum pengelolaan kolaboratif pengelolaan DAS. Atas inisiasi DPRD NTT, lahirlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan DAS terpadu di Provinsi NTT. Ini merupakan payung hukum di daerah yang pertama muncul untuk pengelolaan DAS di Indonesia, didasari oleh semangat kebersamaan untuk penanganan DAS yang lebih baik demi menjawab persoalan hutan, air dan pembangunan daerah.

Berbagai pihak terus bekerjasama hingga tertuang jelas ke dalam perencanaan dan anggaran karena semua merasakan manfaatnya. Efektifitas berbagai pendekatan dan pertemuan di berbagai lapisan, termasuk dikeluarkannya naskah kerjasama (MoU), SK Gubernur atau Bupati maupun peraturan daerah diakui pula sebagai faktor yang memperlancar pencapaian tujuan. Ini menunjukkan, kesadaran terhadap pentingnya pelestarian DAS adalah modal potensial. Semangat ini sesuai dengan filosofi masyarakat di Timor Barat bahwa “penyatuan” mengandung nilai luhur, sebagai kekayaan sekaligus pemersatu, sebagaimana yang mereka percayai bahwa kawasan hutan Mutis Timau adalah sebagai rumah mereka.



39. FORMADAT:

Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Batas Negara

Oleh Cristina Eghenter

“Kami masyarakat adat (asli) di Dataran Tinggi Borneo sebagai satu kesatuan warisan budaya dan sejarah suku Lun Dayeh-Kelabit-Lun Bawang-Sa’ban membentuk dan bersatu dalam Forum Masyarakat Adat (asal) Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT) untuk meningkatkan kesadaran dan kefahaman tentang masyarakat yang ada di Dataran Tinggi Borneo dan membangunkan kemampuan dan menggalakkan pembangunan yang lestari di jantung Borneo.”

Itulah kutipan deklarasi masyarakat adat dari kedua negara Malaysia dan Indonesia pada bulan Nopember 2006 di Bario (Sarawak, Malaysia). Deklarasi itu menunjukkan pemikiran visioner masyarakat bahwa tanah dan masa depan masyarakat adat di dataran tinggi Borneo, walaupun secara administratif terpisah, adalah satu dan membutuhkan komitmen bersama untuk membangun penghidupan yang lebih sejahtera dan mempertahankan lingkungan yang baik.

Hingga beberapa tahun lalu, daerah perbatasan Malaysia (Sarawak dan Sabah) dan Indonesia (Kalimantan Timur) adalah daerah tertinggal dan seolah terlupakan oleh pembangunan. Namun, daerah ini sejak dulu sangat dinamis dan potensial karena pertemuan dan interaksi masyarakat kedua negara. Masyarakat di Krayan, contohnya, tidak pernah putus pergi dan pulang dari Sarawak, atau sebaliknya. Kekerabatan budaya dan sosial antara masyarakat di daerah dataran tinggi serta ekonominya yang sudah sangat tergantung satu sama lain mendorong masyarakat adat Ulu Padas (Sabah), Ba’Kelalan, Long Semadoh, dan Bario (Sarawak), Krayan dan Krayan Selatan (Indonesia) untuk bergabung dalam satu forum sebagai wadah komunikasi untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan di daerah dataran tinggi dan menguatkan kerjasama masyarakat lintas batas.

Semangat positif membangun daerah perbatasan Indonesia-Malaysia telah tumbuh di masyarakat melalui FORMADAT

Inspirasi awal inisiatif FORMADAT muncul lewat lokakarya di Ba’ Kelalan (Sarawak) pada bulan September 2003 di mana masyarakat bersama perwakilan kedua negara dan beberapa ahli pertanian membahas

resiko pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan tidak menghargai kearifan lokal. Selanjutnya, pada Oktober 2004, tokoh masyarakat, laki dan perempuan, dari suku Lundayeh/Lun Bawang, Kelabit, Sa'ban bertemu di Long Bawan (Krayan, Kalimantan Timur) dan mendirikan organisasi Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT).

Sejak masa itu, FORMADAT sukses menjalin hubungan dengan beberapa mitra pemerintah, LSM, termasuk WWF-Indonesia, membangun aspek ekonomi masyarakat melalui promosi pertanian organik (beras adan Krayan) dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. FORMADAT juga membawa inovasi dalam bentuk TeleCenter dan komunikasi internet yang pertama di Krayan, membangun dan mengelola CFS atau pusat pelatihan lapangan (sekolah) untuk mempertahankan budaya dan kesenian asli daerah.

Di beberapa jaringan masyarakat adat secara internasional dan nasional, suara FORMADAT makin dikenal. Ia juga makin didengar pemerintah daerah dan LSM, khususnya dalam inisiatif konservasi tiga negara “Heart of Borneo” di mana suara masyarakat adat sebagai pemangku hak dan kepentingan dalam HOB/jantung Borneo perlu dikuatkan.

Semangat positif membangun daerah perbatasan yang telah tumbuh di masyarakat wilayah Indonesia dan Malaysia akan terus diperkuat melalui FORMADAT. Ini untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah, perkonomian yang berkelanjutan dan lingkungan lestari bagi masyarakat di jantung Borneo.



40. KOMPAKH: Jembatan antara Konservasi dan Ekonomi

Oleh Hermas Rintik Maring

Jauh sebelum dideklarasikannya inisiatif untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan jantung Borneo (*Heart of Borneo*), sejumlah anak muda di Kapuas Hulu telah memulai membentuk Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (KOMPAKH). Ini adalah wujud kepedulian mereka untuk menjawab pertanyaan apakah konservasi dan pembangunan ekonomi bisa berjalan harmonis.

Organisasi yang didirikan oleh putra-putri asli Kapuas Hulu itu dibentuk dengan motivasi berbuat nyata dalam pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada prinsip kegiatan yang ramah lingkungan, bertanggung jawab, dan berbasis masyarakat. WWF-Indonesia aktif memfasilitasi dan menemani perjalanan KOMPAKH. Beberapa diskusi intensif bersama Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kapuas Hulu (Disbudpar KH), Balai Besar TN Betung Kerihun (TNBK) dan WWF-Indonesia, mendorong sejumlah tokoh muda Kapuas Hulu mengikuti Lokakarya “Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat” di Ujung Kulon pada tahun 2004. Kembali dari lokakarya ini, mereka segera membentuk KOMPAKH (secara resmi dibentuk pada 12 Maret 2005) untuk mewujudkan mimpi mereka akan ekowisata di Kapuas Hulu.

KOMPAKH ikut mendorong agar kebijakan pengembangan ekowisata Kapuas Hulu menjadi prioritas. Organisasi ini juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kapuas Hulu sekaligus jembatan antara masyarakat dan para wisatawan. Saat ini, organisasi ini menjadi mitra strategis pemangku kepentingan kunci ekowisata di Kapuas Hulu.

jika masyarakat merasakan manfaat ekowisata, maka masyarakat kan mengamankan kawasan mereka dari berbagai macam gangguan dan ancaman



Secara organisasi, KOMPAKH memiliki dua divisi, yakni Divisi Pengembangan Ekowisata dan Divisi Bisnis. Divisi Pengembangan Ekowisata bekerja secara intensif di 13 destinasi/tujuan ekowisata. Unit ini bertugas membangun pemahaman dan kapasitas masyarakat di bidang ekowisata secara memadai. Sementara, tugas Divisi Bisnis adalah memasarkan produk-produk ekowisata di setiap destinasi. Mereka memastikan produk ekowisata komunitas dapat dipasarkan dengan baik (dengan informasi yang dapat diakses di internet di www.kompakh.org) serta memastikan wisatawan dilayani oleh komunitas dampingan sesuai standar pelayanan yang ada.

Para pegiat ekowisata ini meyakini bahwa jika masyarakat merasakan manfaat kegiatan ekowisata, maka masyarakatlah yang pertama akan mengamankan kawasan mereka sebagai aset bisnis ini dari berbagai macam gangguan dan ancaman. Sebagai organisasi ekowisata berbasis masyarakat yang telah kokoh sebagai *icon* pariwisata Kapuas Hulu, KOMPAKH telah menginspirasi kabupaten lain di Kalimantan Barat untuk mengikuti keberhasilan mereka.



Konservasi dan Dunia Usaha





41. Nelayan Tuna Balauring: Menuju Perikanan Internasional

Oleh Dwi Ariyogagautama

Balauring adalah salah satu produsen tuna terbesar di Kabupaten Lembata. Bagi pengusaha tuna berskala ekspor di Indonesia, nama desa ini sangat dikenal. Sementara, masyarakat umum lebih mengenal aktivitas perburuan paus di Lamalera sebagai *icon* kabupaten Lembata.

Pada tahun 2008, WWF-Indonesia pertama kali mulai mendata kondisi sosial ekonomi nelayan tuna Balauring. Ternyata, ternyata para nelayan tidak bekerja berkelompok melainkan bekerja sendiri-sendiri (individual). Kondisi itu sesungguhnya menyulitkan pengusaha dalam memastikan kualitas hasil tangkapan nelayan tuna. Sementara, harga jual tuna dapat ditetapkan sepihak tanpa ada posisi tawar antara nelayan dan pengusaha. Saat itu, tuna dijual dengan harga Rp. 9.000,00/kg (untuk *grade* A). Penjualan seperti ini hanya berlangsung sekitar 4-6 bulan setiap tahunnya pada musim puncak penangkapan. Sementara, pada 6-8 bulan selebihnya, nelayan menjual tuna ke pasar lokal dengan harga seekornya (± 75 kg) Rp. 250.000,00- Rp. 300.000,00 atau bisa diperkirakan seharga Rp. 3.400,00 hingga Rp. 4000,00 per kilogramnya. Selama penjualan tuna ke pasar lokal, kualitas hasil tangkapan tidak begitu diperhatikan para nelayan.

Konsep berkelompok dalam wadah forum mulai diperkenalkan oleh WWF-Indonesia agar dapat merangkul nelayan lebih luas lagi. Forum Tuna Balauring (atau disingkat 'Fortuna') lahir pada tahun 2009 dengan misi memajukan kesejahteraan anggota nelayan tuna. Dalam 2,5 tahun pertama perjalanannya, tidaklah mudah bagi pengurus forum dalam membimbing nelayan tuna. Banyak tantangan yang dihadapi hingga sudah 5 kali kepengurusan berganti. Penguatan kelembagaan memang memakan waktu.

2009-2011

*menunjukkan
43,7% hasil
tangkapan
nelayan membaik*





Meskipun masih berusia relatif muda, banyak pelajaran yang dipetik oleh nelayan selama proses membangun perikanan tuna di desa Balauring bersama WWF-Indonesia. Di antara Fortuna tersebut antara lain: telah terjadinya peningkatan pendapatan nelayan melalui hasil tangkapan berkualitas. Pengenalan praktik pengelolaan terbaik (BMP) perikanan tuna oleh WWF-Indonesia mulai pada proses penangkapan hingga penanganan tuna sampai ke kapal penampung cukup berhasil. Data *logbook* Desember 2009-Desember 2011 menunjukkan 43,7% hasil tangkapan nelayan membaik. Sementara, masyarakat juga semakin paham pentingnya membuat perijinan dan pengumpulan data hasil tangkapan. Meskipun tantangannya cukup besar, saat ini 12,3% (8 dari 65 nelayan tuna) nelayan bersedia mengisi *logbook*. Forum juga membuat mekanisme mengumpulkan *logbook* dari kapal penampung pengusaha tuna berdasarkan nota pembelian nelayan.

Lebih jauh lagi, proses partisipatif ini berhasil membangun komitmen antara nelayan dan pengusaha secara adil. Nelayan dapat menyampaikan kendala penjualan tuna ke pengusaha, begitu juga sebaliknya: pengusaha dapat menyampaikan standar mutu tuna dan harga untuk disepakati. Forum nelayan juga dapat menegosiasikan harga jual kepada pengusaha. Saat ini sudah terdapat peningkatan harga sebesar 72,2% untuk *grade A* tuna dengan harga Rp. 15.500,00/kg. Upaya komunikasi ini mulai menunjukkan manfaatnya. Nelayan Balauring semakin percaya diri menuju perikanan internasional.

42. Mo Make Unaf : Kearifan Lokal dan Mimpi Mulia

Oleh Prasetyo



*Semangat otonomi
mengubah pengelolaan
oleh pemerintah menjadi
pengelolaan berbasis
masyarakat adat dan
berdampak pada kemajuan
pengelolaan hutan yang
lestari*



Kehidupan masyarakat adat di Papua tidak terlepas dari hutan. Mitos, aspek budaya maupun ekonomi masyarakat adat selalu berkaitan dengan hutan. Hubungan erat ini adalah dasar kuat untuk memberikan kesempatan pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat. Secara adat, mereka memiliki pengetahuan pengelolaan hutan yang baik dan telah diatur sistim pengelolaannya melalui kearifan lokal secara turun temurun.

Di Merauke, sistim kearifan lokal masih kuat dan akan berdampak pada kemajuan pengelolaan hutan yang lestari. Ini peluang besar bagi masyarakat adat. Selama ini,

hutan produksi lebih banyak dimanfaatkan pihak luar yang masih sangat lemah dalam memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan. Masyarakat adat kebanyakan belum memahami kriteria pembinaan hutan ataupun teknik pemanenan hutan yang baik. Keterbatasan pengetahuan tentang ilmu kehutanan dan aturan di bidang kehutanan, manajemen pemasaran, peralatan kerja serta modal usaha merupakan faktor utama ketidakmampuan masyarakat adat memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua membawa perubahan pola pengelolaan sumber daya alam khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu. Semangat otonomi mengubah pengelolaan oleh pemerintah menjadi pengelolaan berbasis masyarakat adat.

Berdiri di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Koperasi “Mo Make Unaf” adalah unit manajemen yang sebelumnya berupa unit kelompok masyarakat pengelola hasil hutan. Pendampingan terhadap Mo Make Unaf telah dilakukan WWF sejak tahun 2005. Dengan badan hukum baru, Mo Make Unaf dilandasi kearifan lokal untuk mengelola hasil hutan (baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu). Berdasarkan kesepakatan ketika dilakukan pemetaan hak ulayat, unit manajemen ini memiliki areal konsesi seluas 4.500 hektar yang merupakan hak ulayat marga Balagaize.

Pada awal pembentukannya, unit manajemen ini diketuai oleh Agustinus Kanki Balagaize. Berdiri sebagai Koperasi Serba Usaha, lembaga ini akan bergerak di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil hutan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi XXXII.2/XII/2009 tertanggal 19 Desember 2009. Dengan berubahnya bentuk Mo Make Unaf menjadi koperasi, Agustinus Kanki Balagaize menjadi Anggota Badan Pengawas bersama-sama wakil WWF dan Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke. Sementara, ketua koperasi adalah Sefnat Balagaize.

Koperasi Mo Make Unaf adalah satu dari lima kelompok masyarakat adat yang disiapkan sebagai proyek percontohan pengelolaan hasil hutan oleh masyarakat adat di Papua. Pada prinsipnya, suatu unit kelola kehutanan berbasis masyarakat adat harus mampu mencapai tujuan pemanfaatan hutan tersebut. Harapannya, akan diperoleh manfaat optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, koperasi ini belum berjalan karena masih menunggu aturan hukum terkait model pengelolaan hutan. Kegiatan pendampingan terus dilakukan oleh WWF-Indonesia sekaligus penyiapan sarana prasarana yang akan digunakan ketika kegiatan usaha mulai berjalan. Pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Pendampingan ini untuk memberikan pengetahuan mengenai perencanaan dan prinsip pengelolaan hutan secara lestari yang berbasis kearifan lokal sehingga masyarakat mampu mencapai mimpi mulianya: meningkatkan pendapatan mereka dengan merencanakan dan mengelola hutan mereka sendiri secara lestari.

43. Mendampingi Pengelolaan Hutan Lestari oleh Masyarakat Adat di Papua

Oleh Piter Roki Aloisius

Sebelum 2008, pengelolaan hutan di Papua dianggap cenderung kurang memperhatikan prinsip kelestarian, kurang melibatkan masyarakat adat, serta belum meningkatkan ekonomi masyarakat secara signifikan. Akhirnya, pemerintah provinsi Papua mengeluarkan Perdassus No 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di provinsi Papua, dan mengembalikannya kepada masyarakat adat.

Dalam perda itu, disebutkan bahwa: “Pengelolaan hutan di Papua bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran



Pengelolaan hutan di Papua bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua

dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya...mengembangkan keanekaragaman hayati; serta mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.” Selanjutnya, Dinas Kehutanan Provinsi memfasilitasi diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Papua No 13 tahun 2010 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Adat di Provinsi Papua. Saat ini, petunjuk teknisnya masih menunggu pengesahan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

Sejak 2006, WWF-Indonesia Program Papua mendampingi dua kelompok masyarakat adat pengelola hutan, yakni kelompok Mo Make Unaf di Kampung Kaliki Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke dan kelompok pengelola hutan Jibogol di Kampung Guryat Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura. Lebih jauh lagi, terbentuk koperasi untuk pengelolaan hutan. Keduanya adalah Koperasi Mo Make Unaf (dengan pengesahan akte pendirian koperasi oleh Bupati Merauke atas nama Kementrian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 236/BH/DPPK/XII/2009 pada Desember 2009) dan Koperasi Jibogol (dengan pengesahan akte pendirian koperasi oleh Bupati Jayapura atas nama Kementrian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 340/BH/DPPK/II/2009 tanggal 11 Februari 2009). Kelompok masyarakat adat Jibogol adalah kelompok masyarakat adat Suku Tratra.

Ada tiga marga dalam kelompok suku ini, yakni Kaya, Kulang dan Birawa. Ketiganya memiliki tanah hak ulayat di dalam DAS Toarim dan DAS Wiruwai. Mereka mendapatkan ijin pemanfaatan hutan dari Gubernur Provinsi Papua seluas 5400 Ha berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor 94 tahun 2011 (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kepada KSU Jibogol), serta SK Gubernur Nomor 97 tahun 2011 (ijin usaha industri primer hasil hutan kayu rakyat masyarakat hukum adat). Ijin tersebut adalah satu dari lima ijin percontohan oleh gubernur sebagai wujud komitmen bahwa pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat adat.

Selain aspek kelembagaan dan legalitas, dilakukan survei potensi, penataan batas areal dan pemetaan partisipatif. Sebagai persiapan, dilaksanakan pula pelatihan penatausahaan hasil hutan kayu bagi KSU Jibogol dan KSU Mo Make Unaf. Selanjutnya, mereka diikutkan studi banding pengelolaan hutan tanaman rakyat ke Gunung Kidul untuk menyaksikan pengelolaan hutan yang memperoleh sertifikasi.

Dari aspek pemanfaatan, telah difasilitasi pula penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU). RKU itu mengacu petunjuk teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua sebagai gambaran pemanfaatan hutan alam selama selama 10 tahun (2012-2021) berdasarkan aspek pengelolaan lestari. Aspek itu mencakup kelestarian usaha, kepastian kawasan, keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Diharapkan, pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan secara rasional dan terukur sesuai kemampuan regeneratifnya, baik alami maupun buatan.



44. Lubuk Kakap, Kehidupan Sebuah Desa dalam Hutan Produksi

Oleh Dita Ramadhani

Perjuangan mencapai hutan lestari melibatkan pendekatan menyeluruh berbagai pihak

Masyarakat desa Lubuk Kakap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah mendiami wilayah tempat tinggal mereka selama lebih dari empat generasi. Berada di dalam hutan produksi aktif milik PT. Suka Jaya Makmur (SJM) tidak mempengaruhi kondisi alam sekitar Desa Lubuk Kakap. Selama bertahun-tahun masyarakat hidup dengan baik.

Tanpa merasa terganggu kegiatan operasional perusahaan, masyarakat terus melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka berburu, menangkap ikan dan mengambil bahan-bahan serta makanan hasil alam. Bahkan, kondisi alam yang ada di sekitar desa juga tidak mengalami penurunan kualitas meskipun hutan tersebut adalah hutan produksi.

WWF-Indonesia melalui program *Global Forest and Trade Network* (GFTN) Indonesia telah bermitra dengan PT. SJM sejak awal tahun 2009. Kemitraan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan mengimplementasikan praktik pengelolaan baik/*Best Management Practice* (BMP). Artinya, perusahaan berkomitmen menjaga hutan secara lestari dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan serta ekologi. GFTN-Indonesia bersama PT. SJM menyusun rencana kerja perusahaan agar aspek-aspek tersebut disesuaikan dengan praktik di lapangan. Perjuangan mencapai hutan lestari di konsesi tersebut tentu melibatkan pendekatan menyeluruh dengan berbagai pihak agar perhitungan di atas kertas bisa berbuah pelaksanaan yang optimal di lapangan.

Sudah sejak beberapa tahun lalu, PT. SJM telah membangun sekolah dasar untuk memfasilitasi wajib belajar generasi muda Lubuk Kakap. Mereka juga memberi bantuan finansial bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana umum desa.



Di samping itu, PT. SJM mengajak masyarakat lokal untuk bersama-sama menjaga flora dan fauna langka. Terdapat lebih dari 600 individu populasi orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*) yang hidup di dalam hutan yang dikelola PT. SJM. Perusahaan selalu mengundang perwakilan masyarakat untuk diskusi mengenai identifikasi flora dan fauna di konsesi hutan produksi, maupun mengikutsertakan perwakilan desa Lubuk Kakap dalam pelatihan kelola hutan secara lestari serta menjaga satwa dilindungi.



Pada tahun 2011, PT SJM mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari dari *Forest Stewardship Council* (FSC). Pengakuan ini merupakan penghargaan sekaligus tantangan bagi PT SJM agar tetap menjaga praktik pengelolaan hutannya sesuai prinsip kelestarian selaras dengan sekitarnya, termasuk masyarakat desa Lubuk Kakap.



Masyarakat dan Perlindungan Spesies



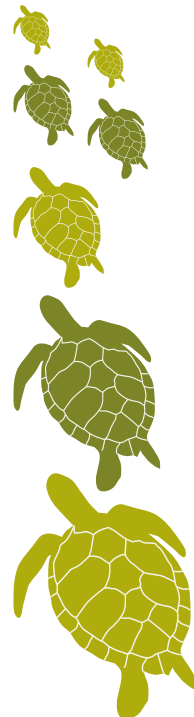
45. Ketika Masyarakat Abun Berdampingan dengan “Penjelajah Samudera”

Oleh Creusa ‘Tetha’ Hitipeuw

Kawasan pesisir pantai Jamursba Medi di pesisir utara Papua mulai diketahui sebagai habitat penting penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) sejak tahun 1980an lewat survei udara yang dilakukan oleh IUCN. Temuan ini membuat WWF mulai mengupayakan kegiatan perlindungan bersama BKSDA Papua pada tahun 1993. Upaya ini untuk menanggulangi ancaman akibat praktik pemanenan telur. Lewat survei lapangan selanjutnya, diketahui bahwa pengambilan telur penyu umumnya dilakukan oleh nelayan dari daerah lain seperti Biak, Ternate, Sorong yang membeli ‘hak pemanenan’ dari masyarakat setempat melalui sistem barter dengan garam, sabun dan barang keperluan rumah tangga lainnya.

Bagi suku Karon, yang mendiami pesisir pantai utara Papua, penyu belimbing dipercayai merupakan jelmaan leluhur yang beradaptasi dengan laut. Dipercayai, jenis penyu ini akan selalu menyediakan telur sebagai sumber protein bila mereka ‘turun gunung’ melalui upacara ‘memanggil penyu’ yang dulunya biasa dilakukan. Suku Karon sebenarnya berasal dari daerah pegunungan Tambrau. Keberadaan batu karang yang menyerupai penyu belimbing dianggap sebagai monumen bagi kepercayaan suku tersebut. Latar belakang sosial budaya yang mendukung dan terpencilnya lokasi konservasi menyebabkan pentingnya pelibatan masyarakat adat Karon dalam upaya perlindungan penyu belimbing. Melalui konsultasi dengan pemimpin desa, tokoh adat dan pemilik ulayat di desa Saubeba dan Warmandi, maka kegiatan konservasi oleh BKSDA dan WWF mulai dilakukan lewat kegiatan patroli. Dicapai pula kesepakatan untuk tidak mengizinkan pengambilan telur oleh masyarakat dari luar. Anggota patroli yang ditentukan sendiri oleh masyarakat melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas peneluran dan penanggulangan ancaman oleh pemangsanya (seperti babi). Kegiatan ini masih berlangsung hingga saat ini.

Penyu belimbing dipercayai merupakan jelmaan leluhur yang beradaptasi dengan laut.



Upaya konsisten ini membuat Jamursba Medi tetap dikenal sebagai tempat peneluran yang terbesar bagi penyu belimbing yang masih tersisa di Samudera Pasifik. Berkat pelatihan oleh lembaga penelitian seperti (NOAA dan UNIPA), anggota patroli sudah memiliki kemampuan untuk membantu kegiatan penelitian (seperti pemasangan metal tag, satellite tag, pencatatan data). Mereka juga telah mampu melakukan kegiatan mitigasi seperti penanggulangan predator babi hutan dan relokasi sarang penyu yang terancam. Lebih jauh lagi, dengan pendekatan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut yang ada saat ini, WWF tetap memperjuangkan agar pelibatan masyarakat yang sangat efektif ini bisa diadopsi dalam sebuah sistem pengelolaan kolaboratif.

Masyarakat kini makin bangga setelah mengetahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyu belimbing mereka menjelajah samudera hingga pantai timur Amerika untuk mencari makan. Cerita ini makin mendorong masyarakat Wau terlibat dalam kegiatan konservasi di tahun 2005 untuk melindungi pantai Warmon. Mereka bertekad untuk terus berdampingan dengan Sang Penjelajah Samudera.

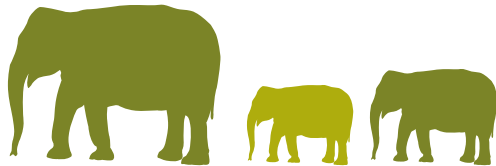


46. “Flying Squad” dan Mitigasi Konflik Manusia-Gajah

Oleh Syamsidar



Hilangnya hutan di Riau telah menyebabkan konflik manusia-gajah terus meningkat. Hutan, habitat alami gajah itu, telah berubah menjadi perkebunan sawit dan akasia sehingga daerah jelajah satwa langka ini tumpang tindih dengan aktivitas manusia. Mencermati itu, selain memperjuangkan perlindungan habitat gajah, WWF-Indonesia berusaha membantu menangani konflik manusia-gajah tersebut.



kerugian material masyarakat akibat serangan gajah mengalami penurunan sekitar

75 %

dibanding sebelum pengoperasian tim Elephant Flying Squad

Bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, WWF mengoperasikan *Elephant Flying Squad*. Tim ini terdiri dari gajah-gajah terlatih beserta perawatnya atau disebut *mahout*. Mereka bertugas mengusir dan menghalau gajah liar kembali ke habitatnya sehingga kerugian akibat konflik dapat ditekan. EFS telah lama digunakan di beberapa negara terutama India dan baru diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2004 oleh WWF-Indonesia di Riau. Tim *Flying Squad* WWF-BKSDA Riau terdiri dari empat gajah terlatih (dua jantan dan dua betina) dan delapan orang *mahout*. Mereka ditempatkan di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan. Desa itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tesso Nilo yang berintensitas konflik manusia-gajah yang tinggi.

EFS berpatroli rutin dengan menggunakan gajah dan tanpa gajah untuk mendeteksi keberadaan gajah liar. Sejak beroperasinya *Flying Squad* di Desa Lubuk Kembang Bunga, kerugian materil masyarakat akibat serangan gajah mengalami penurunan sekitar 75 % dibanding sebelum pengoperasian tim itu. Sementara, partisipasi dan pengetahuan masyarakat menangani konflik manusia-gajah juga meningkat. WWF terus melakukan memperkenalkan cara penanganan konflik gajah kepada masyarakat di sekitar Tesso Nilo dan daerah lainnya agar mereka dapat melakukan pengusiran gajah dengan tidak mencelakai baik gajah atau pun manusia.

Survei WWF bersama BKSDA Riau pada tahun 2009 memperkirakan jumlah gajah tersisa di Riau 300-330 ekor. Dari jumlah itu, sekitar 150-200 ekor gajah mendiami blok hutan Tesso Nilo yang daerah jelajahnya terdiri dari TN Tesso Nilo, hutan tersisa dan perkebunan di sekitarnya. Idealnya, untuk penanganan konflik gajah demi pengelolaan efektif TN Tesso Nilo diperlukan enam tim *Flying Squad* yang akan ditempatkan di tempat-tempat keluar masuknya gajah. Maka, WWF juga menyerukan perlunya peran serta sektor swasta terutama yang beroperasi di sekitar hutan Tesso Nilo untuk mengoperasikan tim *Flying Squad*. Satu perusahaan kertas (PT. RAPP) telah menerapkan tim *Flying Squad* secara penuh sementara dua perusahaan sawit (PT. Musim Mas dan PT. Inti Indosawit Subur) juga telah mengadopsi teknik itu namun masih dilakukan tanpa menggunakan gajah.

Aktivitas *Flying Squad* seperti patroli, perawatan gajah menjadi daya tarik tersendiri bagi program pengenalan ekologi gajah Sumatera. Pengunjung TN Tesso Nilo dapat mengikuti beberapa aktivitas ini sebagai bagian program ekowisata TN Tesso Nilo. Bahkan, dengan makanan alami yang cukup, gajah-gajah *Flying Squad* ini berkembang baik dan telah mendapat tambahan tiga ekor anak gajah yang lahir di sana yang menjadi tambahan hiburan bagi pengunjung.





Pesan Konservasi dari Masyarakat



47. *PhotoStories:* Saksi Mata Kekayaan Bumi Papua

Oleh Feronika Manohas, Agus Hadi dan Lie Tangkepayung



*Setelah
dilibatkan
pelatihan
dasar fotografi,
penentang itu
berubah menjadi
pendukung
konservasi*

Inisiatif *Photo Stories* pertama kali diperkenalkan pertengahan tahun 2011 di beberapa kampung di Papua. WWF-Indonesia dengan dukungan WWF-Denmark memulai program ini diawali dengan pelatihan fotografi bagi anak-anak usia sekolah dan pemuda di tiga kampung (Wau/Weyaf, Warmandi dan Saubeba) di Kawasan Konservasi Laut Daerah Abun serta tujuh kampung (Yomakan, Isenebuay, Yomber, Yende, Syabes, Goni, dan Kwatisore) di Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Secara prinsip, *PhotoStories* berkisah melalui foto dan cerita oleh anak-anak usia sekolah dan pemuda dari beberapa kawasan konservasi alam di Tanah Papua. Misinya adalah penyadaran dan penguatan masyarakat terutama dari kelompok usia muda akan kekayaan tanah mereka, pentingnya perlindungan dan pemanfaatan lestari sumber daya alam sekitar. Hingga kini, telah terkumpul kurang lebih 100 foto karya “fotografer” dari kampung-kampung di Kawasan Konservasi Laut Daerah Abun dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Sebagai contoh, Yohanis Sundoy seorang pemuda dari Kampung Wau/Weyaf. Ia telah terinspirasi dan menjadi pejuang konservasi setelah mengikuti program *PhotoStories*. Pemuda ini sebelumnya menentang kegiatan konservasi yang dilakukan oleh WWF di pantai peneluran Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*). Keterlibatannya sebagai fotografer *PhotoStories* membuatnya mulai merekam berbagai potensi budaya dan keunikan Abun. Secara perlahan-lahan, ia mulai terbuka wawasannya dan menyadari betapa pentingnya menjaga kawasan Abun agar tetap terjaga kelestariannya. Sebelum mengikuti program ini, Yohanis Sundoy adalah salah satu pemuda yang dengan terang-terangan menolak memberikan informasi kepada tim WWF yang saat itu sedang melakukan pengumpulan data sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Namun, sikapnya berubah dengan pendekatan para staf WWF di lapangan. Setelah dilibatkan pelatihan dasar fotografi, mengoptimalkan pinjaman kamera, serta mengeksplorasi kawasan di sekitarnya dengan kamera, Yohanis menyadari kekeliruannya memandang konservasi. Sikapnya berubah, ia kini menjadi pendukung program WWF di Kawasan Konservasi Laut Daerah Abun.

Sementara, di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Orpa Musyeri remaja putri dari Kampung Kwatisore memiliki kisah sendiri dengan kameranya. Ia, yang mahir menyelam, memilih mengikuti kegiatan *Photo Stories* untuk mendokumentasikan lincahnya Hiu Paus (*Rhincodon typus*) menari di antara perahu dan bagan di perairan laut tepat di depan kampung halamannya yang masuk dalam kawasan taman nasional. Berbekal kamera kedap air (*water-proof*) dari WWF, Orpa menari bersama Hiu Paus sambil sesekali memotret lekuk tubuh sang Gurano Bintang dari dekat. “Banyak Hiu paus yang terancam keberadaannya karena adanya luka bekas goresan atau sayatan entah karena tombak ataupun sengaja dipotong para pemilik bagan saat Hiu Paus ini masuk ke jaringnya,” ujarnya.

Meskipun baru, *Photo Stories* terus bergulir. Sejumlah kegagalan dan keberhasilan terus dicatat demi pembelajaran menuju konservasi sumber daya alam yang kreatif di Tanah Papua dan wilayah lainnya.

48. Panda CLICK!: Suara Konservasi dari Akar Rumput

Oleh Lia Syafitri

Panda CLICK! (*Communication Learning towards Innovative Change and Knowledge*) adalah bentuk komunikasi visual yang dikembangkan oleh WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat melalui pendekatan non-tradisional. Melalui media rekam visual (foto/video), program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengetahuan komunikasi visual menuju perubahan cara pandang dan pengetahuan yang lebih inovatif di masyarakat akar rumput.

Dengan kegiatan pendokumentasian, membangun jaringan media konservasi alam, dan fasilitasi, masyarakat diajak menyuarakan permasalahan atau harapan ke arah yang lebih baik. Kegiatan penguatan masyarakat ini dilakukan lewat pelatihan dasar fotografi, sinematografi, dan jurnalisme lingkungan kepada masyarakat di lokasi target program WWF-Indonesia. Mereka diajak ikut mendokumentasikan hal penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kondisi lingkungan, keanekaragaman hayati, bentang alam, sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain, baik potensi maupun permasalahannya. Dengan dipinjami kamera saku digital maupun kamera video selama 1 tahun, masyarakat mendapat tambahan pengetahuan dan kemampuan.

Awalnya, WWF-Indonesia menyampaikan informasi tentang Program Panda CLICK! kepada pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat. Untuk menguatkan komitmen para pihak yang telah sepakat, dilakukan penandatanganan Berita Acara antara WWF-Indonesia dan pemerintah kecamatan atau desa atau dusun setempat. Selanjutnya, masyarakat dilatih dan didampingi menguasai penggunaan alat (kamera foto dan video), teknik pengambilan gambar, serta mempresentasikan hasilnya secara interaktif. Selain itu, juga dilakukan praktik-praktik pengambilan gambar peserta diskusi dan tanya jawab.



*Masyarakat
terlibat dalam
menyampaikan
pesan konservasi
melalui produk
komunikasi mereka*

Setiap tiga bulan sekali, dilakukan evaluasi untuk memantau perkembangan kemampuan peserta. Foto dan video yang dihasilkan kemudian diseleksi oleh Unit Komunikasi WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, untuk dipilih dan ditampilkan dalam beberapa rangkaian lokakarya dan pameran foto berskala lokal hingga internasional. Di sini, masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan perencanaan, perekrutan peserta dan pelatihan program Panda CLICK!

Kegiatan ini berdampak positif. Masyarakat bisa terlibat langsung dalam kerja konservasi, khususnya satwa liar dilindungi seperti orangutan dan penyu. Selain itu, pengembangan ekonomi alternatif juga menjadi bagian capaian program ini melalui pengembangan potensi ekowisata berbasis masyarakat yang digali dan divisualkan oleh para peserta Panda CLICK! Peserta juga mampu menghasilkan produk komunikasi atas inisiatif mereka sendiri serta menyebarkannya kepada pihak yang lebih luas untuk menyampaikan pesan konservasi, potensi alam dan budaya, serta beragam persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, konservasi alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian beberapa masalah nyata untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan.



49. Pemasaran Sosial: Membangun Kepedulian Publik untuk Konservasi

Oleh Israr Ardiansyah

Pendekatan komunikasi dan marketing menggerakkan masyarakat untuk peduli

Disadari sepenuhnya bahwa konservasi bukan sekedar cara menyelamatkan satwa, atau melindungi satwa langka di kandang supaya tidak terkena gangguan. Konservasi adalah sebuah pendekatan terpadu multi dimensi. Itulah sebabnya, WWF percaya konservasi dan pengembangan masyarakat untuk konservasi harus seiring. Meskipun begitu, masih ada yang menganggap WWF hanya menyelamatkan satwa atau organisasi yang membawa kepentingan asing.

WWF-Indonesia mulai menggunakan pendekatan komunikasi dan marketing secara intensif di tahun 1990-an. Pendekatan ini penting untuk menggerakkan lebih banyak pihak untuk peduli. Dari aspek pendidikan lingkungan (*Education for Sustainable Development*), WWF sudah terlibat dalam kegiatan jaringan pendidikan lingkungan sejak tahun 1990-an demi generasi baru yang sadar lingkungan. Itu bersamaan dengan mulai digunakannya media audio visual untuk kepedulian konservasi. Musisi Nugie mendukung langkah awal itu dengan menjadi pembawa acara TV “Bumiku Satu”. Sementara, diterbitkan pula majalah Conservation Indonesia dan *WWF Radio Bulletin* serta dibentuk “Kerabat WWF” agar pesan konservasi bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas dan kreatif.

Setelah WWF-Indonesia *Programme* berganti menjadi Yayasan WWF-Indonesia, maka semakin besar tantangan organisasi ini untuk memperkenalkan jati dirinya yang berbadan hukum Indonesia dan memperjuangkan bumi yang lestari. Itulah sebabnya, WWF berusaha hadir dalam berbagai kampanye publik di berbagai kesempatan. Tercatat antara lain WWF berkampanye menyelamatkan hutan dan spesies, kampanye hemat energi, serta kampanye *seafood* lestari di awal tahun 2000-an.





Masyarakat di tanah air semakin mendukung organisasi ini setelah merasakan manfaat memperoleh informasi rutin dari situs WWF-Indonesia yang semakin dinamis. Program Supporter WWF dan Supporter Kehormatan WWF-Indonesia juga menunjukkan bahwa banyak yang bersedia membantu dengan daya dan dana yang mereka miliki untuk membantu konservasi. Berbagai kampanye publik yang digelar WWF secara rutin sejak pertengahan 2000-an (antara lain kampanye *Sustainable Seafood*, *Year of the Tiger*, *Green and Fair Products*, *Save Sumatra*, dan juga *Earth Hour*) perlahan tapi pasti makin dimeriahkan dengan kehadiran masyarakat dari berbagai kalangan yang bangga berkaos logo panda.

WWF juga membentuk sejumlah inisiatif yang melibatkan swasta (misalnya *Seafood Savers*, *Corporate Club*, *GFTN*, *NewTrees*) agar lebih peduli konservasi. Tak kalah penting, upaya menjangkau generasi muda yang lebih sadar teknologi informasi juga dilakukan melalui forum di dunia maya atau media film layar lebar. Komunitas *Energy Troopers*, *Marine Buddies*, Sahabat Harimau, *Rhinocare* dan puluhan ribu orang lainnya telah berinteraksi dengan WWF-Indonesia melalui tim media sosialnya. Sementara, *Living Planet Magazine* dan unit mobile pendidikan “*Panda Mobile*” sudah diterima publik. Ini menunjukkan harapan besar bahwa konservasi makin menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, bumi lestari adalah cita-cita bersama, bukan sekedar semboyan organisasi ini.

50. Konservasi Bernilai Tinggi dan Bermanfaat

Oleh Cristina Eghenter

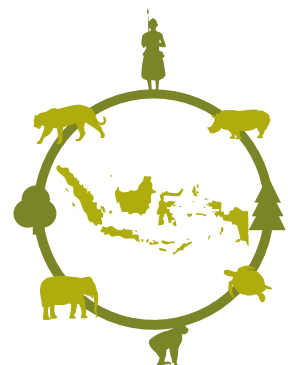
Cerita yang disajikan dalam kompilasi berbagai cerita masyarakat dan konservasi menggambarkan secara singkat (dan dari sudut pandang aksi di lapangan) proses transformasi dan adaptasi paradigma konservasi di WWF-Indonesia. Transformasi dan adaptasi paradigma itu dari sebuah aksi konservasi murni yang terfokus pada penyelamatan spesies berubah menjadi aksi pembangunan berkelanjutan. Dengan paradigma baru itu, konservasi aset alam dan jasa lingkungan dikembangkan sebagai sumber manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang dirasakan oleh semua pihak, terutama masyarakat yang kehidupannya tergantung pada alam.

Pelajaran paling berharga dari cerita ini adalah: kita memiliki jendela kecil yang membuka pandangan luas tentang lansekap dan pendekatan konservasi yang berkaitan dengan konservasi dan masyarakat. Ini bermakna dalam bahwa konservasi tidak akan berhasil jika masyarakat tidak diakui peran dan kontribusinya, dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang konservasi.

Secara lebih umum, WWF-Indonesia menyadari bahwa upaya konservasi tidak dapat terpisahkan dari perhatian kepada dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Hanya konservasi yang memiliki manfaat secara keseluruhan, berbasis hak, nilai dan tradisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat akan berdampak secara signifikan dan akan memiliki basis legitimasi dan dukungan yang tinggi. Upaya konservasi perlu menjadi upaya dan advokasi pembangunan yang berkelanjutan, akuntabel, dan berkeadilan.

Upaya konservasi perlu menjadi upaya dan advokasi pembangunan yang berkelanjutan, akuntabel, dan berkeadilan Untuk

50
tahun
ke depan



Apakah ada yang semestinya dilakukan secara lebih baik ke depan oleh WWF sebagai organisasi konservasi terbesar di Indonesia agar agenda konservasi menjadi gerakan sosial-ekologi bernilai dan bermanfaat tinggi? Tanpa bermaksud merangkum dan menyimpulkan, paling tidak ada beberapa hal yang bisa ditawarkan sebagai berikut:

- Mempertahankan rasa ‘kepercayaan’ yang telah tumbuh antara beberapa konstituensi termasuk masyarakat lokal, masyarakat adat, dan WWF;
- Menegaskan visi dan peranan WWF sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil dan perlu lebih proaktif terlibat dalam berbagai koalisi dan aliansi yang relevan.
- Memperdalam pemahaman dan perencanaan konservasi yang berdasarkan pertimbangan pemenuhan hak-hak dasar di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
- Terus menciptakan pendekatan yang inovatif dan solutif terhadap berbagai dinamika yang ada di lapangan
- Meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi konservasi untuk mempengaruhi secara lebih efektif rencana pembangunan di berbagai tingkatan.

Selama 50 tahun WWF-Indonesia bekerja bersama masyarakat untuk konservasi, semoga ini menjadi sebuah kontribusi terhadap perubahan sosial menuju masa depan yang lebih baik bagi semua.



Daftar Singkatan

AHB	: Asosiasi Hidro Bandung
AOI	: Aliansi Organik Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APMTN	: Asosiasi Petani Madu Tesso Nilo
ARC	: American Red Cross
BMP	: Best Management Practice
BOSF	: Borneo Orangutan Survival Foundation
BPTU	: Badan Pengurus Tana Ulen
BTNW	: Balai Taman Nasional Wasur
CA	: Cagar Alam
CKPP	: Central Kalimantan Peatland Project
CLICK	: Communication Learning towards Innovative Change and Knowledge
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DML	: Dana Mitra Lingkungan
DP3K	: Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EFS	: Elephant Flying Squad
EoF	: Eyes on the Forest
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
FAO	: Food and Agriculture Organization
FAR	: Forum Adat Rumpun
FGD	: Focus Group Discussion
FKPTNW	: Forum Kolaborasi Pengelola Taman Nasional Wasur
FoMMA	: Forum Musyawarah Masyarakat Adat
FORMADAT	: Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo
Formas	: Forum Masyarakat
Fortuna	: Forum Tuna Balauring
FSW	: Forest Stewardship Council
GC	: Green Coast
G&F	: Green and Fair Products
GFTN	: Global Forest and Trade Network
GRRT	: Green Recovery and Reconstruction Toolkit

HA	: Hukum Adat
HKD	: Hibah Konservasi Desa
HoB	: Heart of Borneo
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ICDP	: Integrated Conservation and Development Program
IMP	: Institusi Multi Pihak
ITTO	: International Tropical Timber Organization
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
Jikalahari	: Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau
JTR	: Jaringan Tegangan Rendah
KKD	: Kesepakatan Konservasi Desa
KKLD	: Kawasan Konservasi Laut Daerah
KKP	: Kementrian Kelautan dan Perikanan
KOMIT	: Koperasi Konservasi Mitra Tani
KOMPAKH	: Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu
KSU	: Koperasi Serba Usaha
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MCA	: Marine Conservation Agreement
MoU	: Memorandum of Understanding
MPA	: Masyarakat Peduli Api
MPA	: Marine Protected Area
NOAA	: National Oceanic and Atmospheric Administration
PADHI	: Pemerhati Dunia Hijau Indonesia
PANSU	: Pertanian Alternatif Sumatera Utara
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDP	: Pemetaan Desa Partisipatif
Perda	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
PHPA	: Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Pokmaswas	: Kelompok Masyarakat Pengawas
PPKKL	: Penetapan dan Pengkajian Kawasan Konservasi Laut
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PRA	: Participatory Rural Appraisal
RAPP	: Riau Andalan Pulp and Paper
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
RKU	: Rencana Kerja Umum
RPK	: Regu Pengendali Kebakaran

RPTN	: Rencana Pengelolaan Taman Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Alam
SJM	: Suka Jaya Makmur
SK	: Surat Keputusan
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKP KAM	: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke
SL	: Sekolah Lapang
SP3	: Surat Penghentian Penyidikan Perkara
TNBBS	: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
TNBK	: Taman Nasional Betung Kerihun
TNC	: The Nature Conservancy
TNDS	: Taman Nasional Danau Sentarum
TNKS	: Taman Nasional Kerinci Seblat
TNTC	: Taman Nasional Teluk Cendrawasih
TNTN	: Taman Nasional Tesso Nilo
UNIPA	: Universitas Papua
UPT	: Unit Pelaksana Tekhnis
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WTP	: Willingness To Pay
WWF	: World Wide Fund for Nature (WWF)
YWL	: Yayasan Wasur Lestari

Daftar Kontributor

1. Adhi Rachmat Hariyadi Project Leader, Ujung Kulon Office (s.d. 2012)
2. Afdhal Mahyuddin External Communication & Eyes on the Forest Editor
Riau Office
3. Agus Efensius Field Officer-Lanjak, Putussibau Office
4. Agus Saptono Hadi Community Outreach Coordinator, Papua Program
5. Albertus Tjiu Project Leader, Kapuas Hulu Office
6. Anas Nashrullah Community Empowerment & Sustainable
Livelihood Senior Officer,
West Kalimantan Program
7. Andris Salu Senior Field Staff Hulu Bahau, Malinau,
Kayan Mentarang Office
8. Azhar Watershed Management Coordinator, Aceh Office
9. Barnabas Wurlianty Koon Project Coordinator
10. Benja V. Mambai Director, Papua Program
11. Creusa 'Tetha' Hitipeuw Development and Partnership Leader, Marine Program
12. Cristina Eghenter Deputy Director for Social Development,
WWF-Indonesia
13. Didiek Surjanto Socio Economic Development Coordinator,
Central Kalimantan Office
14. Dita Ramadhani Responsible Trade & Networking Coordinator,
Global Forest & Trade Network (GFTN) Indonesia
15. Dudi Rufendi Newtrees Program Coordinator, WWF-Indonesia
16. Dwi Ariyogagautama Fisheries Officer-Solor Alor, Nusa Tenggara Program
17. Eri Panca Setyawan Social Development Coordinator, Kutai Barat Office
18. Feronika Manohas, Community Outreach and Development Coordinator,
Papua Program
19. Hendri Ziasmono Field Officer-Lanjak, Putussibau Office
20. Hermas Rintik Maring Ecotourism Officer, Putussibau Office
21. Israr Ardiansyah Media Outreach Coordinator, WWF-Indonesia (s.d.
2010); Advisor, Gerakan Indonesia Mengajar
22. Job Charles Project Leader, Bukit Barisan Selatan Office
23. Lia Syafitri Press and Media Development Officer,
West Kalimantan Program
24. Lorens Corridor Senior Officer, West Kalimantan Program
25. M. Hermayani Putera West Kalimantan Program Manager

- | | |
|-----------------------------|---|
| 26. M. Ridha Hakim | Nusa Tenggara Program Manager |
| 27. Markus Lasah | Forest Officer, Putussibau Office |
| 28. Meentje Simatauw | Community Empowerment Coordinator-Kei, Southeast Mollucca |
| 29. Natalie J. Tangkepayung | Communication Officer, Papua Program |
| 30. Paschalina Rahawarin | Southern Papua Program Coordinator, Papua Program |
| 31. Piter Roki Aloisius | Forest Specialist Officer, Papua Program |
| 32. Prasetyo | Community Organizer-Merauke, Papua Program |
| 33. Retno Setiyaningrum | Legal and Policy Senior Officer, WWF-Indonesia |
| 34. Rizkiasari Joedawinata | Market Transformation Initiative, WWF-Indonesia |
| 35. Rosenda C. Kasih | Central Kalimantan Program Manager |
| 36. Rudi Zapariza | Project Leader, Sintang-Melawi Office |
| 37. Sri Jimmy Kustini | Communication and Stakeholder Relation Senior Officer, Kutai Barat Office |
| 38. Sutarno | Sustainable Livelihood Coordinator, Bukit Barisan Selatan Office |
| 39. Syahirsyah (Jimmy) | Communication Senior Officer, West Kalimantan Program |
| 40. Syamsidar | Internal Communication Officer, Riau Office |
| 41. Tri Agung Rooswiadji | National Coordinator for Freshwater Program, WWF-Indonesia |
| 42. Veda Santiadji | Marine Protected Area Program Leader, WWF-Indonesia |
| 43. Yeni Nomeni | Conservation & Watershed Officer, Nusa Tenggara Program |
| 44. Zakarias Atapada | Community Empowerment Coordinator, Nusa Tenggara Program |

Daftar Fotografer

©WWF-Canon/Jurgen Freund
©WWF-Indonesia/Adji Santoso
©WWF-Indonesia/Arif Data Kusuma
©WWF-Indonesia/Barnabas Wurlianty
©WWF-Indonesia/Cristina Eghenter
©WWF-Indonesia/Didiek Surjanto
©WWF-Indonesia/Dwi Ariyoga Gautama
©WWF-Indonesia/Fauzi Bausad
©WWF-Indonesia/Hermas Rintik Maring
©WWF-Indonesia/Ichwan Rafina
©WWF-Indonesia/Israr Ardiansyah
©WWF-Indonesia/M. Irza Rinaldi
©WWF-Indonesia/M. Ridha Hakim
©WWF-Indonesia/Mahmudyani
©WWF-Indonesia/Marco Astan
©WWF-Indonesia/Markus Lasah
©WWF-Indonesia/Mast Irham
©WWF-Indonesia/Mubariq Ahmad
©WWF-Indonesia/Muhammad Saipul
©WWF-Indonesia/Natalie J. Tangkepayung
©WWF-Indonesia/Nefa D. Firman
©WWF-Indonesia-Panda CLICK!/Ungkar
©WWF-Indonesia/Patricia Dini Setyorini
©WWF-Indonesia/Primayunta
©WWF-Indonesia/Riza Marlon
©WWF-Indonesia/Samsulkomar
©WWF-Indonesia/Saipul .H. Siagian
©WWF-Indonesia/Sugeng Hendratno
©WWF-Indonesia/Sugiyanta
©WWF-Indonesia/Sunarto
©WWF-Indonesia/Supriyanto
©WWF-Indonesia/Syahirsyah (Jimmy)
©WWF-Indonesia/Syamsuardi
©WWF-Indonesia/Tira Maya Maisesa
©WWF-Indonesia/Wika Rumbiak

©WWF-Indonesia
©WWF-Indonesia & BTN Ujung Kulon
©WWF-Indonesia-Eyes on the Forest
©WWF-Indonesia & BTN Sebangau

©WWF-Netherlands/Jonne Seijdel

Kontributor foto

©Dave Forney
©Dominique Wirz
©Edwin Meru
©Itha Budi
©Robertson
©Rudi Rudsyah

Masyarakat dan Konservasi

50 Kisah yang Menginspirasi
dari WWF untuk Indonesia



© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) © "WWF" is a WWF Registered Trademark



ISBN 978-9791461306

